

**PENGARUH PENDAPATAN, INFLASI, BAGI HASIL DAN  
JUMLAH JARINGAN KANTOR TERHADAP FUNDING  
BANK SYARIAH DI INDONESIA**

**TESIS**

Oleh  
**SYAMSURI**  
NIM : 92214043404

Program Studi  
EKONOMI ISLAM



POGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2016



**PENGARUH PENDAPATAN, INFLASI, BAGI  
HASIL DAN JUMLAH JARINGAN KANTOR  
TERHADAP FUNDING BANK SYARIAH DI  
INDONESIA**

**SYAMSURI**

**Nama** : S y a m s u r i  
**NIM** : 92214043404  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Damuli, 11 Oktober 1958  
**I P K** : 3, 57  
**Yudisium** : Amat Baik  
**No Ijazah** :  
**Pembimbing** : 1. Dr. Saparuddin Siregar, SE.Ak, M.Ag, MA, CA  
 2. Dr. Andre Soemitra, MA

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pendapatan, inflasi, bagi hasil, dan jumlah jaringan kantor terhadap funding bank syariah di Indonesia. Dengan measumsikan Pendapatan Nasional / Produk *Domestik Bruto* (GDP) adalah nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun tertentu. Inflasi adalah tidak setabilnya harga barang/jasa secara terus menerus dalam waktu yang panjang yang berakibat menurunnya nilai uang secara kontinu. Bagi hasil adalah merupakan sistem pembagian hasil usaha (keuntungan maupun kerugian) yang dibagi berdasarkan rasio/nisbah dalam bentuk persentase atau porsi bagi hasil dan disepakati bersama di awal akad. Jumlah jaringan kantor adalah rasio/perbandingan jumlah kantor dimasa sekarang terhadap jumlah kantor di masa sebelumnya serta efek yang ditimbulkannya terhadap pelayanan nasabah dan jumlah dana masyarakat yang dapat dihimpun karenanya. Funding di Bank Syariah (FS), adalah penghimpunan dana masyarakat (pihak ketiga) yang dilakukan oleh bank Islam atau bank syariah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari Statistik Bank Indonesia (SBI), Statistik Otoritas Jasa Keuangan (SOJK) dan Laporan Tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Data yang terhimpun dirunut perbulan (*periodik/time series*) selama 24 bulan (2014 – 2015). Data diolah menggunakan software Eviews 8 dengan metode regresi linier berganda. Hasil olahan data dianalisis dengan Uji-Asumsi Dasar/Klasik dan Uji-Statistik/Uji Hipotesis. Diperoleh Kesimpulan, bahwa vaiabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, namun secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. PDB (X1), Bagi Hasil (X3), dan Jumlah Jaringan Kantor (X4) berpengaruh positif terhadap Funding, hanya Inflasi (X2) yang berpengaruh negatif terhadap Funding.

**Kata kunci** :PDB, Inflasi, Bagi Hasil, Jumlah Kantor, Funding, Bank Syariah.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
KATA PENGANTAR

Segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah menurunkan rahmat dan hidayah serta ketenangan kedalam hati hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN, INFLASI, BAGI HASIL, DAN JUMLAH JARINGAN KANTOR TERHADAP FUNDING BANK SYARIAH DI INDONESIA”**. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan umat Rasulullah Muhammad SAW pemimpin yang terpimpin, seorang tokoh yang tidak pernah menokoh dan senantiasa menyayangi umatnya.

Tesis ini diajukan terutama untuk memenuhi tugas akhir dan persyaratan memperoleh gelar Master of Arts (MA) pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara di Medan. Seterusnya untuk istriku *Ismaini* yang selalu mendampingi di kala suka maupun duka serta memberi dukungan secara tulus. , anak-anakku, *Syamsinar, Chitta Dini, Arsyad Jauhari, Dian Isma Hidayat, M.Siddik Permana* dan cucu-cucukuku *Zakiya Arifa, Muhammad Rasyid Lintang*, yang senantiasa memberi motivasi dan semangat penyelesaian tesis ini.

Banyak hambatan dan kendala yang menghadang, namun berkat bantuan dan bimbingan yang penulis terima dari berbagai pihak, terutama pembimbing satu dan pembimbing dua, hambatan dan kendala tersebut dapat dilalui. Atas bantuan dan bimbingan tersebut penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga terutama kepada: .....

1. Bapak Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid MA., Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Saparuddin, SE., Ak.,MAg., Ketua Program Studi Ekonomi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan pembimbing I yang telah memberikan saran, masukan, serta bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
3. Bapak Dr. Andri Soemitra MA. Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran, serta kritikan membangun untuk perbaikan penulisan tesis ini.

Tak lupa ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak tercantum namanya namun telah memberikan bantuan dan dukungan penyelesaian tesis ini. Semoga budi baik anda semua dibalas Allah dengan balasan yang lebih baik dari yang telah anda berikan. Penulis telah berusaha sekuat upaya dan sebaik mungkin dalam penggarapan tesis ini, namun penulis menyadari adanya kekurangan, kekhilafan dan keterbatasan yang mengakibatkan tesis ini kurang kesempurnaannya. Untuk itu penulis mengharapkan saran, masukan dan kritik membangun (konstruktif) dari semua pihak demi kesempurnaan dan kemanfaatan tesis ini.

Medan, Agustus 2016  
P e n u l i s

**S Y A M S U R I**  
**NIM.92214043404**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>1</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
 <b>BAB. I PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	12
C. Perumusan Masalah .....	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	15
F. Sistematika Pembahasan .....	17
 <b>B A B. II LANDASAN TEORI</b>	
<b>A.Pendapatan .....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian .....	18
2. Pendekatan Penghitungan Pendapatan .....	19
3. Beberapa Kaidah Menghitung GDP .....	23
4. Keseimbangan Ekonomi.....	28
5. Teori Pertumbuhan Ekonomi .....	30
6. Keterkaitan PDB Terhadap Funding.....	33
<b>B. I N F L A S I.....</b>	<b>36</b>
1. Pengertian .....	36
2. Macam-macam Teori Inflasi.....	39
3. Laju Inflasi.....	42
4. Penyebab Inflasi .....	43
5. Dampak Inflasi .....	45
6. Kebijakan Anti Inflasi .....	46
7. Keterkaitan Inflasi Terhadap Funding.....	49
<b>C. BANK SYARIAH.....</b>	<b>54</b>
1. Pengertian .....	54
2. Sejarah Pendirian Bank Syariah .....	59
3. Aplikasi Produk Bank Syariah .....	62
4. Jumlah Jaringan Kantor Bank Syariah.....	66
5. Keterkaitan Jumlah Jaringan Kantor Terhadap funding .....	68
6. Bagi Hasil Di Bank Syariah.....	69
7.Keterkaitan Bagi Hasil Terhadap Funding .....	73
<b>D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>74</b>

<b>E. Konstruksi Model Penelitian .....</b>	<b>76</b>
<b>F. Hipotesis Penelitian .....</b>	<b>83</b>

### **BAB. III METODE PENELITIAN**

<b>A. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>85</b>
<b>B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>85</b>
<b>C. Populasi dan Sampel .....</b>	<b>86</b>
<b>D. Defenisi Operasional .....</b>	<b>86</b>
<b>E. Instrumen Pengumpulan Data .....</b>	<b>87</b>
<b>F. Teknik Analisa Data .....</b>	<b>88</b>
<b>1. Uji Asumsi Dasar / Klasik .....</b>	<b>89</b>
<b>2. Uji Statistik .....</b>	<b>92</b>

### **BAB. IV HASIL PENELITIAN**

<b>A. Deskripsi Data .....</b>	<b>94</b>
<b>B. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis.....</b>	<b>113</b>
<b>C. Temuan Penelitian .....</b>	<b>127</b>
<b>D. Diskusi Hasil Penelitian .....</b>	<b>129</b>

### **BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>133</b>
<b>B. Saran – saran .....</b>	<b>135</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>137</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>139</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Adanya rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank* (IDB) pada Sidang Menteri Keuangan OKI di Jedah tahun 1975 ternyata memiliki gaung yang luas, sehingga bank-bank syariah maupun lembaga keuangan Islam lainnya bermunculan di berbagai negara, terutama di negara yang mayoritas penduduknya Muslim.

*Kuwait Finance House* yang beroperasi dengan sistem tanpa bunga pada tahun 1977, selama dua tahun (1980-1982) mampu menyerap dana masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) meningkat secara fantastis dari sekitar KD 149 juta menjadi KD 474 juta sehingga pada akhir tahun 1985 total asetnya mencapai KD 803 juta dan tingkat keuntungan bersih mencapai KD 17 (satu Dinar Kuwait setara dengan 4 hingga 5 dolar AS)<sup>1</sup>.

Menyusul beroperasinya bank syariah pertama *Faisal Islamic Bank* di Mesir tahun 1978. Pakistan dengan menggunakan sistem bagi hasil pada awal tahun 1985 juga menghapus sistem bunga pada institusi keuangannya seperti *National Investment (Unit Trust)*, *House Building Finance Corporatiao*n (pembiayaan sektor perumahan) dan *Mutual Funds of the Investment Corporatiao*n of Pakistan (kerjasama investasi). Adanya sistem bagi hasil, operasi dengan sistem tanpa bunga, yang mampu menyerap dana masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) meningkat secara fantastis, memicu semangat beberapa negara lainnya termasuk Indonesia mendirikan 7 bank syariah.

---

<sup>1</sup>Muhammad, Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h.21.

Bank syariah pertama di Indonesia didirikan tanggal 1 Mei 1992, dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat menggunakan sistem bagi hasil dan sistem lainnya dengan prinsip-prinsip Islam.

Krisis moneter yang mengguncang Indonesia tahun 1997 membuat perbankan konvensional lumpuh yang disebabkan oleh kredit. Kredit yang semulanya lancar akhirnya menjadi macet. Sedangkan perbankan syariah semakin berkembang di Indonesia. Operasional bank syariah menerapkan konsep bagi hasil dan prinsip *revenue sharing* serta *profit sharing* dalam distribusi pendapatannya, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan<sup>2</sup>.

Secara keseluruhan bank syariah di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu, Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BUS memiliki bentuk kelembagaan seperti Bank Umum konvensional. BPRS memiliki bentuk kelembagaan seperti BPR konvensional. Badan hukum BUS dan BPRS dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Adapun UUS bukan merupakan badan hukum tersendiri, tetapi merupakan unit atau bagian dari suatu Bank Umum konvensional. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam menjalankan kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya bank syariah menganut prinsip-prinsip, keadilan yang tercermin diantaranya dari penerapan imbalan bagi hasil, kemitraan yang tercermin dalam hak dan kewajiban risiko. Prinsip ketentraman, transparansi / keterbukaan, universalitas, tidak ada riba (*non-usurious*), dan prinsip laba yang

---

<sup>2</sup>Sofyan, S. Harahap, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah Edisi Revisi, (Jakarta : LPFE – Usakti, 2006), h. v.



wajar (*legitimate profit*)<sup>3</sup>. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa periode 2014 hingga Februari 2015 pada BUS terjadi penurunan jumlah kantor dari 2.151 menjadi 2.144 kantor. Jumlah kantor UUS naik dari 320 bertambah menjadi 324 kantor. Demikian juga BPRS terjadi penurunan dari 439 menjadi 436 kantor. Pertumbuhan dan pengurangan jumlah jaringan kantor BUS, UUS, dan BPRS, serta jumlah Sumber Daya Insani (SDI) yang bersumber dari Statistik Bank Indonesia (BI) yang telah diolah adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 : Jumlah Kantor dan SDI Perbankan Syariah**  
**Sumber : Statistik OJK dan BI Telah dimodifikasi<sup>4</sup>**

	Des 2014	Feb 2015
<b>Jumlah Kantor</b>		
Bank Umum Syariah	2.151	2.144
Unit Usaha Syariah	320	324
BPR Syariah	439	436
<b>Jumlah SDI</b>		
Bank Umum Syariah	41.393	49.101
Unit Usaha Syariah	4.425	4.591
BPR Syariah	4.704	4.542

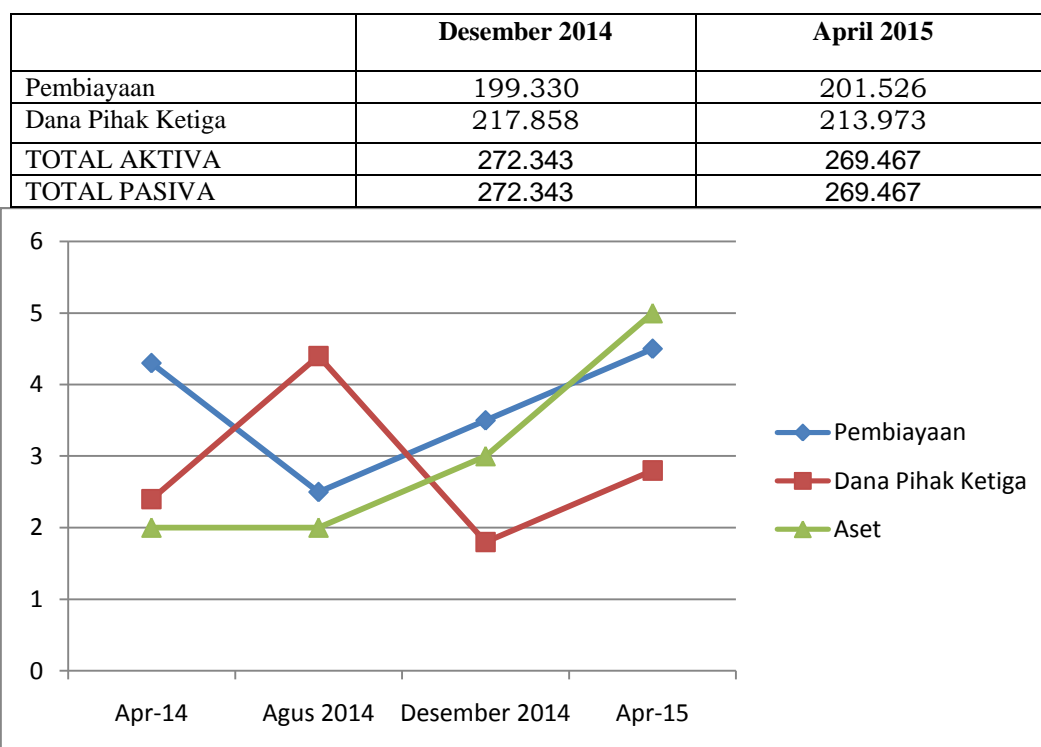
Persaingan di wilayah pangsa pasar BPRS ini akan makin ketat karena di akhir tahun 2001 BI mengeluarkan aturan yang mewajibkan bank umum untuk mengeluarkan 20 persen kredit ke usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dalam mengaplikasikan produknya baik berupa *Funding*, *Financing*, maupun *Service* dengan sistem bagi hasil mudharabah maupun wadi'ah, pertumbuhan aset dan perolehan laba bank syariah secara nasional diperkirakan masih sekitar dibawah 5%, dan belum berarti apa-apa bila dibanding dengan pencapaian bank konvensional, berdasarkan Statistik Otoritas Jasa Keuangan dari akhir tahun 2014

<sup>3</sup>Veithzal Rivai, Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 759-760.

<sup>4</sup>(<http://www.ojk.go.id>) dan website BI (<http://www.bi.go.id>).

sampai April tahun 2015, pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK), Aktiva dan Passiva Tabel 6. Neraca Gabungan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan positif maupun negatif seperti terlihat dalam tabel 2 dan grafik berikut.

**Tabel 1.2 : Perkembangan Perbankan Syariah (dalam miliar Rp)**



Sumber : Statistik OJK dan BI Telah dimodifikasi<sup>5</sup>

Saat ini, per April 2015, total aktiva BUS dan UUS tercatat Rp 269.467 miliar atau Rp 269,467 triliun, sedangkan aset BPR konvensional mencapai RP 719 triliun. Perbedaan itu sesuai dengan jumlah bank di mana BPRS sebanyak 159, dan BPR konvensional 1.641. Jumlah penambahan BPRS belakangan

<sup>5</sup>(<http://www.ojk.go.id>) dan website BI (<http://www.bi.go.id>).

terbilang lambat<sup>6</sup>. Neraca keuangan BUS dan UUS periode 2014 - April 2015 tertera sebagai berikut :

**T A B E L 1. 3**  
**NERACA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH (BUS) DAN UNIT USAHA SYARIAH (UUS)**

	Desember 2014	April 2015
<b>AKTIVA</b>		
1 Kas	3.636	3.025
2 Penempatan pada Bank Indonesia	43.412	37.748
3 Penempatan pada Bank Lain	7.015	7.059
4 Surat Berharga yang Dimiliki	11.466	12.860
5 Pembiayaan	199.330	201.526
6 Tagihan Lainnya	1.386	1.146
7 Aktiva <i>Istishna</i> dalam Penyelesaian	15	10
8 Penyisihan Penyusutan A.P	5.025	4.986
9 Penyertaan	100	79
10 Aktiva Tetap dan inventaris	4.094	4.260
11 Antar kantor Aktiva	154.432	162.062
12 Rupa-rupa Aktiva	6.915	6.740
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>272.343</b>	<b>269.467</b>
<b>PASIVA</b>		
1 Dana Pihak Ketiga	217.858	213.973
2 Kewajiban kepada Bank Indonesia	-	-
3 Kewajiban kepada Bank Lain	9.710	9.476
4 Surat Berharga yang Diterbitkan	279	279
5 Pinjaman Diterima	2.155	2.055
6 Kewajiban lainnya	821	691
7 Pinjaman Subordinasi	329	279
8 Antar Kantor Pasiva	169.546	179.000
9 Rupa-rupa Pasiva	4.831	4.754
10 Modal disetor	10.644	10.695
11 Tambahan modal disetor	1.894	1.823
12 Selisih Penilaian kembali Aktiva Tetap	655	648
13. Dan lain-lain	7.532	8.404
<b>TOTAL PASIVA</b>	<b>272.343</b>	<b>269.467</b>

**Sumber : Statistik OJK dan BI Telah dimodifikasi<sup>7</sup>**

Di satu sisi pangsa pasar bank konvensional jauh lebih tinggi meninggalkan pangsa pasar bank syariah. Tetapi di sisi lain terbukti bahwa bank syariah bukan saja tumbuh jauh di atas bank konvensional di Indonesia, bahkan tumbuh dua kali lebih cepat dibanding pertumbuhan bank syariah global<sup>8</sup>.

<sup>6</sup>Anif, Ponto Utomo, Dua Dekade Ekonomi Syariah Menuju Kiblat Ekonomi Islam, (Jakarta : GRES Publishing PKES, 2014), h.103-104.

<sup>7</sup>(<http://www.ojk.go.id>) dan website BI (<http://www.bi.go.id>).

<sup>8</sup>Anif, Ponto Utomo, Dua Dekade Ekonomi Syariah Menuju Kiblat Ekonomi Islam, h. 91.

Didirikannya Bank Syariah dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya, memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agama. Dengan tujuan supaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits<sup>9</sup>.

Adanya penilaian pendapatan nasional (GDP) berdasarkan penghitungan harga pasar barang dan jasa atau perkiraan nilai terkait (*inputed value*) oleh *Mankiw*<sup>10</sup>, yang berarti pula bahwa barang yang tidak di jual di pasar tidak memiliki nilai pasar. Adanya kritikan bahwa GDP perkapita bukanlah ukuran kesejahteraan yang sempurna, artinya orang-orang yang mengurangi jam kerja atau menambah waktu istirahat (*leisure*) tidak menggambarkan orang-orang tersebut tidak sejahtera, sebagaimana konsep MEW (*Measure of Economic Welfare*) yang diajukan oleh Nordhaus dan Tobin<sup>11</sup>. Sangat disayangkan konsep MEW tidak berkembang, hingga sampai saat ini cenderung menggunakan GDP riil perkapita sebagai ukuran kesejahteraan suatu negara. Walaupun ada beberapa indikator sebagai pernyataan keberatan penggunaan GDP riil perkapita telah diajukan. Salah satunya adalah : GNP seharusnya menghitung nilai waktu istirahat (*leisure time*).

John Maynard Keynes dalam bukunya *The General Theory of Employment Interest and Money* (1936) menyatakan pendapatnya bahwa : Pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peran penting. Selanjutnya oleh *Mankiw* dikatakan bahwa, pengaruh tingkat bunga terhadap konsumsi hanya sebatas teori<sup>12</sup>.

Dalam hal ini menekankan perlunya peran pemerintah. Berbeda dengan teori *invisible hands* yang dikemukakan oleh *Adam Smith*, pasar akan diatur oleh tangan-tangan yang tidak terlihat (*invisible hands*) bukan ditetapkan oleh

---

<sup>9</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, h.18.

<sup>10</sup>N..Gregory Mankiw, Makro ekonomi Edisi Keenam, (Jakarta : Erlangga, 2007), h. 21

<sup>11</sup>Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 27.

<sup>12</sup>N..Gregory Mankiw, Makro ekonomi Edisi Keenam, h. 447.

pemerintah, karena ia tergantung pada hukum *supply and demand*. Dalam bukunya *An inquiry into the Nature and Cause of The Wealth of Nation* (1776), oleh George Soule kemudian ditulis, pemikirannya melahirkan paham kapitalis yang dikenal sebagai aliran klasik.<sup>13</sup> Masalahnya adalah pertumbuhan ekonomi itu sendiri ternyata tidak berjalan sebagaimana seharusnya, sangat tidak seimbang. Dampak ketimpangan pertumbuhan ekonomi bukan sekedar soal teori atau rumus canggih ilmu ekonomi, tetapi fakta di lapangan yang membuktikan.

*Rudiger Dornbusch* dan *Stanley Fischer* menyatakan bahwa : “Perhitungan pendapatan nasional akan memberikan kepada kita perkiraan GNP secara teratur, yakni pengukuran dasar dari kinerja perekonomian dalam memproduksi semua barang dan jasa. Perhitungan pendapatan nasional juga berguna untuk menerangkan hubungan antara ketiga variabel kunci dalam ekonomi makro yaitu ; *output*, pendapatan, dan pengeluaran”<sup>14</sup>.

Dalam ekonomi Islam dijadikannya indikator kesejahteraan adalah parameter *falah*, dimana *falah* merupakan kesejahteraan hakiki (*real welfare*). Islam mengajarkan hidup dalam keseimbangan ketika berhadapan dengan harta (kekayaan).

Dalam surat al-Furqan (25 ; 67) ALLAH SWT berfirman :

: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya; Dan (termasuk hamba-haba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, diantara keduanya secara wajar<sup>15</sup>.

<sup>13</sup>George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonometri*, T Gilarso (Yogyakarta : Kanisius, 1994), h.52–56.

<sup>12</sup>*Rudiger Dornbusch, at all*, *Ekonomi Makro* (terj) Edisi Kelima, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1970), h. 40.

<sup>15</sup>Kementrian Agama RI, *AIWASIM Al-Qur'an Tajwid Kode*, (Jakarta, Cipta Bagus Segara, 2013), h. 365.

Harta kekayaan (pendapatan) itu bukanlah tujuan hidup, akan tetapi kebutuhan hidup yang mesti diupayakan untuk memperolehnya dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan dan tuntutan pemberi kehidupan. Dalam surat al-Qashas (28 ; 77) ALLAH SWT berfirman :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : Dan carilah (pahala/kebaikan) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan<sup>16</sup>.

Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua-duanya dapat menimbulkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik dan sosial. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu di jalankan<sup>17</sup>. Suatu hal yang mustahil untuk mengukur tingkat inflasi maupun perkembangan pendapatan nasional (GDP) apabila alat ukurnya tidak stabil dan mudah berubah-ubah. Pada masa ini terdapat tiga indeks harga yang penting, yaitu indeks harga konsumen (IHK) /*consumer price index* (CPI), *producer price index* (PPI), dan *pendeflasi GDP* atau *GDP deflator*<sup>18</sup>. Fakta membuktikan bahwa inflasi tidak

---

<sup>16</sup>Kementrian Agama RI, AlWASIM Al-Qur'an, h 394.

<sup>18</sup>Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Modern, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 48.

hanya disebabkan oleh kenaikan harga maupun GDP deflator semata, tetapi juga disebabkan oleh kebijakan moneter, dan nilai instrinsik uang itu sendiri.

*Veithzal Rivai* menyatakan bahwa : “Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Peran tersebut tercermin pada kemampuannya dalam menciptakan stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran dengan sasaran akhir terciptanya stabilisasi harga”<sup>19</sup>.

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Konsep uang dalam ekonomi Islam adalah *flow concept*, yaitu harta tidak boleh ditumpuk, tetapi harus disirkulasikan. Dalam Islam uang adalah *public goods*, sementara modal adalah *private goods*. *Imam Ghazali* pernah menyampaikan pendapatnya, bahwa : “Uang ibarat cermin : uang tidak memiliki harga, tetapi uang dapat *merefleksikan* (memantulkan) semua harga ” dan dia mengecam orang yang menimbun uang menganggapnya sebagai penjahat. *Al-Ghazali* membolehkan peredaran uang yang sama sekali tidak mengandung emas dan perak asalkan pemerintah menyatakan sebagai alat pembayaran resmi<sup>20</sup>. Sebagai *public goods* uang tidak boleh diperdagangkan. Pada ekonomi konvensional tidak dibedakan antara uang dan modal (*capital*). Sering istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik (*interchangeability*), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai modal (*capital*). Fenomena beredarnya tiga jenis mata uang, dinar (emas), dirham (perak), dan fullus (tembaga), kemudian dirumuskan oleh *Ibnu Taimyiah* bahwa uang dengan

---

<sup>19</sup>Veithzal Rivai, d Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System, h. 190.

<sup>20</sup>Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam, (Jakarta : Salemba Empat, 2002), h. 24-25.

kualitas rendah akan menendang keluar uang kualitas baik<sup>21</sup>. Adanya fakta bahwa, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dengan sistem bagi hasil atau tanpa bunga, meningkat di awal dasawarsa pendiriannya. Bank syariah mampu bertahan di masa krisis sementara bank konvensional mengalami keterpurukan, sebaliknya di masa normal pangsa pasar perbankan konvensional jauh meninggalkan perbankan syariah. Menatap perekonomian Indonesia, data statistik GDP serta Inflasi periode tahun 2014-2015 pada tabel 4 terlihat semacam anomaly, karena keduanya berbanding lurus. Hal ini memicu dan memacu semangat untuk mencari tahu (meneliti) mengapa ketidak wajaran ini dapat muncul ke permukaan.

**Tabel 1.4 : Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan Inflasi Periode 2014-2015**

Periode Tahun	Pendapatan Nasional (PDB)	I N F L A S I
Desember 2014	888.5 billion USD	8.36 %
Desember 2015	861.93 billion USD	3.35 %

**Sumber :** Statistik BI Telah dimodifikasi PS<sup>22</sup>

Berbeda-bedanya pendapat para ahli ekonomi tentang pendapatan terkait kesejahteraan. Adanya kritikan GDP riil/kapita sebagai ukuran kesejahteraan. Pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia yang diasumsikan mengalami peningkatan setiap tahunnya namun warga pra sejahtera juga meningkat jumlahnya.

Dalam *survey* rutin yang diadakan oleh *International Institute for Management Development*, dari tahun ke tahun Indonesia secara terus menerus berada di urutan bawah, dan lebih memperhatikan lagi, kian lama kedudukannya semakin merosot. Pada tahun 2007, Indonesia malahan telah memperoleh titik dasar dengan menempati urutan ke 54 dari 55 negara yang disurvei. Di lingkungan ASEAN, Filipina adalah Negara yang peringkatnya paling “dekat”, namun masih

<sup>21</sup>A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terj. Anshari T, (Surabaya : Bina Ilmu, 1997), h. 177.

<sup>22</sup><http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx>.



menyisakan Sembilan peringkat lebih tinggi. Dalam posisi ini bagaimana mungkin sebagian pejabat dan politisi kita masih berani mengatakan kalau Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik<sup>23</sup>.

Demikian juga terhadap penyebab inflasi, banyak pengertian maupun pendapat yang berbeda-beda. Ada pendapat yang mengatakan bahwa inflasi dapat dikendalikan melalui kebijakan pemerintah, yaitu dengan kebijakan fiskal maupun moneter. Di sisi lain kenaikan barang dan jasa serta indeks harga konsumsi / *consumer price indeks* (CPI) tidak selamanya menunjukkan terjadinya inflasi. Adanya inflasi sulit terjadi jika uang dicetak berdasarkan nilai penuh (*full bodied money*) dimana nilai intrinsik uang sama dengan nilai nominalnya. Pendapat lain lagi mengatakan konsep uang harus jelas, bahwa uang adalah uang (*public goods*) yang tidak boleh diperdagangkan tetapi untuk membantu memproduksi barang lain dalam memenuhi kebutuhan., bukan sebagai modal / capital (*private goods*) yaitu barang yang dihasilkan alam atau buatan manusia. Apalagi bila uang diartikan secara bolak – balik (*interchangeability*) yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai modal (*capital*)<sup>24</sup>. Berdasarkan uraian di latar belakang masalah, bahwa bank syariah tangguh di masa krisis, tetapi tertinggal jauh di masa normal oleh bank konvensional. Sistem bagi hasil / tanpa bunga berhasil memperoleh keuntungan secara fantastis di negara lain, tetapi mengapa di Indonesia tidak demikian, sementara jumlah jaringan kantor juga bertambah setiap tahunnya. Prinsip syariah yang melekat pada perbankan syariah semestinya merupakan daya tarik bagi nasabah loyal, tetapi sampai saat ini sulit dipilah dan dipilih antara

---

<sup>23</sup>Faisal Basri, Haris Munandar, *Lanskap Ekonomi Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2009), h. 35.

<sup>24</sup>M. Nur Rianto al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung CVPustaka Setia, 2012), h. 63.

nasabah loyal dan nasabah tak loyal. Fakta lain menunjukkan bahwa PDB Indonesia meningkat setiap tahunnya, tetapi masyarakat pra sejahtera meningkat juga jumlahnya. Kebijakan fiskal dan moneter oleh Pemerintah dan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral kerap dilakukan untuk meredam inflasi, tetapi mengapa harga-harga barang dan jasa (sektor riil) di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Fakta-fakta tersebut mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN, INFLASI, BAGI HASIL, DAN JUMLAH JARINGAN KANTOR TERHADAP FUNDING BANK SYARIAH DI INDONESIA”**.

### **B, Identifikasi Masalah**

Aset dan pangsa pasar (*market share*) bank syariah masih jauh tertinggal dari bank konvensional. Bank syariah dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam hanya mampu tumbuh dan berkembang di masa krisis. Sementara di masa normal aset perbankannya selalu tertinggal oleh aset perbankan konvensional. Ketika krisis dapat tumbuh dan berkembang, apalagi di masa normal, funding dengan konsep bagi hasil semestinya lebih unggul dibanding konsep bunga pada bank konvensional. Di satu sisi pangsa pasar bank konvensional jauh lebih tinggi meninggalkan pangsa pasar bank syariah. Tetapi di sisi lain terbukti bahwa bank syariah bukan saja tumbuh jauh di atas bank konvensional di Indonesia, bahkan tumbuh dua kali lebih cepat dibanding pertumbuhan bank syariah global, demikian juga jumlah jaringan kantor selalu berbanding lurus dengan funding. Dalam periode pascakrisis Indonesia bahkan

mengalami disparitas antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran<sup>25</sup>. Banyaknya perbedaan pandangan GDP terkait kesejahteraan (*welfare*), di sisi lain Pendapatan Nasional Indonesia senantiasa mengalami peningkatan mestinya rakyatnya tambah sejahtera dan dapat menambah simpanan uangnya di bank yang tentunya dapat berimbas pula kepada, minimnya inflasi, meningkatnya bagi hasil, peningkatan pembangunan kantor, yang akhirnya bermuara kepada peningkatan funding bank syariah di Indonesia. Dari beberapa pendapat berbeda tentang penyebab inflasi serta adanya Kebijakan Fiskal dan Moneter sebagai upaya untuk meredam/menurunkan inflasi di Indonesia, minimal kebijakan tersebut tidak hanya meningkatkan pangsa pasar perbankan konvensional, tetapi juga funding di perbankan syariah. Di masa mendatang tantangannya akan kian berat jika pertumbuhan ekonomi yang timpang itu dibiarkan berlanjut<sup>26</sup>. Sebenarnya secara umum data ketenaga kerjaan, termasuk tingkat pengangguran, selama ini tidak sejelas dan selengkap data PDB. Masalah lemahnya data ketenagakerjaan ditambah lagi dengan sinyalemen bahwa pemerintah acapkali sengaja memoles data pengangguran sedemikian rupa demi kepentingan politik<sup>27</sup>.

### C. Perumusan Masalah

Sesuai dengan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, indentifikasi masalah, dan pemilihan judul penelitian, maka masalah pokok yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini adalah :”Bagaimana pengaruh pendapatan, inflasi, bagi hasil dan jumlah jaringan kantor terhadap funding di

---

<sup>25</sup>Faisal Basri, Haris Munandar, Lanskap Ekonomi Indonesia, h. 59.

<sup>26</sup>Faisal Basri, Haris Munandar, Lanskap Ekonomi Indonesia, h. 59.

<sup>27</sup>Faisal Basri, Haris Munandar, Lanskap Ekonomi Indonesia, h. 61.

bank syariah ”. Hal ini perlu diuji dan dianalisis melalui pertanyaan terukur, dan dirumuskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap funding di bank syariah ?
2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap funding di bank syariah ?
3. Bagaimana pengaruh bagi hasil terhadap funding di bank syariah?
4. Bagaimana pengaruh jumlah kantor terhadap funding di bank syariah ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan secara umum untuk mengetahui pengaruh pendapatan, inflasi, bagi hasil dan jumlah jaringan kantor, terhadap penghimpunan dana (*funding*) di bank syariah. Pada sisi akademis sebagai aplikasi mata kuliah penulisan tesis dan menambah wawasan tentang perbankan syariah. Perbankan syariah secara global tumbuh dengan kecepatan antara 10-15% pertahun, dan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang konsisten di masa depan (**Juhaya S. Pradja ; 2011**)<sup>28</sup>. Berdasarkan paparan-paparan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh pendapatan nasional (PDB) terhadap funding bank syariah. di Indonesia.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap funding bank syariah di Indonesia.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh bagi hasil dan jumlah jaringan kantor terhadap funding bank syariah. di Indonesia.

---

<sup>28</sup>M. Nur Rianto al-Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis, h. 5.

4. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh seluruh variabel independen, baik secara parsial maupun simultan terhadap funding bank syariah. di Indonesia sebagai variabel independen (variable terikat).
5. Membuat kesimpulan sebagai bahan laporan dalam penelitian ini, serta menyampaikan beberapa saran yang perlu bagi penelitian terkait di masa datang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini minimal dapat memberi gambaran tentang potret perekonomian makro ekonomi secara umum serta eksistensi perbankan syariah di Indonesia.

Dalam perekonomian yang mengabaikan asas keadilan (biarpun perekonomian itu kalau ditinjau dari kacamata ilmu ekonomi murni atau kajian makroekonomi yang mengandalkan besaran-besaran agregat sudah benar), hakekat kesejahteraan juga tidak menjelma seutuhnya. Perekonomian seperti itu akan penuh diwarnai oleh kriminalitas dan berbagai penyimpangan, termasuk korupsi, belum lagi kalau dilihat secara moral<sup>29</sup>.

Munculnya kesadaran anak bangsa untuk menelusuri ide-ide para ekonom khususnya para ekonom yang berbasis syariah. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dimulai pada akhir 1980-an yang melahirkan satu bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Akan tetapi perkembangan keuangan syariah di Indonesia pada saat ini sangat lambat<sup>30</sup>. Harus muncul semangat dan motivasi anak bangsa untuk meneropong perkembangan keilmuan pada umumnya khususnya perkembangan ekonomi di Indonesia serta memunculkan ide-ide maupun gagasan aplikasi ekonomi syariah secara baik dan

---

<sup>29</sup>Faisal Basri, Haris Munandar, Lanskap Ekonomi Indonesi, h. 79.

<sup>30</sup>M. Nur Rianto al-Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis, h. 7.

benar. Sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat tentang keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Atas dasar tersebut peneliti berharap hasil penelitian ini berguna / bermanfaat, terutama bagi diri sendiri, orang - perorang (individu), pemikir (akademisi), pelaku ekonomi (ekonom), praktisi perbankan (bankir), maupun pembuat kebijakan (*Stake holder*) di pemerintahan sebagai berikut :

1. Bahan dasar kajian, bahan informasi, bahan perbandingan, acuan dan pengembangan penelitian bagi peneliti selanjutnya sebagai orang –perorang (individu) maupun kelompok lainnya.
2. Bahan telaahan dan penilaian bagi pemikir (akademisi) menyangkut metodologi, sistematika, isi, dan lain sebagainya terkait dengan karya tulis ilmiah.
3. Bahan pengambilan keputusan/kebijakan bagi ekonom dan bankir..dalam kerjasama serta mengembanhgkan produk dan layanan jasa perbankan syariah.
4. Bahan pemetaan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan ekonomi perbankan serta pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perbankan syariah dan makro ekonomi.
5. Identifikasi disiplin ilmu ekonometrika dan ilmu-ilmu terkait, serta dapat mengaplikasikan software olah data statistika, estimasi model regresi, analisis data dan uji statistik secara baik<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup>Wing, Wahyu Winarno, Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews, (Yogyakarta : UPP -STIM YKPN, 2011), h. 1.1.

## **F, Sistematika Pembahasan**

Pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan struktur sebagai berikut : BAB I terdiri dari enam sub bab yaitu : A, B, C, D, E, dan F, yang berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II terdiri dari enam sub bab yaitu : A, B, C, D, E, dan F berisi tentang teori : Pendapatan, Inflasi, Bank Syariah yang didalamnya memuat ; Jumlah Jaringan Kantor dan Bagi Hasil Bank Syariah, Tinjauan Penelitian Terdahulu, Konstruksi Model Penelitian, dan Hipotesis Penelitian. Pada bab ini juga diuraikan analisis melalui, Acuan Rumus maupun Acuan Teori sebagai berikut :

1. Keterkaitan Pendapatan Nasional (PDB) terhadap Funding.
2. Keterkaitan Inflasi terhadap Funding.
3. Keterkaitan Bagi Hasil terhadap Funding.
4. Keterkaitan Jumlah Jaringan Kantor terhadap Funding.

BAB III terdiri dari enam sub bab yaitu : A, B, C, D, E, dan F berisi tentang ; Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Defenisi Operasional, Instrumen Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data. Didalam sub bab F ini memuat Uji Asumsi Dasar/Klasik dan Uji Statistik.

BAB IV terdiri dari empat sub bab yaitu : A, B, C, dan D berisi tentang ; Deskripsi Data, yang memuat tabel masing-masing data penelitian, Analisis Data dan Pengujian Hipotesis, Temuan Penelitian, Diskusi Hasil Penelitian.

BAB V berisi Kesimpulan dan Saran. Sebelum daftar isi diawali dengan Pernyataan, Persetujuan, Abstraks, Kata Pengantar dan diakhiri dengan Daftar Pustaka, dan Daftar Riwayat Hidup.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pendapatan

##### 1. Pengertian

Pendapatan berasal dari kata dasar “dapat”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya)<sup>32</sup>. Pengertian tersebut merupakan definisi pendapatan secara umum. Pada perkembangannya, pengertian pendapatan memiliki penafsiran yang berbeda-beda tergantung dari latar belakang disiplin ilmu yang digunakan untuk menyusun konsep pendapatan bagi pihak-pihak tertentu. Menurut *Mankiw* dari *Harvard University* : “Pendapatan total (total revenue) adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari penjualan produk-produknya”<sup>33</sup>. Di sisi lain beliau juga menyatakan bahwa :”Produk domestik bruto (GDP) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu”<sup>34</sup>. *Suparmoko*, dalam bukunya *Pokok-pokok Ekonomika* menyatakan bahwa ; “Pendapatan Nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diperoleh sebagai hasil dari proses menghasilkan barang dan atau jasa yang meliputi : upah dan gaji, bunga, modal, sewa atas barang-barang modal, termasuk rumah serta keuntungan atau laba”.<sup>35</sup> “Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk

---

<sup>32</sup>Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), h. 209.

<sup>33</sup>Mankiw Gregory, Pengantar Ekonomi Mikro, (Jakarta : Salemba Empat, 2013), hal ; 270

<sup>34</sup> Mankiw Gregory, Makro Ekonomi Edisi Keenam, (Jakarta, Erlangga, 2002), hal ; 19.

<sup>35</sup>M. Suparmoko, Pokok-pokok Ekonomika, (Yogyakarta : BPFE, 2000), hal ; 165



memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu”.<sup>36</sup> Menurut Sadono Sukirno, produk nasional atau pendapatan nasional adalah nilai barang akhir dan jasa akhir yang dihasilkan sesuatu negara dalam suatu tahun tertentu<sup>37</sup>.

## 2. Pendekatan Penghitungan Pendapatan

Pendapatan nasional yang merupakan ukuran terhadap aliran uang dan barang dalam perekonomian dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu : Metode (Pendekatan) Produksi Neto atau Nilai Tambah, Pendekatan Pendapatan, dan Pendekatan Pengeluaran.

### a. Pendekatan produksi (*production approach*)

Pendekatan produksi atau cara produk neto, pendapatan nasional diperoleh dengan *menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa* yang diwujudkan oleh berbagai sektor (lapangan usaha) dalam perekonomian. Misalkan dalam kegiatan produksi perabot rumah tangga dilakukan oleh 4 perusahaan yang berbeda dengan komposisi pengerjaan dan kegiatan sebagai berikut: Perusahaan A khusus menebang kayu menjual produknya kepada perusahaan B sebagai pengergaji kayu seharga RP 100 ribu. Papan yang telah digergaji dijual kepada perusahaan C sebagai pembuat perabot seharga Rp 400 ribu. Pengusaha perabot menjual produknya yang siap pakai ke toko perabot dan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp 1200 ribu. Secara keseluruhan toko perabot menerima Rp 1600 ribu dari penjualan perabot kepada konsumen. Total nilai penjualan jika dihitung sesuai proses adalah : Upah kerja/Modal (M) Rp 1700 ribu + Harga jual (Hj) perabot Rp 1600 ribu = Rp 3300 ribu. Pengeluaran konsumen tetap Rp 1600 ribu. Seharusnya

---

<sup>36</sup>Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga, h. 36.

<sup>37</sup>Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Modern, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2007), h.29.

penjualan tersebut rugi , karena rugi (R) = Modal (M) – Harga jual (Hj) = Rp 1700 ribu - Rp 1600 ribu, rugi Rp 100 ribu, walaupun sebenarnya tidak ada yang dirugikan. Cara menghitung nilai tambah diterangkan melalui tabel 6 berikut ini.

**Tabel 2. 5 Cara Menghitung Nilai Tambah**

Jenis Kegiatan	Nilai Perjualan (RP)	Nilai Tambah(RP)
Mengambil kayu hutan	100	100
Menggergaji papan	400	300
Membuat perabot	1200	800
Menjual perabot di toko	1600	400
Jumlah nilai penjualan dan nilai tambah	3300	1600

Sumber : Rekayasa Peneliti.

Contoh kasus di atas menunjukkan bahwa, terdapat dua alternatif dalam menghitung pendapatan nasional, yaitu cara pengeluaran dan cara produk neto. Secara kasar barang akhir dapat dibedakan kepada dua golongan : barang konsumsi (kursi, pakaian dan sepatu) dan barang modal (mesin, bangunan kantor, dan bus penumpang)<sup>38</sup>. Barang konsumsi pada umumnya adalah barang habis pakai, atau memiliki batas waktu kadaluarsa. Sedangkan barang modal adalah barang yang mengalami regulasi (perputaran). Metode nilai tambah ini dilakukan dengan menghitung dan menaksir nilai tambah. Sadono Sukirno memformulasikan nilai tambah ini sebagai berikut :

$$\text{Nilai tambah} = \text{nilai penjualan} - \text{nilai pembelian} \dots\dots (2,1).$$

#### **b. Pendekatan pendapatan (*income approach*)**

Dalam perhitungan ini pendapatan nasional diperoleh dengan cara *menjumlahkan pendapatan yang diterima* oleh faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian keusahawanan) yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian

<sup>38</sup>Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga, h.59.

yang terdiri dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga, tidak terdapat pemerintah dalam perekonomian itu tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah<sup>39</sup>. Ditinjau dari sisi penerimaan atau pendapatan nasional, persamaannya diformulasikan sebagai :  $Y = C + S$  ..... (2.2), untuk ekonomi tertutup dua sektor.  $Y = C + S + T$  .....(2.3), untuk ekonomi tertutup tiga sector, dan  $Y = C + S + T + M$  .....(2.4), untuk ekonomi terbuka (empat sektor). Tiap negara kini juga berusaha memperbesar cadangan internasionalnya, seusai krisis gunanya bukan cuma untuk menjamin nilai tukar mata uang nasional. Sebelum krisis, adagium yang berlaku adalah ditinjau dari sisi pengeluaran, output nasional sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah belanja pemerintah dan selisih antara ekspor impor.

Sedangkan dari sisi penerimaan , output nasional sama dengan konsumsi plus tabungan nasional plus pajak. Jikalau persamaan  $Y = C + I + G + (X - M)$  dipadukan dengan persamaan  $Y = C + S + T$ , diperoleh persamaan (2-5) :  $(I-S) + (G-T) = (X-M)$ . Persamaan terakhir itulah yang menunjukkan adanya tiga sumber defisit yang harus senantiasa diwaspadai<sup>40</sup>. Sumber defisit dimaksud adalah selisih tabungan dan investasi atau defisit neraca modal  $(I - S)$ . Defisit anggaran pemerintah  $(G - T)$ , dan defisit perdagangan internasional  $(M - X)$ . Ketiga hal tersebut dapat diprediksi, yaitu jika salah satu atau bahkan ketiga defisit itu terjadi, maka defisit harus segera ditutup dengan berbagai cara yang mungkin. Seperti dengan utang, pemotongan anggaran belanja secara besar-besaran, penjualan asset Negara, penerbitan obligasi dan sebagainya. Cara yang paling

<sup>39</sup>Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga, h. 142.

<sup>40</sup>Faisal Basri , Haris Munandar, Lanskap Ekonomi Indonesia, h. 21-22.

lazim ditempuh oleh pemerintah untuk menutup defisit tersebut adalah dengan menarik pinjaman luar negeri, menggalakkan investasi langsung (investasi produktif yang uangnya digunakan untuk membeli bahan baku, membangun pabrik dan sebagainya).

### **c. Pendekatan Pengeluaran (*expenditure approach*)**

Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan hasil pengeluaran/perbelanjaan ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut. *Expenditure approach* atau Analisis pendapatan nasional (Y) ditinjau dari sisi pengeluaran memiliki komponen konsumsi (C), komponen investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan komponen ekspor (X) sebagai independen variabel. Pada perekonomian tertutup dua sektor produk nasional,  $Y = C + I \dots (2.6)$ . Pada perekonomian tertutup tiga sektor,  $Y = C + I + G \dots (2.7)$ . Pada perekonomian terbuka (empat sektor),  $Y = C + I + G + X \dots (2.8)$ .

Pengeluaran pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran yang dilakukan oleh empat golongan, penggunaan barang dan jasa rumah tangga, pemerintah, perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi, dan penduduk negara lain yang membeli produksi dalam Negara. Yang dijumlahkan hanyalah nilai pengeluaran ke atas barang jadi dan bertujuan untuk menghindari perhitungan dua kali. Nilai jual beli (transaksi) barang antara (misalnya pembelian bahan mentah oleh perusahaan-perusahaan) tidak dimasukkan dalam perhitungan<sup>41</sup>. Konsep arus produk dan arus pendapatan dapat dikatakan mempunyai pengertian identik hanya saja posisinya yang berbeda. Produk di satu sisi mengeluarkan

---

<sup>41</sup>Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga, h. 57.

biaya (expenditure), tetapi di sisi lain memberikan hasil (income) atau penerimaan (revenue), berarti hanya beda posisi yaitu arus masuk atau arus keluar.

Produk Domestik Bruto (PDB) dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan suatu perekonomian, yaitu dengan memperhatikan peningkatan jumlah produk barang dan jasa. Perhitungan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan data PDB biasanya memakai data runtut (*time series*) triwulanan dan tahunan. Konsep pertumbuhan ekonomi ( $G_t$ ) dalam satu periode, yaitu<sup>42</sup> :

$$G_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots (2.10)$$

### 3. Beberapa Kaidah Menghitung GDP

Para ahli ekonomi membedakan antara dua jenis variabel jumlah persediaan (*stocks*) dan aliran (*flows*). Nilai produk nasional selalu dihitung berdasarkan nilai uang dari barang dan jasa yang dihasilkan<sup>43</sup>. Sstock adalah jumlah yang diukur pada titik waktu tertentu, sedangkan aliran (flow) seperti Jumlah air yang keluar dari kran jumlahnya diukur perunit waktu. GDP riil mengukur nilai output atau pendapatan nasional pada periode tertentu menurut harga yang ditentukan (harga pada tahun dasar atau dikenal dengan istilah harga konstan / *constant price*)<sup>44</sup>. Untuk memudahkan penghitungan GDP nominal dan GDP riil, pentabel harga bahan makanan beras dan daging sebagaimana contoh berikut .

**Tabel 2.6 : Harga Beras dan Daging**

Tahun	Harga Beras (Rp)	Kuantitas Beras (Kg)	Harga Daging (Rp)	Kuantitas Daging (Kg)
2013	Rp 9.000	360	Rp 85.000	48
2014	Rp 9.500	540	Rp 90.000	96
2015	Rp 10.000	1080	Rp 95.000	144

Sumber : Rekayasa Peneliti

<sup>42</sup>Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Modern, h. 56.

<sup>43</sup>Asfia Murni, Ekonomika Makro, h. 36.

<sup>44</sup>Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis, h. 26.

$$\text{GDP nominal tahun 2013} = (9.000 \times 360) + (85.000 \times 48) = 7.320.000,-$$

$$\text{GDP nominal tahun 2014} = (9.500 \times 540) + (90.000 \times 96) = 13.770.000,-$$

$$\text{GDP nominal tahun 2015} = (10.000 \times 1080) + (95.000 \times 144) = 24.480.000,$$

Dengan measumsi tahun dasar 2013 diperoleh nilai GDP riil sebagai berikut :

$$\text{GDP riil tahun 2013} = (9.000 \times 360) + (85.000 \times 48) = 7.320.000,-$$

$$\text{GDP riil tahun 2014} = (9.000 \times 540) + (85.000 \times 96) = 8.646.000,-$$

$$\text{GDP riil tahun 2015} = (9.000 \times 1080) + (85.000 \times 144) = 21.960.000,-$$

Dari hasil perhitungan terlihat bahwa nilai GDP nominal tahun 2014 dan 2015 jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai GDP riil pada tahun yang sama. GDP nominal mengukur nilai output atau pendapatan nasional dalam suatu periode tertentu menurut harga pasar yang berlaku pada periode tersebut atau dikenal dengan istilah *current price*<sup>45</sup>. Ternyata ukuran ini tidak secara akurat mencerminkan ukuran kemakmuran ekonomi. Ukuran kemakmuran ekonomi yang lebih baik menghitung output barang dan jasa perekonomian dan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga adalah menggunakan GDP riil (*real GDP*), yaitu nilai barang dan jasa diukur dengan menggunakan harga dasar konstan atau harga dasar patokan pada tahun tertentu/tahun dasar (*current price*). Pada metode produksi ini pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang diciptakan oleh tiap-tiap sektor ekonomi selama periode tertentu (biasanya 1 tahun) Hal yang dijumlahkan adalah nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh tiap sektor yang ada dalam perekonomian<sup>46</sup>. Dalam prinsip penghitungan pendapatan nasional, yang dihitung adalah nilai barang-barang yang dihasilkan oleh kegiatan-

---

<sup>45</sup>Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis, h. 26.

<sup>46</sup>Asfia Murni, Ekonomika Makro, h. 42-43.

kegiatan yang produktif dan barang-barang tersebut adalah diproduksi untuk keperluan pasar (dijual). Dengan demikian memasak di rumah, mencuci mobil sendiri, membuat baju sendiri dan memelihara ayam di rumah, tidak akan dihitung dalam pendapatan nasional oleh karena walaupun mereka diwujudkan oleh kegiatan yang produktif, tetapi tidak dipasarkan<sup>47</sup>. Dari GDP nominal dan GDP riil kita dapat menghitung GDP deflator, yang juga disebut dengan deflator harga implisit untuk GDP, didefinisikan sebagai rasio GDP nominal terhadap GDP riil. Dari contoh perhitungan di atas diperoleh bahwa,  $GDP_{\text{nominal}}$  2014 sebesar Rp 13.770.000,- dan GDP riil 2014 sebesar Rp 8.646.000,- sehingga dapat dihitung :

$$GDP \text{ deflator tahun } 2014 = \frac{GDP \text{ nominal } 2014}{GDP \text{ riil } 2014} = \frac{13.770.000}{8.646.000} = 1,5926 = 160 \%$$

$$GDP \text{ delator tahun } 2015 = \frac{GDP \text{ nominal } 2015}{GDP \text{ riil } 2015} = \frac{24.480.000}{21.960.000} = 1,1147 = 111 \%$$

GDP deflator yang merupakan salah satu dari bentuk indeks harga, juga merupakan angka penyesuaian nilai GDP harga-harga tahun dasar. Sehingga dengan menggunakan GDP deflator (mengukur tingkat inflasi) dapat menghilangkan pengaruh laju inflasi dalam perhitungan GDP.

Indeks harga adalah rata-rata tertimbang dari harga-harga produk berdasarkan uang yang berlaku di pasar. Indeks harga dapat juga diartikan sebagai ukuran tingkat harga rata-rata barang dan Jasa. Ada tiga macam indeks harga yaitu, indeks harga konsumen (*consumer price indeks*), indeks harga produsen (*producer price indeks*) dan GDP deflator (Deflator GDP) (Samuelson : 2001)<sup>48</sup>.

Data produk nasional dapat pula digunakan untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan tingkat kemakmuran masyarakat dan perkembangannya, perhatikan contoh berikut. Misalkan di suatu negara dalam

<sup>47</sup>Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga, h. 53.

<sup>48</sup>Asfia Murni, Ekonomika Makro, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2006), h.39-40.

tahun 2002. Produk Nasional Bruto riil bernilai 120 triliun rupiah dan meningkat menjadi 126 triliun rupiah pada tahun 2003. Berdasarkan data tersebut tingkat pertumbuhannya (TP) adalah :

$$TP = \frac{126 \text{ triliun} - 120 \text{ triliun}}{120 \text{ triliun}} \times 100 = 5\%^{49}.$$

Analisis pendapatan nasional pada perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah membagi aktivitas perekonomian ke dalam 3 pelaku utama, yaitu rumah tangga (*household*), perusahaan (*firm*), dan pemerintah (*government*)<sup>50</sup>. Dari persamaan (2.3),  $Y = C + S + T$  akan berkembang menjadi :  $Y = C + S + T - T_p$ , jika pemerintah memberikan subsidi atau tunjangan lainnya/*transfer payment* ( $T_p$ ) kepada sektor rumah tangga. Dari tabel penghitungan GDP deflator dapat dihitung laju perkembangan (LP) GDP nominal dan GDP riil tahun 2013 menggunakan rumus sebagai berikut :

$$LP \text{ GDP}_{\text{nominal}} = \frac{GDP_t^n - GDP_{t-1}^n}{GDP_{t-1}^n} \times 100\% = \frac{300.000 - 200.000}{200.000} \times 100\% = 50\% \text{ dan}$$

$$LP \text{ GDP}_{\text{riil}} = \frac{GDP_t^r - GDP_{t-1}^r}{GDP_{t-1}^r} \times 100\% = \frac{240.000 - 200.000}{200.000} \times 100\% = 20\%, \text{ kenaikan secara riil}^{51}.$$

Besaran nilai GDP riil ditetapkan berdasar harga tahun dasar, sehingga nilai GDP riil relatif stabil / normal dibandingkan dengan nilai GDP nominal. Sedangkan besaran nilai GDP nominal terkait erat dengan kenaikan harga-harga barang dan jasa (sektor riil). Apabila harga barang dan jasa mengalami kenaikan, maka nilai GDP nominal juga akan naik. Itu sebabnya GDP riil lebih sesuai dipakai sebagai alat pengukur besaran nilai GDP daripada GDP nominal.

<sup>49</sup>Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga, h. 17.

<sup>50</sup>Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis, h. 53.

<sup>51</sup>Asfia Murni, Ekonomika Makro, h. 38-39.



**Tabel 2.7 : Penghitungan GDP<sub>deflator</sub>, GDP<sub>nominal</sub> dan GDP<sub>riil</sub>**

TAHUN	VOLUM (TON)	HARGA BERAS	GNP DEFLATOR (INDEKS HARGA)	GNP NOMINAL	GNP RIIL
2012	1000	\$ 200	$(200 : 200) \times 100 = 100$	200.000	200.000
2013	1200	\$ 250	$(300 : 240) \times 100 = 125$	300.000	240.000
2014	1600	\$ 275	$(440 : 320) \times 100 = 138$	440.000	320.000

perhPertambahan Jumlah Perusahaan IKNB Syariah						
keterangan	posisi awal tahun (2013)		posisi akhir tahun (2013)		pertumbuhan	
	Jumlah Perusahaan	Jumlah Aset (milyar Rp)	Jumlah Perusahaan	Jumlah Aset (milyar Rp)	Jumlah Perusahaan	Aset (%)
Perusahaan Asuransi	45	13.239	49	16.661	4	25,85%
- Asuransi Jiwa	20	10.016	20	12.792	0	27,72%
-Asuransi Umum dan Kerugian	22	2.631	26	3.131	4	19,00%
Reasuransi	3	592	3	738	0	24,66%
Perusahaan Pembiayaan	35	22.664	44	24.639	9	8,71%
Perusahaan Penjaminan	2	100	2	103	0	3,00%
Perusahaan Modal Ventura	4	218	4	311	0	42,66%
<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>36.221</b>	<b>99</b>	<b>41.714</b>	<b>13</b>	<b>15,17%</b>

Sumber : Statistik OJK<sup>52</sup>

Kenaikan 20% perhitungan GDP riil diatas berdasarkan hanya kenaikan volume produksi. Untuk mendapatkan gambaran lainnya tentang penghitungan ekonomi Indonesia terkait GDPriil, GDP nominal dan GDP deflator dapat dilihat pada tabel diatas (GNP dianggap sama dengan GDP), pertambahan jumlah perusahaan IKNB (Industri Keuangan Non Bank) yang dikeluarkan oleh statistik OJK pada tahun 2013. Meski perbandingan keuangan bank dan non bank masih jomplang IKNB tetap menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Dalam satu semester terjadi kenaikan yang signifikan yaitu dari Rp 36,221 triliun pada akhir 2012 menjadi 41,714 triliun pada akhir 2013 atau naik 15,17 persen<sup>53</sup>.

<sup>52</sup>Anif, Punto Utomo, Dua Dekade Ekonomi Syariah Menuju Kiblat Ekonomi Islam, h.114.

<sup>53</sup>Anif, Punto Utomo, Dua Dekade Ekonomi Syariah Menuju Kiblat Ekonomi Islam, h.113-114.

#### 4. Keseimbangan Ekonomi

Syarat yang perlu dan cukup dalam suatu perekonomian agar keseimbangan pendapatan nasional tercapai adalah apabila penawaran agregat / *aggregate supply* (AS) sama dengan pengeluaran agregat / *aggregate demand* (AD). Dalam perekonomian tanpa perdagangan luar negeri (perekonomian tertutup) maupun perdagangan yang melibatkan komponen ekspor dan impor (perekonomian terbuka), diperoleh penerimaan sebagai penawaran agregat sebagai berikut :  $Y = C + S$  ..... (2.11), untuk ekonomi tertutup dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari swktor perusahaan dan sector rumah tangga. Dalam perekonomian dua sector sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga dan keuntungan adalah sama nilainya dengan pendapatan nasional. Dan oleh karena pemerintah tidak memungut pajak, maka pendapatan nasional (Y) adalah sama dengan pendapatan disposebel ( $Y_d$ ) atau  $Y = Y_d$ <sup>54</sup>.

$Y = C + S + T$  .... (2.12), untuk ekonomi tertutup tiga sektor.  $Y = C + S + T + M = GNI$  ... (2.13), untuk ekonomi terbuka (empat sektor). Disisi lain terjadi pengeluaran agregat sebagai berikut : Pada perekonomian tertutup dua sektor produk nasional,  $Y = C + I$  .... (2.14) . Pada perekonomian tertutup tiga sektor,  $Y = C + I + G$  .... (2.15). Pada perekonomian terbuka (empat sektor),  $Y = C + I + G + X = GNP$  ..... (2.16). Dari persamaan (11,12, dan 13) komponen penerimaan/penawaran pendapatan nasional adalah konsumsi (C), tabungan/*saving* (S), pajak/*tax* (T) dan komponen impor (M), komponen S, T dan M merupakan

---

<sup>54</sup>Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga, h. 142.

variabel yang memperkecil arus atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Dari sisi pengeluaran produk nasional (persamaan 4-6) dengan komponen konsumsi (C), investasi (I), belanja pemerintah (G) dan ekspor (X), komponen I, G dan X merupakan variabel yang memperbesar arus atau menambah jumlah uang yang beredar. Sehingga keseimbangan perekonomian dua sektor tercapai jika memenuhi syarat :  $I = S$  .....(2.17). Keseimbangan perekonomian tiga sektor tercapai jika:  $I + G = S + T$  .....(2.18). Keseimbangan atau *equilibrium* perekonomian empat sektor / perekonomian terbuka tercapai jika memenuhi nsyarat :  $S + T + M = I + G + X$  ... (2.19).

Konsep kecondongan mengkonsumsi perlu dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu MPC ( *Marginal Propensity to Consume*) dan APC ( *Average Propensity to Consume*)<sup>55</sup>. Konsep yang berkaitan dengan fungsi tabungan atau saving, yaitu APS ( *Average Propensity to Save*) dan MPS ( *Marginal Propensity to Save*)<sup>56</sup>. APC adalah hasrat rata – rata untuk mengonsumsi sebagian dari pendapatan. MPC adalah pertambahan keinginan untuk konsumsi masyarakat karena terjadinya pertambahan pendapatan. APS adalah hasrat rata – rata untuk menabung sebagian dari pendapatan. Adapun MPS adalah perbandingan antara pertambahan keinginan menabung dan pendapatan. Konsep APC berbanding lurus dengan konsumsi dan berbanding terbalik dengan pendapatan. MPC berbanding lurus dengan perubahan konsumsi dan berbanding terbalik dengan perubahan pendapatan. APS berbanding lurus dengan tabungan (*saving/S*) dan berbanding

---

<sup>55</sup>Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga, h. 109.

<sup>56</sup> Asfia Murni, Ekonomika Makro, h. 53

terbalik dengan perubahan pendapatan, secara matematis, APC, MPC, APS, dan MPS diformulakan sebagai berikut<sup>57</sup> :

$$1. \quad \text{APC} = \frac{C}{Y} \dots\dots (2.20)$$

$$3. \quad \text{APS} = \frac{S}{Y} \dots\dots\dots (2.22)$$

$$2. \quad \text{MPC} = \frac{\Delta C}{\Delta Y} \dots\dots (2.21)$$

$$4. \quad \text{MPS} = \frac{\Delta S}{\Delta Y} \dots\dots\dots (2.23)$$

Bila dijumlahkan antara APC dengan APS (APC+APS), maupun antara MPC dengan MPS (MPC+MPS) dapat dibuktikan, nilainya selalu sama dengan satu. Pembuktian<sup>58</sup> :  $Y = C + S \rightarrow \frac{Y}{Y} = \frac{C}{Y} + \frac{S}{Y} \rightarrow \text{APC} + \text{APS} = 1$   $Y = C + S \rightarrow \frac{\Delta Y}{\Delta Y} = \frac{\Delta C}{\Delta Y} + \frac{\Delta S}{\Delta Y} \rightarrow \text{MPC} + \text{MPS} = 1$ . Pembuktian diatas bermakna bahwa APC atau APS, MPC atau MPS mempunyai nilai kecil atau kurang dari satu (1). Meskipun demikian APC dapat bernilai 1 bila APS = 0. MPC juga dapat bernilai satu (1) bila MPS = 0 demikian juga berlaku sebaliknya. Dalam perekonomian dua sektor dan perekonomian tiga sektor yang sistem pajaknya adalah pajak tetap.  $\Delta Y = \Delta Y_d$ , maka  $\text{MPC} = \text{MPC}_y$ . Tetapi dalam ekonomi tiga sektor dimana  $\Delta Y$  lebih besar dari  $\Delta Y_d$ , maka MPC lebih besar dari  $\text{MPC}_y$ . apabila persentase pajak diketahui dan nilai MPC juga diketahui,  $\text{MPC}_y$  dapat dengan mudah dihitung.

## 5. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tidak dapat terlepas dari keberadaan teori yang melandasinya. *Adam Smith* sebagai tokoh pemikir ekonomi klasik dengan konsep *invisible hand* memberikan teori tentang sistem pasar bebas akan mewujudkan tingkat kegiatan ekonomi yang efisien dalam jangka panjang. Penggunaan tenaga kerja penuh (kesempatan kerja penuh) akan selalu tercapai dan perekonomian akan

<sup>57</sup>Asfia Murni, Ekonomika Makro, h. 53.

<sup>58</sup>Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga, h. 114-115.

mengalami pertumbuhan yang teguh<sup>59</sup>. Penganut mazhab klasik lain Keynes berpendapat pengeluaran agregat, yaitu perbelanjaan masyarakat atas barang dan jasa, adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai oleh sesuatu negara<sup>60</sup>. Dalam sistem pasar bebas penggunaan tenaga kerja penuh tidak selalu tercipta, diperlukan usaha dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Pendapat Keynes didukung oleh banyak ekonom lain diantaranya, Roy Harrod, Evsey Domar, Paul Samuelson, James Tobin, dan Franco Modigliani. Adapun pengkritik Keynesian antara lain Milton Friedman, dan Robert Lucas. Milton Friedman maupun Robert Lucas sangat mendukung pandangan konsep pasar bebas dalam mengatur kegiatan ekonomi. Muncul berikutnya Keynesian baru yaitu, Gregory Mankiw, Lawrence Summers, Olivier Blanchard, Paul Krugman, Rudiger Dornbusch, Stanley Fiscer, dan David Rowner.

Pada intinya ekonomi konvensional memandang bahwa kesejahteraan (*welfare*) dapat diukur dengan GDP riil, dimana pada saat GDP riil meningkat diasumsikan bahwa masyarakat secara materi sejahtera. Namun pandangan ini mendapat kritikan, para pengkritik mengatakan bahwa GDP perkapita merupakan ukuran kesejahteraan yang tidak sempurna, jika nilai output (GDP) turun sebagai akibat orang-orang mengurangi jam kerja atau menambah waktu leisure / istirahatnya hal itu bukan menggambarkan keadaan orang itu menjadi lebih buruk<sup>61</sup>. Hal yang membedakan system ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter *falah*. *Falah* adalah kesejahteraan yang hakiki,

---

<sup>59</sup> Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga, h. 6.

<sup>60</sup> Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga, h. 7.

<sup>61</sup> Nurul Huda dan Kawan-kawan, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis, h. 27.

kesejahteraan yang sebenar-benarnya, dimana komponen-komponen rohaniah masuk kedalam pengertian *falah* ini. Ekonomi Islam dalam arti sebuah sistem ekonomi (*nidham al-iqtishad*) merupakan sebuah sistem yang dapat mengatur manusia kepada *real welfare (falah)*, kesejahteraan yang sebenarnya. Al-falah dalam pengertian Islam mengacu pada konsep Islam tentang manusia itu sendiri yaitu memenuhi kebutuhan rohani manusia<sup>62</sup>. Zakat infaq sodaqoh (ZIS) dalam pandangan Islam tidak semata untuk tujuan duniawi, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat. Jika ditinjau dengan pendekatan pendapatan, maka diperoleh persamaan :  $Y = C + S + Z + T$ , dimana  $Z = \text{zakat}$ <sup>63</sup>.

Dalam penghitungan pendapatan lazim menggunakan cara aljabar, tabular (table berangka), dan cara grafis. Analisis mengenai keseimbangan pendapatan nasional yang dimaksud dengan pengeluaran pemerintah adalah keseluruhan pengeluaran yang dilakukannya, yang meliputi konsumsi, dan investasi. Faktor-faktor yang menentukan pengeluaran pemerintah adalah pendapatan dari pajak dan pendapatan pemerintah lain, keadaan ekonomi masa kini dan masalah ekonomi yang dihadapi, pertimbangan-pertimbangan politik dan kestabilan keadaan ekonomi. Pengeluaran pemerintah digolongkan sebagai pengeluaran otonomi oleh oleh karena jumlahnya tidak berkaitan langsung dengan pendapatan nasional. Pajak akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga<sup>64</sup>. Zakat, infak, sodaqoh (ZIS) secara kasap mata adalah merupakan investasi yang merugikan. Karena sifatnya secara nyata mengurangi pendapatan yang dimiliki.

---

<sup>62</sup> Nurul Huda dan Kawan-kawan, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, h. 28.

<sup>63</sup> Nurul Huda, dan Kawan-kawan, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, h. 64-65.

<sup>64</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga*, h. 192.

Tetapi bila kita analisa secara seksama rumus pendapatan  $Y = C + S + Z + T$ , dimana  $Z = \text{zakat}$ <sup>65</sup> dan pendapatan naik sementara faktor pendapatan lainnya konstan (*ceteris paribus*), ini berarti nilai pembayaran zakat naik. Dengan kata lain menunaikan zakat, infak, sodaqoh secara hakiki tidak mengurangi pendapatan, bahkan menyebabkan terjadinya distribusi dan sirkulasi uang secara lancar dan produktif. Uang diartikan sebagai *public goods* bukan sebagai private goods, apalagi dalam arti bolak balik, yaitu uang sebagai *public goods* sekaligus sebagai private goods. Kesadaran umat menunaikan ZIS pada hakikatnya menaikkan pendapatan itu sendiri. Menurut Metwally, meningkatnya pendapatan akan meningkatkan permintaan atas uang oleh masyarakat, dengan rumus<sup>66</sup> :  $M_d = f\left(\frac{Y}{\mu}\right)$ ,  $M_d$  = permintaan uang dalam masyarakat,  $Y$  = pendapatan,  $\mu$  = tingkat biaya karena menyimpan uang.

## 6. Keterkaitan PDB Terhadap Funding

Untuk melihat keterkaitan atau ada/tidaknya pengaruh PDB yang mencerminkan pendapatan nasional terhadap *Funding* sebagai penghimpunan dana masyarakat yang diwakili dana pihak ketiga yang merupakan *reflesi* (cerminan) dari *Funding*, ada dua acuan yang dapat dipergunakan yaitu :

### a. Acuan Rumus

Mengacu kepada rumus-rumus tentang pendapatan nasional terkait Produk Domestik Bruto (PDB) yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan suatu perekonomian, yaitu dengan memperhatikan peningkatan jumlah produk barang dan jasa. maka dapat kita analisa rumus-rumus :  $Y = C + S \dots\dots (2.1)$  untuk

<sup>65</sup> Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis, h. 64-65.

<sup>66</sup> M. Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah, h. 66.

ekonomi tertutup dua sektor,  $Y = C + S + T \dots (2.3)$  untuk ekonomi tertutup tiga sektor, dan  $Y = C + S + T + M \dots (2.4)$ , untuk ekonomi terbuka (empat sektor) serta  $APS = \frac{s}{Y} \dots (2.22)$  hasrat rata – rata untuk menabung (*Average Propensity to Save*) dan  $MPS = \frac{\Delta S}{\Delta Y} \dots (2.23)$  pertambahan keinginan menabung (*Marginal Propensity to Save*). Secara komutatif rumus-rumus tersebut dapat ditulis menjadi:

- 1).  $S = Y - C \dots (2.1)$ , dalam hal ini jika konsumsi masyarakat (C) dianggap tetap (*ceteris paribus*) dan pendapatan nasional (Y) naik, maka tabungan/saving (S) juga naik
- 2).  $S = Y - (C + T) \dots (2.3)$ , dalam hal ini jika konsumsi masyarakat (C) dan pajak/taks (T) dianggap tetap (*ceteris paribus*) dan pendapatan nasional (Y) naik, maka tabungan/saving (S) juga naik.
- 3).  $S = Y - (C + T + M) \dots (2.4)$ , dalam hal ini jika konsumsi masyarakat (C) dan pajak/taks (T) serta impor (M) dianggap tetap (*ceteris paribus*) dan pendapatan nasional (Y) naik, maka tabungan/saving (S) juga naik.
- 4).  $S = APS \cdot Y$ , dalam hal ini jika pendapatan nasional naik, maka tabungan/saving (S) juga naik beberapa kali lipat karena berbanding lurus dengan multiplier hasrat rata – rata untuk menabung. Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Modern
- 5).  $\Delta S = MPS \cdot \Delta Y$ , dalam hal ini jika pendapatan nasional naik, maka tabungan (S) juga naik beberapa kali lipat, karena berbanding lurus dengan multiplier pertambahan keinginan menabung.

Sebagaimana kita ketahui dan pahami bahwa salah satu komponen dari funding itu adalah tabungan/saving (S), artinya jika tabungan naik maka funding



juga naik. Karena pendapatan nasional (PDB) berbanding lurus dengan tabungannya, berarti melalui rumus terbukti pula bahwa Pendapatan Nasional (PDB) berbanding lurus dengan *Funding*.

#### **b. Acuan Teoritis**

Mengacu kepada acuan teoritis dalam hal ini pendapat ahli, penulis ajukan pendapat para ahli ekonomi pemikiran klasik yang dipelopori oleh Adam Smith, Keynes, dan ekonom lainnya baik yang mengkritik maupun pendukung pendapat keduanya, pandangan Kesejahteraan Ekonomi Konvensional dan Falaah menurut sistem ekonomi Islam.

- 1). Pemikir ekonomi klasik menganggap bahwa, suku bunga riil tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter karena suku bunga dipengaruhi oleh investasi riil dan tabungan riil<sup>67</sup>.
- 2). Fleksibilitas di pasar finansial akan menyebabkan kesempatan kerja penuh (*full employment*), jumlah tabungan sama dengan jumlah investasi. Sehingga dapat menciptakan *aggregate demand* sama dengan *aggregate supply* ( $AD = AS$ )<sup>68</sup>.
- 3). Untuk mencapai kesempatan kerja penuh diperlukan usaha dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang teguh<sup>69</sup>.
- 4). Menurut Nasution dan kawan-kawan ada empat hal yang dapat diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam, yaitu<sup>70</sup>:
  - a). Pendapatan Nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga

---

<sup>67</sup> Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Modern, h. 93.

<sup>68</sup> Asfia Murni, Ekonomika Makro, h. 4.

<sup>69</sup> Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga, h. 7.

<sup>70</sup> Nurul Huda dan Kawan-kawan, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis, h. 29.

- b). Pendapatan Nasional harus dapat mengukur produksi di sector pedesaan.
  - c). Pendapatan Nasional harus dapat mengukur Kesejahteraan Ekonomi Islami.
  - d). Penghitungan Pendapatan Nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan social Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah.
- 5). Modigliani menekankan bahwa tingkat pendapatan bervariasi secara sistematis selama kehidupan seseorang dan tabungan dapat menggerakkan pendapatan dari masa hidupnya<sup>71</sup>.
- 6). Metwally dalam hipotesisnya menyatakan, Naiknya pendapatan akan menaikkan konsumsi, tetapi peningkatan konsumsi lebih kecil dari peningkatan pendapatan<sup>72</sup>.

Fakta yang dikemukakan para ahli ekonomi di atas walaupun berbeda-beda dalam mengaplikasikan konsepnya, akan tetapi pada garis besarnya pendapatan yang dibicarakan selalu berpengaruh positif terhadap tabungan, konsumsi, kesempatan kerja penuh, serta investasi. Secara khusus pendapat para ahli ekonomi tersebut menyatakan bahwa, pendapatan nasional (PDB) berpengaruh positif terhadap *Funding Bank Syariah*.

## **B. I N F L A S I**

### **1. Pengertian**

Defenisi inflasi menurut para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit penghitungan moneter) terhadap barang-barang/komoditas dan jasa. Sebaliknya, jika yang terjadi

---

<sup>71</sup>Nurul Huda dan Kawan-kawan, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, h. 38.

<sup>72</sup>Nurul Huda dan Kawan-kawan, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, h. 42.

adalah penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi (*deflation*)<sup>73</sup>.

A.P. Lehner menyatakan, inflasi adalah keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan.<sup>74</sup> Menurut Boediono, inflasi adalah kecendrungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat dikatakan sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari barang-barang lain.<sup>75</sup> N. Gregory Mankiw menyatakan bahwa : “Seluruh kenaikan dalam harga barang-barang dan jasa disebut inflasi (*inflation*).<sup>76</sup> Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus atau proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu.

Dengan demikian inflasi berarti proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Hal ini berarti pula bahwa tingkat harga yang dianggap tinggi/naik, belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh mempengaruhi. Inflasi merupakan gejala ekonomi yang memiliki daya tarik tersendiri untuk diprediksi dan dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap makro agregat : distribusi pendapatan, daya saing, pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, dan tingkat bunga. Study tentang

---

<sup>73</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta : PT. RajaGrafind Persada,2006), h.135.

<sup>57</sup>Gunawan Anton H, *Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 54.

<sup>75</sup>Boediono, “Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5 : *Ekonomi Moneter*”, (Yogyakarta : BPFE UGM, 1995), h. 32.

<sup>76</sup>Mankiw Gregory, *Makro Ekonomi Edisi Keenam*, (Jakarta, Erlangga, 2006), h.75.

penyebab inflasi di Indonesia telah banyak dilakukan , antara lain oleh Booman (1975), Djiwandono (1980), Nasution (1983), Ahmad (1985), Ikhsan (1991), Namun pada umumnya dari studi di atas menunjukkan bahwa penyebab inflasi di Indonesia ada dua macam, yaitu inflasi yang diimpor dan defisit dalam anggaran pemerintah belanja Negara (APBN)<sup>77</sup>. Sinyal adanya penargetan besaran moneter dan inflasi oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, diharapkan dapat mengarahkan ekspektasi masyarakat terhadap laju inflasi yang akan terjadi serta mengurangi tekanan inflasi. Penargetan inflasi dilakukan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen bank sentral untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang dari kebijakan moneter. Dengan menargetkan inflasi sebagai jangka nominal, bank sentral dapat menjadi lebih *credible* dan lebih fokus didalam mencapai kestabilan harga sebagai tujuan akhir. Kendatipun penargetan dilakukan pada inflasi, strategi ini tidak mengabaikan pencapaian tujuan kebijakan moneter lainnya seperti perkembangan output dan kesempatan kerja<sup>78</sup>.

Berdasarkan prosesnya inflasi dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu : Inflasi merayap (*creeping inflation*), atau inflasi ringan dengan prediksi tingkat inflasinya dibawah sepuluh persen pertahun (< 10%). Inflasi sederhana atau inflasi sedang (*moderate inflation*), prediksi tingkat inflasinya 10%-30% pertahun, dan harga-harga meningkat secara lambat. Inflasi ganas (*galloping inflation*), atau inflasi berat tingkat/laju inflasinya diprediksi antara 30 % - 100 % pertahun, sehingga dapat menimbulkan gangguan serius bagi perekonomian.

---

<sup>77</sup>Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis, h. 176.

<sup>78</sup>Veithzal Rivai, Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System, h. 88 .

Inflasi hiper (*hyper inflation*) adalah inflasi yang tingkatannya sangat tinggi (di atas 100% pertahun), yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua kali lipat atau lebih dalam waktu satu tahun dan berakibat kepada kegiatan perekonomian masyarakat mati (*stagnan*). Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya, kenaikan harga-harga yang tingkatannya tidak melebihi dua atau tiga persen setahun. Hiper inflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat, yang menyebabkan harga-harga menjadi dua atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Di Indoneia sebagai contoh , pada tahun 1965 tingkat inflasi adalah 500 persen dan pada tahun 1969 ia telah mencapai 650 persen. Di negara-negaraberkembang adakalanya tingkat inflasi tidak mudah dikendalikan<sup>79</sup>.

## **2. Macam-macam Teori Inflasi**

### **a. Teori Klasik**

Teori inflasi klasik digagas para ahli ekonomi yang hidup antara masanya *Adam Smith* (1776) dan *Keynes* (1036). Mereka sangat menekankan sistem pasar bebas sebagaimana konsep *invisible hands* yang terdapat dalam buku *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation* karya *Adam Smith*. Ekonom klasik berkeyakinan sistem pasar bebas akan dapat menciptakan efisiensi yang maksimal dalam setiap kegiatan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang teguh berlangsung dalam jangka panjang. Teori klasik juga mengemukakan keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk. *Malthus* dan *Ricardo* mengamati pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. *Malthus* sangat pesimis dalam menghadapi kondisi perekonomian

---

<sup>79</sup>Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga, h. 337.

masa depan, karena dia belum memperhitungkan adanya peranan perkembangan teknologi, yang dapat menaikkan tingkat produksi masyarakat<sup>80</sup>.

### **b. Teori Keynesian**

*Keynes* mengkritik pendapat ahli-ahli ekonomi klasik, tentang tingkat kesempatan kerja penuh. Menurutnya tingkat kegiatan dalam perekonomian ditentukan oleh perbelanjaan agregat, sebab investasi yang dilakukan para pengusaha biasanya lebih rendah dari tabungan yang akan dilakukan dalam perekonomian pada tingkat kesempatan kerja penuh. Kebijakan moneter maupun fiskal harus digunakan untuk mengatasi pengangguran dan menurunkan laju inflasi. Suku bunga tidak akan mewujudkan keadaan dimana investasi adalah sama dengan tabungan yang akan diwujudkan pada kesempatan kerja penuh. Menurut *Keynes* tingkat upah adalah rigid (tidak mudah berubah), terutama ia sukar untuk diturunkan ke bawah. Perekonomian pasar sepertinya sulit untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan masyarakat dan bahkan sering menimbulkan *instability*, *inequity*, dan *inefisiensi*. Oleh karenanya kelebihan penawaran tenaga kerja akan terus berlaku dan sistem pasar bebas tidak akan dapat mengatasi masalah pengangguran yang terjadi. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam menentukan kebijakan *fiskal* maupun *moneter*. Teori pertumbuhan ekonomi modern pendukung *Keynesian* antara lain *Rostow*, *Schumpeter*, *Harrod-Domar*, dan *Martin Feldstein*. *Harrod –Domar* tetap mementingkan peranan pemerintah dalam merencanakan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan dalam menghimpun dana untuk keperluan investasi agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat<sup>81</sup>.

---

<sup>80</sup> Asfia Murni, *Ekonomika Makro*, h. 182.

<sup>81</sup> Asfia Murni, *Ekonomika Makro*, h. 185.

Peranan pemerintah mestinya didukung oleh *steak holder* dan *intreppreneur* (wiraswasta) yang unggul.

### c. Teori Moneterisme

Teori inflasi moneterisme dikembangkan oleh *Milton Friedman*, pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 1976. Golongan ini berpendapat, mekanisme pasar bebas akan mampu untuk selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Friedman berpendapat, kebijakan fiskal akan menimbulkan *crowding-out*, yaitu ia akan menyedot dana dari masyarakat dan mengurangi kegairahan pihak swasta melakukan investasi karena suku bunga yang meningkat. *Milton Friedman* mengatakan inflasi ada di mana saja dan merupakan frnomena moneter yang berlebihan dan tidak stabil. Apabila terjadi kenaikan harga satu barang yang tidak mempengaruhi harga barang lain, sehingga harga tidak naik secara umum, kejadian seperti itu bukanlah inflasi. Kecuali bila yang naik itu seperti harga BBM, ini berpengaruh terhadap harga-harga lain sehingga secara umum semua produk hampir mengalami kenaikan harga<sup>82</sup>.

Para ahli ekonomi moneterisme berpendapat bahwa kenaikan penawaran uang akan meningkatkan harga pada tingkat yang sama dengan penawaran uang. Apabila terdapat pengangguran dalam faktor-faktor produksi, kenaikan penawaran uang akan menimbulkan pertambahan produksi nasional yang besarnya seimbang (*proporsional*) dengan pertambahan penawaran uang. Dalam menjalankan kebijakan moneter, pemerintah perlu melakukan kebijakan *monetary rule*, yaitu menambah penawaran uang pada suatu tingkat (persentase) tertentu yang sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

---

<sup>82</sup>Asfia Murni, *Ekonomika Makro*, h. 202-203.

#### **d. Teori Ekspektasi**

Teori inflasi ekspektasi muncul pada tahun 1980an yang digolongkan sebagai *Keynesian* Baru. Ahli-ahli yang terkemuka dalam mazhab ini adalah *Gregory Mankiw* dan *Lawrence Summers* dari *Harvard*, *Oliver Blanchard*, *Paul Krugmen*, *Rudiger Dornbusch*, dan *Stanley Fischer* dari MIT, dan *David Rowner* dari University of California di *Berkcley*<sup>83</sup>. Mereka juga berpendapat seperti *Keynes*, bahwa berbagai pasar, terutama pasar tenaga kerja, tidak selalu seimbang. Pada waktu terjadi pengangguran atau penawaran buruh melampaui permintaan, terdapat berbagai kekakuan (*rigidity*) dalam pasar yang menyebabkan pengangguran akan terus terjadi, maka pemerintah masih mempunyai peranan penting untuk mengatasi masalah ini. Artinya pasar bebas tanpa adanya peran pemerintah tidak akan mampu menyeimbangkan keadaan pasar dengan sendirinya. Harus ada kebijakan pemerintah untuk mengatasi persoalan yang terjadi.

### **3. Laju Inflasi**

Menurut *Friedman*, inflasi merupakan fenomena moneter kapanpun dan di mana pun<sup>84</sup>. Laju inflasi, adalah laju tingkat harga umum dari tahun ketahun dan biasanya diikuti dengan kenaikan harga pada tahun tertentu dari tahun sebelumnya. Jika inflasi dianggap sebagai fenomena moneter, yaitu karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas barang-barang dan jasa dapat didefenisikan sebagai deflasi (*deflation*). Sehingga inflasi dapat diukur

---

<sup>83</sup>Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Modern, (Jajarta : PT.RajaGrafindo Persada,2006), h.23

<sup>84</sup> Nurul Huda, dkk, Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoretis, h. 178.



dengan tingkat inflasi (*rate of inflation*), yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga

$$\text{secara umum. } TI = \frac{T\text{tingkat harga } t - T\text{tingkat harga } (t-1)}{T\text{tingkat harga } (t-1)} \times 100 \dots (2.24)$$

Akan tetapi otoritas yang bertanggung jawab dalam mencatat statistik perekonomian suatu negara pada umumnya menggunakan CPI (*Consumer Price Index*) dan PPI (*Produser Price Index*), walaupun kedua pengukuran tersebut memiliki kelemahan. Hal ini disebabkan karena menggunakan himpunan yang mewakili himpunan bagian dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh keseluruhan perekonomian. Sehingga indeks harga tersebut tidak merefleksikan secara akurat seluruh perubahan harga yang terjadi. Di sisi lain CPI dan PPI tidak banyak mengakomodasi barang dan jasa yang baru diproduksi. Hal ini mengakibatkan para ekonom cenderung lebih suka menggunakan *GDP deflator* untuk melakukan pengukuran tingkat inflasi. Pengukurannya diformulasikan diformulasikan dengan :

$$GDP \text{ deflator} = \frac{GDP \text{ nominal}}{GDP \text{ riil}} \times 100 \dots (2.25)$$

#### 4. Penyebab Inflasi

Milton Friedman mengatakan inflasi ada dimana saja dan selalu merupakan fenomena moneter yang mencerminkan adanya pertumbuhan moneter yang berlebihan dan tidak stabil<sup>85</sup>. Di negara- negara industri pada umumnya inflasi bersumber dari salah satu atau gabungan dari dua masalah berikut<sup>86</sup> :

- a. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa.
- b. Pekerja – pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah.

<sup>85</sup>Asfia Murni, *Ekonomika Makro*, h. 202.

<sup>86</sup>Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga*, h. 14.

Dalam perekonomian modern sekarang ini masalah dan penyebab inflasi adalah sangat kompleks; Ia bukan saja disebabkan oleh penawaran uang yang berlebihan, tetapi juga oleh banyak faktor lain seperti kenaikan gaji, ketidakstabilan politik, pengaruh inflasi di luar negeri dan kemerosotan nilai mata uang<sup>87</sup>. Ditinjau dari sumber atau penyebabnya kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi dapat dibedakan kepada tiga bentuk, yaitu<sup>88</sup>: Inflasi Tarikan Permintaan (*demand – pull inflation*), Inflasi Desakan Biaya (*cost push inflation*), dan Inflasi Diimpor.

#### **a. Inflasi Tarikan Permintaan (*demand-pull inflation*)**

Inflasi ini disebabkan oleh perkembangan yang tidak berimbang di antara permintaan dan penawaran barang dalam perekonomian. Dalam keadaan seperti ini, apabila permintaan meningkat dengan pesat sebagai akibat pertambahan penawaran uang yang berlebihan, inflasi akan terjadi.

#### **b. Inflasi Desakan Biaya (*cost push inflation*)**

Inflasi ini pada awalnya disebabkan oleh kesempatan kerja penuh, industri-industri telah beroperasi pada kapasitas maksimal dan pengurangan tenaga kerja sangat rendah. Di sisi lain tenaga kerja cenderung untuk menuntut kenaikan upah/gaji yang berakibat kepada peningkatan biaya produksi, sehingga mendorong para pengusaha menaikkan harga-harga barang yang diproduksinya. Selanjutnya timbul inflasi desakan biaya.

#### **c. Inflasi Diimpor**

Krisis moneter pada tahun 1998 yang dialami Negara-negara di dunia, demikian juga kenaikan harga minyak dunia yang cukup tinggi, berakibat biaya

---

<sup>87</sup>Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Modern, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.10.

<sup>88</sup>Nurul Huda, dkk, Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoretis, h. 177.

energi negara-negara pengimpor minyak menjadi naik secara terus-menerus. Dalam hal demikian pekerja pun menuntut kenaikan upah/gaji untuk menyambung hidupnya. Keadaan ini tidak hanya menimbulkan berbagai kerugian dan inflasi yang serius, tetapi industri juga tidak sanggup beroperasi yang berakibat terjadinya peningkatan pengangguran. Apabila laju inflasi 0% ini juga tidak memacu terjadinya pertumbuhan ekonomi, tetapi akan menimbulkan *stagnasi*<sup>89</sup>. Perekonomian negara yang secara serentak menghadapi masalah inflasi dan pengangguran yang tinggi dinamakan *stagflasi*.

### 5. Dampak Inflasi

Salah satu akibat penting dari inflasi ialah cenderung menurunkan taraf kemakmuran golongan besar masyarakat<sup>90</sup>. Bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar dengan cepat, karena tingkat harga akan meningkat dengan cepat, para penabung enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun (tingkat inflasi di atas bunga), dan investasi sulit untuk berkembang karena minimnya uang masyarakat di bank. Berlakunya persamaan *Fisher* (*Fisher equation*)  $r = i - \pi$  atau  $I = r + \pi$ , dengan  $i$  menyatakan tingkat bunga nominal,  $r$  tingkat harga riil, dan  $\pi$  tingkat inflasi. Permintaan terhadap keseimbangan uang riil bergantung pada tingkat pendapatan. Secara matematis diformulasikan sebagai<sup>91</sup> :  $MV = PT$  atau  $MV = PO = Y$  ..... (2.26) dan  $M^d = kY$  ..... (2.27), dimana  $M$  = uang yang beredar (penawaran uang),  $V$  = kecepatan perputaran uang,  $P$  = harga barang / jasa yang ditukarkan,  $T$  = jumlah barang / jasa yang ditransaksikan, dalam versi lain  $T = O$  (output riil),  $M^d$  = jumlah permintaan

<sup>89</sup> Asfia Murni, *Ekonomika Makro*, h. 207.

<sup>90</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga*, h. 15.

<sup>91</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoretis*, h. 82-83.

uang,  $k$  konstanta yang menunjukkan persentase jumlah uang tunai yang dipegang terhadap pendapatan, dan  $Y$  = pendapatan nasional. Menurut *Fisher* seperti yang diuraikan dalam bukunya *Transaction Demand Theory of the Demand for Money* uang merupakan alat pertukaran. *Fisher* merumuskan teori kuantitas uang dengan sederhana. Menurut *Fisher* jika terjadi suatu transaksi antara penjual dan, maka akan terjadi pertukaran uang dengan barang/jasa sehingga nilai uang yang ditukarkan pasti sama dengan barang / jasa yang diperoleh<sup>92</sup>. Teori kuantitas menerangkan bahwa, kenaikan dalam tingkat pertumbuhan uang sebesar 1 % menyebabkan kenaikan 1% (efek Fisher /*Fishe effect*). Kenaikan harga yang tinggi dan terus menerus bukan saja menimbulkan beberapa efek buruk ke atas kegiatan ekonomi, tetapi juga kepada kemakmuran individu dan masyarakat, seperti : Menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap. Mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Memperburuk pembagian kekayaan<sup>93</sup>. Pada intinya inflasi akan membawa dampak secara agregat bagi kegiatan ekonomi, keterpurukan, kelesuan individu, masyarakat, maupun bagi negara yang mengalaminya.

## **6. Kebijakan Anti Inflasi**

Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan mengendalikan tingkat inflasi, pada umumnya ada dua kebijakan yang dilakukan pemerintah yaitu : Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal.

### **a. Kebijakan Moneter**

---

<sup>92</sup>Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoretis*, h. 82.

<sup>93</sup>Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga*, h. 338-339.

Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran jumlah uang yang beredar / moneter (*monetary aggregates*) untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan (besaran moneter : antara lain dapat berupa uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan). Kebijakan moneter merupakan bagian integral kebijakan ekonomi makro yang dilakukan dengan mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian suatu negara, serta faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya<sup>94</sup>. Sejak nilai tukar terus merosot, Bank Indonesia (BI) menerapkan kebijakan suku bunga tinggi. Kebijakan moneter sebenarnya bukan hanya mengutak-atik suku bunga<sup>95</sup> Walaupun kebijakan moneter merupakan salah satu upaya mengatasi inflasi dan demikian juga halnya dengan kebijakan fiskal, namun dalam aplikasinya keduanya tidak dapat disatukan. Hal ini disebabkan tujuan kebijakan moneter maupun fiskal sama yaitu, sama-sama mengatasi inflasi akan tetapi cara mengaplikasikan kebijakan dari keduanya berbeda.

### **b. Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang terkait dengan aspek pengelolaan anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal diyakini sebagai salah satu kebijakan yang sangat penting yang dapat dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah dalam memelihara kestabilan ekonomi. Hal ini terutama mengingat keterkaitan antara kebijakan moneter dan bagian kebijakan yang diterapkan secara bersama-sama mungkin mempunyai arah yang bertentangan sehingga saling

---

<sup>94</sup>Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, h. 83.

<sup>95</sup>Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoretis*, h. 193.

memperlemah. Dalam perekonomian yang mengalami tekanan inflasi, bank sentral melakukan pengetatan moneter. Pada saat yang bersamaan, pemerintah melakukan ekspansi di sektor fiskal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi<sup>96</sup>.

Dapat dipahami bahwa kebijakan moneter merupakan otoritas Bank Sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan perekonomian yang diinginkan. Di sisi lain kebijakan fiskal terkait dengan aspek pengelolaan anggaran pemerintah, secara langsung oleh pemerintah guna memelihara kestabilan ekonomi. Dikenal ada dua kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter *ekspansif* (melalui peningkatan jumlah uang beredar) dan kebijakan moneter *kontraktif* (melalui penurunan jumlah uang beredar)<sup>97</sup>. Kebijakan fiskal merupakan tindakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) berupa pajak atau Tax (T), pengeluaran pemerintah / *government expenditure* (G), dan *government transfer* (Tr). *Government expenditure* (G), merupakan pengeluaran pemerintah yang memperoleh memperoleh hasil secara langsung, seperti pembayaran gaji pegawai negeri pemerintah memperoleh prestasi kerja dari pegawai. *Government transfer* (Tr) merupakan pengeluaran pemerintah dimana pemerintah tidak memperoleh hasil secara langsung dari pengeluaran tersebut, seperti, pembayaran pension, bea siswa, dan subsidi lainnya. Di sisi lain kebijakan fiskal bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan cara : Menaikkan atau menurunkan penerimaan pemerintah melalui pajak, sehingga jumlah uang yang

---

<sup>96</sup>Veithzal Rivai, Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System, h. 84.

<sup>97</sup>Veithzal Rivai, Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System, h. 84.

beredar dapat terkendali. Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menarik beban atas harta yang menganggur, sehingga akan mendorong masyarakat untuk menginvestasikan dananya lewat tabungan atau deposito tanpa menggunakan tingkat bunga, tetapi melalui bagi hasil<sup>98</sup>. Lembaga keuangan bank dibutuhkan sebagai lembaga *intermediary* (perantara) antara pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana<sup>99</sup>. Pada masa Rasulullah Muhammad SAW, implementasi kebijakan fiskalnya dalam memenuhi kebutuhan adalah dengan cara menarik zakat, infak, sodaqoh (ZIS) dari kaum muslimin, diluar muslim dikenai berupa rampasan perang (*ghanimah*), pajak tanah berupa *kharaz* maupun *jizyah*, uang tebusan (*fai'*) dan lainnya. Sistem fiskal pada periode pertama Islam sangatlah sederhana, anggaran belanja negara ditentukan, dimana besaran nilai penghasilan (pendapatan) menentukan besarnya pengeluaran. Atau besarnya pengeluaran tergantung dari besarnya penerimaan, sehingga tidak terjadi defisit karena anggaran berimbang. Di sisi lain kebijakan anggaran tidak diorientasikan pada pertumbuhan ekonomi dalam pengertian modern, dan berperanlah *baitul maal* (*national treasury*). Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan<sup>100</sup>

## 7. Keterkaitan Inflasi Terhadap Funding

Melihat dan menganalisa seberapa jauh keterkaitan variabel independen Inflasi mempengaruhi variabel dependen Funding yang drefleksikan sebagai dana

---

<sup>98</sup> Nurul Huda, dkk, Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoretis, h. 191.

<sup>99</sup> M.Nur Rianto, Al-Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis, h.79.

<sup>100</sup> Nurul Huda, dkk, Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoretis, h. 191.

pihak ketiga (DPK) dalam hal ini penulis menggunakan dua acuan, yaitu : Acuan Rumus dan Acuan Teori Ahli Ekonomi.

#### a. Acuan Rumus

Berkaitan dengan pembahasan inflasi minimal ada tiga rumus yang dapat dijadikan acuan yaitu, tingkat inflasi (TI) dan GDP pendeflator atau GDP deflator, dan rumus permintaan uang oleh *Fisher* yang masing-masing dirumuskan sebagai :

$$1). TI = \frac{IHK_t - IHK_{(t-1)}}{IHK_{(t-1)}} \times 100 \dots\dots(2.24)^{101}, \text{ dengan keterangan } IHK_t = \text{indeks}$$

harga konsumen sekarang,  $IHK_{(t-1)}$  = indeks harga konsumen kemaren. Tingkat inflasi (TI) dalam hal ini berbanding terbalik dengan indeks harga konsumen kemaren ( $IHK_{t-1}$ ). Hal ini berarti, bila tingkat harga kemaren naik maka tingkat inflasi turun. Sebaliknya bila tingkat harga kemaren turun maka tingkat inflasi naik. Sebagai ilustrasi misalkan hargaper kg beras sekarang Rp 10.100,00, harga beras kemaren Rp berikut 10.000,00, tingkat inflasinya dapat dihitung sebagai :

$$TI = \frac{10.050 - 10.000}{10.000} \times 100 = \frac{5000}{10.000} = 0,5 = 50 \, \%.$$

Keadaan harga kita balik yaitu , harga sekarang Rp 10.000,00 dan harga kemaren Rp 10.050,00. Bila dihitung tingkat inflasinya adalah :

$$TI = \frac{10.000 - 10050}{10.050} \times 100 = \frac{-5000}{10.050} = -0,49 = -49\, \%.$$

Ilustrasi hitungan ini membuktikan bahwa, jika harga sekarang lebih tinggi dari harga kemaren (naik), maka tingkat inflasi juga naik. Dalam hal ini tingkat inflasi (TI) berbanding lurus dengan harga sekarang. Konsekwensinya adalah nilai daya beli uang akan berkurang, sehingga untuk menutupi kurangnya daya beli uang salah satunya adalah menarik tabungan. Akibat selanjutnya apabila tabungan

---

<sup>101</sup> Asfia Murni, *Ekonomika Makro*, h. 39.



masyarakat mengecil, maka *Funding* juga mengecil. Dengan kata lain jika tingkat inflasi (inflasi) naik, maka *Funding* menurun, sebaliknya jika inflasi turun maka *Funding* naik. Hal ini membuktikan bahwa inflasi berbanding terbalik dengan *Funding*.

$$2). \text{ GDP deflator} = \frac{\text{GDP nominal}}{\text{GDP riil}} \times 100 \dots\dots (2.25)^{102}$$

GDP deflator = pendeflasi GDP = penurun GDP, GDPriil = GDP yang didasarkan pada harga tahun dasar, GDP nominal = GDP yang didasarkan pada harga tahun berlaku. GDP deflator dalam hal ini berbanding terbalik dengan GDP riil. Ini berarti, bila GDP riil turun maka GDP deflator naik. Sebaliknya bila GDP riil naik maka GDP deflator turun. GDP riil. Sebagai ilustrasi kita anggap GDP berasal dari penjualan bahan makanan seperti pada tabel 6.

**Tabel 2.8 : Harga Beras dan Daging**

Tahun	Harga Beras (Rp)	Kuantitas Beras (Kg)	Harga Daging (Rp)	Kuantitas Daging (Kg)
2013	Rp 9.000	360	Rp 85.000	48
2014	Rp 9.500	540	Rp 90.000	96
2015	Rp 10.000	1080	Rp 95.000	144

Dari tabel 6 diperoleh hasil hitung GDP deflator sebagai berikut : berdasarkan contoh perhitungan di atas (sebelumnya) diperoleh bahwa, GDP<sub>nominal</sub> 2014 sebesar Rp 13.770.000,- dan GDP riil 2014 sebesar Rp 8.646.000,- GDP<sub>nominal</sub> tahun 2015 = 24.480.000,- GDP riil tahun 2015 = 21.960.000,- sehingga diperoleh :

$$\text{GDP deflator tahun 2014} = \frac{\text{GDP nominal 2014}}{\text{GDP riil 2014}} = \frac{13.770.000}{8.646.000} = 1,5926 = 160 \%$$

$$\text{GDP delator tahun 2015} = \frac{\text{GDP nominal 2015}}{\text{GDP riil 2015}} = \frac{24.480.000}{21.960.000} = 1,1147 = 111 \%$$

<sup>102</sup> Asfia Murni, *Ekonomika Makro*, h. 37.

Data pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksi negara yang dicapai dalam satu tahun tertentu dan perubahannya dari tahun ke tahun. Maka ia mempunyai peranan penting dalam menggambarkan, tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai, dan perubahan serta pertumbuhannya dari tahun ke tahun<sup>103</sup>. Terbukti bahwa GDP delator tahun 2015 lebih kecil dibanding GDP deflator tahun 2014, hal ini dikarenakan GDP riil tahun 2015 lebih besar dibanding GDP riil 2014. Realita ini dapat berarti pula bahwa apabila GDP riil naik, maka GDP delator turun. Karena GDP riil menyatakan pendapatan nasional yang mendekati kenyataan sebenarnya, sedangkan GDP deflator merefleksikan inflasi dari sisi kiri (penurunan harga), artinya bahwa jika inflasi turun, maka pendapatan masyarakat naik. Naiknya pendapatan masyarakat cenderung untuk disimpan (ditabung) sebagai alat untuk berjaga-jaga maupun investasi. maka naiknya GDP riil megindikasikan naiknya dana pihak ketiga (DPK) atau funding. Karena deflator mengindikasikan inflasi, maka hitungan GDP deflator ini dapat dipakai sebagai pembuktian bahwa :”Jika inflasi naik maka Funding turun, sebaliknya jika inflasi turun, maka Funding naik “ atau “ Inflasi berbanding terbalik dengan *Funding*”.

$$3). \mathbf{MV = PO = Y \dots (2.26)} \text{ atau } \mathbf{M^d = kY \dots (2.27)}$$

dimana M = uang yang beredar (penawaran uang), V = kecepatan perputaran uang, P = harga barang / jasa yang ditukarkan, T = jumlah barang / jasa yang ditransaksikan, dalam versi lain T = O (output riil), M<sup>d</sup> = jumlah permintaan uang, k = konstanta yang menunjukkan persentase jumlah uang tunai yang dipegang terhadap pendapatan, dan Y = pendapatan nasional.

---

<sup>103</sup>Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga, h. 17.

Dari rumus (2.26) ;  $MV = PO = Y$  , dapat dianalisis bahwa Pendapatan Nasional (Y) berbanding lurus dengan uang yang beredar (M), berbanding lurus dengan kecepatan perputaran uang (V), berbanding lurus dengan harga barang/jasa (P) dan berbanding lurus dengan output riil (O). Hal demikian dapat kita pahami berlaku dalam keadaan normal, akan tetapi ketika terjadi inflasi kecepatan perputaran uang akan melambat atau berbanding terbalik dengan keadaan normal. Pemahaman eksistensi rumus ini membuktikan bahwa : Inflasi berbanding terbalik dengan *Funding*. Dari rumus (2,27) ;  $M^d = kY$ , Analog dengan rumus (2.26), bahwa Pendapatan Nasional (Y) berbanding lurus dengan jumlah permintaan uang ( $M^d$ ), tetapi berbanding terbalik dengan persentase jumlah uang tunai yang dipegang terhadap pendapatan (k). Hal ini menunjukkan bahwa, apabila persentase jumlah uang tunai yang dipegang terhadap pendapatan (k) sedikit yang lain dianggap tetap (*ceteris paribus*), maka Pendapatan Nasional (Y) naik, demikian pula berlaku sebaliknya. Fakta dari rumus ini membuktikan bahwa : Inflasi berbanding terbalik dengan *Funding*.

### **b. Acuan Teori**

Ada tiga pendapat ahli ekonomi yang akan penulis jadikan dasar pembuktian keterkaitan antara inflasi dengan *Funding*, diantaranya adalah :

- 1). Kegiatan ekonomi yang tidak efisien menimbulkan berbagai masalah makroekonomi, yaitu masalah-masalah yang mempengaruhi keseluruhan ekonomi. Masalah-masalah tersebut adalah pengangguran, pertumbuhan yang lambat, inflasi dan ketidakseimbangan neraca pembayaran<sup>104</sup>.

---

<sup>104</sup>Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga, h. 27.

- 2). Keynes menyatakan tabungan dalam suatu Negara sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diterima masyarakat dan bukan dipengaruhi oleh tingkat bunga<sup>105</sup>.
- 3). *Samuelson* ; 2001 menyatakan bahwa, Hyper inflasi adalah inflasi yang sangat tinggi (di atas 100%). Inflasi ini sangat mematikan kegiatan perekonomian masyarakat<sup>106</sup>.

Dari acuan rumus dan acuan teori, serta pengamatan dan analisa pembahasan inflasi ini dapat disimpulkan bahwa : “Inflasi berpengaruh negatif terhadap *Funding*”. Hal ini berarti bahwa, jika inflasi naik maka *Funding* turun, sebaliknya jika inflasi turun, maka *Funding* naik.

## C. BANK SYARIAH

### 1. Pengertian

Banyak pengertian (*ta'rif*) Bank Syariah yang telah dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah : Bank Islam atau selanjutnya disebut Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Alquran dan Hadis Nabi SAW<sup>107</sup>. Tidak jauh berbeda dengan definisi yang diungkapkan Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, yaitu “Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Alquran dan Hadis”<sup>108</sup>.

---

<sup>105</sup> Asfia Murni, *Ekonomika Makro*, h. 57.

<sup>106</sup> Asfia Murni, *Ekonomika Makro*, h. 14.

<sup>107</sup> Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami*, h. 93-94.

<sup>108</sup> Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan; Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, ed. 1, cet. 1, 2002), h. 593.

Bank menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : “Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang”<sup>109</sup>. Menurut Undang –Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak<sup>110</sup>. Bank menghimpun dana secara langsung berupa simpanan dana masyarakat (tabungan, deposito, dan giro) serta menyalurkan dana untuk tujuan modal kerja, investasi, konsumsi, kepada badan usaha dan individu untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Muhammad Syafi’i Antonio, dalam salah satu kutipannya menyatakan bahwa : “Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika misalnya sifat amanah dan shiddiq harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Disamping itu, karyawan bank syariah harus *skillful* dan professional (fhatanah), dan mampu melakukan tugas secara *team work* dimana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah<sup>111</sup>.

Ada beberapa perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional, yaitu sebagai berikut : Akad dan aspek legalitas, lembaga penyelesaian sengketa, struktur organisasi, bisnis dan usaha yang dibiayai, serta lingkungan

---

<sup>109</sup>Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Jakarta Balai Pustaka, 1991, h. 90.

<sup>110</sup>Ismail, Akuntansi Bank, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 12.

<sup>111</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah : Teori dan Praktik, h. 29-34

kerja. Di sisi lain bank syariah melakukan investasi yang halal saja, sedangkan bank konvensional melakukan investasi yang halal dan yang haram. Aplikasi produk bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), Jual beli (*murabahah*), atau sewa (*ijarah*), sedangkan bank konvensional memakai perangkat bunga. Orientasi bank syariah profit dan *falah* (mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat), sedangkan bank konvensional hanya berorientasi kepada keuntungan (*profit*) semata. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti : Rukun (adanya penjual, pembeli, barang, harga, dan akad atau ijab qabul), dan syarat (barang dan jasa harus halal, harga barang dan jasa harus jelas, tempat penyerahan/ *delivery* harus jelas, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan)<sup>112</sup>. Hubungan bank syariah dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, sedangkan dalam bank konvensional merupakan bentuk hubungan kreditur – debitur. Bank Syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS), sedangkan dalam bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis. Prinsip-prinsip dasar transaksi dalam Keuangan Syariah yang dijadikan panduan dalam berbagai aktivitas transaksi ekonomi, yaitu antara lain : larangan atas penerapan bunga (*riba / usury*), larangan terhadap aktivitas ekonomi yang mengandung unsur judi / spekulasi (*maysir*), ketidak pastian / penipuan (*gharar*), serta produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan syariah Islam (*bathil*). Anjuran atas penerapan sistem bagi hasil (*profit loss sharing*), penekanan pada perjanjian atau kesepakatan

---

<sup>112</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah : Teori dan Praktik, h. 29-30.

yang adil (*'an – taradhin*), dan mendorong produktivitas dan keadilan distribusi<sup>113</sup>. Pengertian riba menurut beberapa literatur adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi atau penyeimbang yang dibenarkan syariah, atau penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Riba juga berarti tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (pengganti/padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu *riba jual beli* dan *riba utang piutang*. Riba jual beli terbagi menjadi riba fadhl, yaitu pertukaran barang sejenis dengan kadar takaran yang berbeda. Dan riba nasi'ah, yaitu adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara barang yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Adapun riba utang piutang terbagi menjadi riba qardh, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*). Dan riba jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. *Maysir* atau judi adalah aktivitas spekulasi (untung-untungan) di dalam transaksi keuangan yang memungkinkan adanya pihak yang dirugikan di atas keuntungan pihak lain. Adapun *gharar*/ketidak pastian (penipuan) adalah sesuatu yang mengandung ketidakjelasan (*syubhat*), keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan orang lain. Tentang penipuan salah satu hadis Rasulullah SAW dalam ringkasan Shahih Muslim (947) artinya :

Dari Abu Hurairah ra. bahwwa Rasulullah saw lewat di sejumlah bahan makanan (gandum), lalu dia memasukkan tangannya ke dalam bahan makanan itu. Kemudian jari-jari beliau menemukan bagian yang basah, lalu beliau bertanya

---

<sup>113</sup>Direktorat Pembiayaan Syariah, Instrumen Keuangan Berbasis Syariah, (Jakarta : Kemenkeu RI, 2011), h, 1-2.

“Hai pemilik (penjual) bahan makanan ! Apa yang basah ini ?”. Orang itu menjawab “Kena hujan ya Rasulullah”. Beliau bersabda “Mengapa bagian yang basah itu tidak kau letakkan di atas agar bisa dilihat oleh calon pembeli ? Barang siapa penipu, maka dia bukanlah dari golonganku”<sup>114</sup>.

Tentang riba dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW ada bersabda :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ " هُمْ سَوَاءٌ. (رواه المسلم

(955) Artinya : Jabir ra. mengatakan bahwa Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, orang yang menugasi (menyuruh) jual beli riba, penulis riba, dan dua orang yang menjadi saksi riba, sabda beliau “Mereka semua sama saja”<sup>115</sup>.

Tentang ketidakjelasan (*syubhat*) salah satu hadis Rasulullah SAW dalam ringkasan Shahih Muslim (956) artinya :

An-Nu'man bin Basyir ra. menyatakan bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda (An-Nu'man mendekatkan dua jarinya ke dua telinganya) “Sungguh halal itu jelas dan sungguh haram itu jelas. Namun diantara keduanya ada hal-hal yang syubhat yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa menghindari syubhat maka dia mensucikan agamanya dan kehormatannya . Barang siapa jatuh ke dalam syubhat, maka dia telah terjatuh pada hal yang haram, seperti seorang penggembala di sekitar larangan yang binatangnya hampir makan larangan terst. Katakanlah bahwa setiap manusia itu menerapkan larangan dan ketahuilah bahwa larangan Allah apa yang diharamkanNya. Ketahuilah dalam tubuh ada segumpal darah : Jika segumpal darah tersebut baik, maka seluruh tubuh menjadi baik . Apabilasegumpal darah itu rusak, maka seluruh tubuh menjadi rusak. Segumpal darah tersebut adalah hati”<sup>116</sup>.

Seiring dengan perkembangan agama Islam yang di bawa oleh Rasulullah Muhammad SAW yang tidak hanya tersebar di jazirah Arab, Afrika, Asia dan Eropa, tetapi bahkan keseluruh penjuru dunia, sangat wajar bila Umat Islam memiliki keinginan yang kuat dalam lingkup internasional maupun lingkup

<sup>114</sup>M. Nashiruddin al- Bani, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta : Gema Insani, 2005), h.448.

<sup>115</sup>M. Nashiruddin al- Bani, Ringkasan Shahih Muslim, h. 451.

<sup>116</sup>M. Nashiruddin al- Bani, Ringkasan Shahih Muslim, h. 452.



nasional untuk menerapkan sistem syariah dalam ekonomi dan keuangannya, karena yang halal sudah jelas yang haram juga jelas namun kita disuruh untuk menghindari hal yang halal bukan harampun bukan alias syubhat.

## 2. Sejarah Pendirian Bank Syariah

Adanya lembaga keuangan yang disebut *baitul maal* (rumah harta) di masa Rasulullah Saw maupun dimasa Khulafa al- Rasyidin yang menggunakan prinsip keuangan syariah (*Islamic Finance*), yaitu suatu sistem keuangan/perekonomian yang diatur dan dikelola berdasarkan syariah Islam. Dasar tujuan keuangan/ekonomi syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan , kemaslahatan dan kesejahteraan manusia terutama di bidang ekonomi/keuangan , dengan mengaju pada tujuan utama syariah (*maqashid syariah*) dalam rangka membantu manusia mencapai kemenangan (*falaah*) di dunia dan akhirat”<sup>117</sup>. Beroperasinya *Mit Ghamar* Bank binaan *Ahmad Najjar* di pedesaan Mesir pada tahun enam puluhan merupakan pemicu tumbuh kembangnya sistem finansial dan ekonomi Islam. Kemudian berlanjut dengan terbitnya proposal pendirian bank syariah pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara OKI di *Karachi* (Pakistan) di akhir tahun 1970. Pada siding Menteri Luar Negeri Organisasi Konferensi Islam (OKI) di *Benghazi* (Libia) Maret 1973, siding memutuskan agar OKI memiliki bidang khusus ekonomi dan keuangan. Pada tahun 1975 di *Jedah*. Sidang Menteri Keuangann OKI menyetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank (IDB)* dengan sistem murabahah dan ijarah. Pada akhir periode 1970-an dan awal periode 1980-an,

---

<sup>117</sup>Tim Penyusun, Instrumen Keuangan Berbasis Syariah, (Jakarta, Direktur Pembiayaan Syariah, 2011), h. 1.

bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki<sup>118</sup>. Eksistensi lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak terlepas dari kajian secara formal maupun informal dari para pakar ekonomi dan perbankan serta Majelis Ulama Indonesia (MUI). Awal tahun 1980, gagasan pendirian bank syariah mulai menampakkan wujudnya melalui inisiatif para tokoh, antara lain : Karnaen, A. Perwataatmaja, M.Dawam Rahardjo, AM. Saefuddin, M.Amin Azis dan lain-lain, dengan mengadakan ujicoba sistem syariah pada skala kecil. Pendirian *Bait al-Maal wa at-Tamwil* (BMT) seperti BMT Salman di ITB Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta<sup>119</sup>. Peranan strategis MUI dalam proses pendirian Bank Syariah tidak dapat dinafikan. MUI telah memprakarsai lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor Jawa Barat pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990. Hasil lokakarya itu lebih lanjut dibahas pada Musyawarah Nasional IV MUI yang di adakan di Hotel Syahid Jakarta tanggal 22 – 25 Agustus 1990. Satu tonggak pendirian awal Bank Syariah adalah, adanya amanat musyawarah nasional untuk membentuk kelompok kerja pendirian.

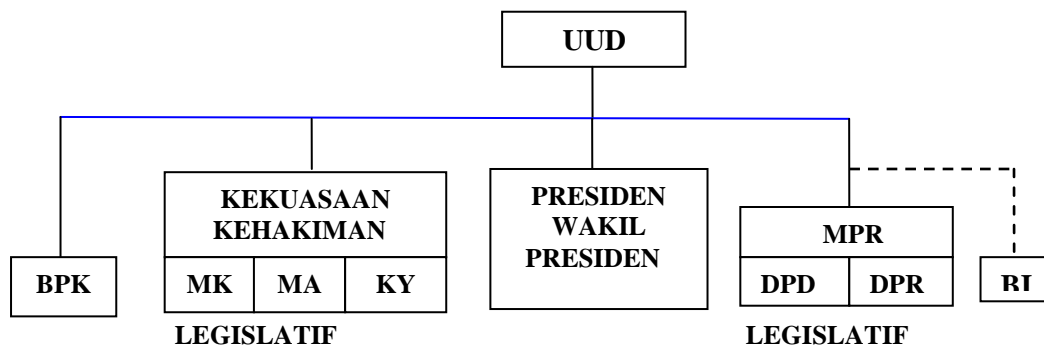
Pendirian Bank Syariah di mana MUI sebagai inisiatornya semakin nyata, dengan dibentuknya suatu Tim *Steering Commite* yang diketuai oleh Dr. Ir. Amin Aziz yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan berdirinya bank syariah di Indonesia. Untuk kelancaran tugas tim ini, dibentuk pula tim hukum ICMI yang diketuai Drs. Karnaen Perwataatmaja, MPA. Dari sisi persiapan sumber daya manusia, diselenggarakan training calon Staf Bank Syariah di LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia) pada tanggal 29 Maret

---

<sup>118</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah : Teori dan Praktik, h. 21.

<sup>119</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta : Tazkia Institut, 1999), h. 237.

1991. Training ini dibuka oleh Menteri Muda Keuangan Nasruddin Sumintapura<sup>120</sup>. Dalam rangka menghimpun dana sebagai modal pendirian bank syariah pertama di Indonesia, Tim MUI melobi pengusaha-pengusaha muslim untuk menjadi pemegang saham pendiri. Dalam waktu 1 tahun berbagai persyaratan pendirian telah diperoleh, sehingga pada tanggal 1 november 1991 dapat dilaksanakan penandatanganan Akte pendiriannya di Sahid Jaya hotel dengan Akte notaris Yudo paripurno,SH.dengan izin menteri kehakiman No.C.2.2413.HT.01.01. Komitmen pembelian saham Rp 106.126.382.000,- sebagai modal awal pendirian sekaligus dukungan presiden diperoleh pada acara silaturahmi bersama Presiden Soeharto di istana Bogor tanggal 3 November 1991<sup>121</sup>. Dari fakta tersebut struktur organisasi Bank Indonesia dan Bank Syariah dapat kita lihat dari bagan 1 dan bagan 2 berikut:



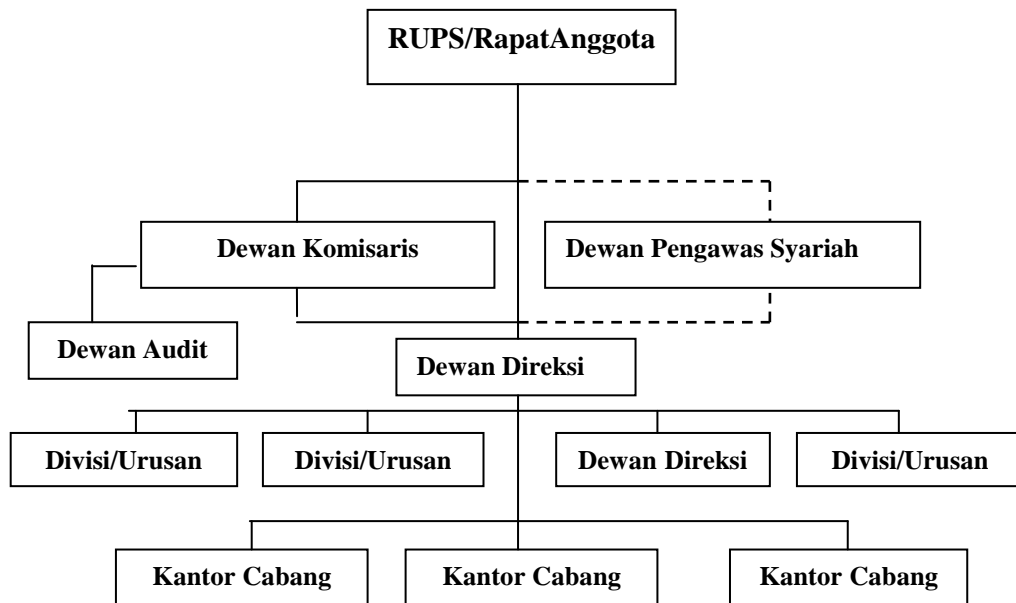
**Bagan 2.1 : Struktur Bank Indonesia dalam sistem Kenegaraan Republik Indonesia<sup>122</sup>**

Secara kelembagaan, bank syariah di Indonesia memiliki diagram alur (bagan) atau susunan organisasi sebagai berikut :

<sup>120</sup>Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), h. 73 – 74.

<sup>86</sup>Syafi'I Antonio, Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 237-238.

<sup>122</sup>Veithzal Rivai, Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System, h. 37.



Bagan 2. 2 : Struktur Organisasi Bank Umum Syariah<sup>123</sup>.

Dewan Gubernur merupakan badan yang memiliki otoritas tertinggi dalam *hierarki* kewenangan di dalam struktur organisasi Bank Indonesia. Di Bank Syariah (RUPS)/rapat anggota yang memiliki otoritas tertinggi.

### 3. Aplikasi produk Bank syariah

Sebagai bank yang landasan utamanya lebih menekankan pada prinsip bagi hasil dalam semua operasinya, secara garis besar menawarkan tiga macam produk, yaitu produk *funding*, *financing*, jasa (*service*). Funding merupakan penghimpunan dana dari masyarakat atau biasa disebut dengan dana pihak ke tiga (DPK). Dana pihak ketiga menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, aset ini tidak terlepas dari peningkatan jumlah kantor cabang bank syariah yang semakin banyak jumlahnya<sup>124</sup>.

<sup>123</sup>Veithzal Rivai, Bank and financial Institution Management & Sharia Sistem, h.754.

<sup>124</sup>Veithzal Rivai, Bank and financial Institution Management & Sharia Sistem, h. 745.

### **a. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)**

Sofyan S. Harahap dalam bukunya Akuntansi Perbankan Syariah menyatakan bahwa :

“Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional adalah dalam bentuk Tabungan, Deposito dan Giro yang lazim disebut dengan dana pihak ketiga. Dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan tidak membedakan nama produk tetapi melihat pada prinsip yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Apapun nama produk yang diperhatikan adalah prinsip yang dipergunakan atas produk tersebut, hal ini sangat terkait dengan porsi pembagian hasil usaha yang akan dilakukan antara pemilik dana/deposan (*shahibul maal*) dengan bank syariah sebagai *mudharib*<sup>125</sup>.

Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam. Atas dasar tersebut, prinsip bank syariah dalam penghimpunan dana adalah sebagai berikut<sup>126</sup> :

- 1). Produk Giro, dengan prinsip wadiah (titipan) dan return untuk nasabah bonus sesuai kehendak bank.
- 2). Produk Tabungan, dengan prinsip wadiah, mudharabah dan return untuk nasabah bonus sesuai kehendak bank bagi hasil, dengan nisbah.
- 3). Produk Deposito, dengan prinsip mudharabah *muthlaqah*, mudharabah *muqayyadah* dan return untuk nasabah bagi hasil, dengan nisbah bagi hasil.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 1 / DSN – MUI / IV / 2000<sup>127</sup> disebutkan bahwa giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran

<sup>125</sup>Sofyan S. Harahap, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah Edisi Revisi, h. 67.

<sup>126</sup>Veithzal Rivai, Bank and financial Institution Management & Sharia Sistem, h. 768.

<sup>127</sup>M. Nur Rianto, Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis, h. 135.

lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Giro ada dua jenis. *Pertama*, giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga. *Kedua*, giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02 / DSN – MUI / IV / 2000<sup>128</sup>, tabungan terdiri atas dua jenis, yaitu : *Pertama*, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan berdasarkan perhitungan bunga. *Kedua*, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah* yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan / atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 3 / DSN – MUI / IV / 2000<sup>129</sup>, deposito terdiri atas dua jenis . *Pertama*, deposito yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. *Kedua*, deposito yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* serta penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan / atau Unit Usaha Syariah (UUS).<sup>130</sup> Ada dua prinsip penghimpunan dana yang dibenarkan syariah, yaitu prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*. Wadiah ditinjau dari karakteristiknya terdiri dari dua jenis yaitu :

- a). *Wadiah Yad Al-Amanah*, dengan karakteristik titipan murni, yaitu barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh

<sup>128</sup>M. Nur Rianto, Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis, h. 134.

<sup>129</sup>M. Nur Rianto, Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis, h. 134.

<sup>130</sup>M. Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah, Bandung : Pustaka Setia, 2011, h. 133 – 135.

penyimpan. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab, sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan.

- b). *Wadiah Yad Dhamanah*, dengan karakteristik pengembangan, yaitu disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan bertanggung jawab terhadap kehilangan/kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang/dana, dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu, mudharabah muthlaqah dan muqayyadah<sup>131</sup>.

- a). *Mudharabah Muthlaqah* (investasi tidak terikat), yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh, tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha, maupun pelanggan, untuk menjalankan proyek secara leluasa tanpa larangan / gangguan apapun. Investasi tidak terbatas ini pada perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.
- b). *Mudharabah Muqayyadah* (investasi terikat), yaitu pemilik dana (shahibul maal) membatasi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terbatas dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank dilarang menginvestasi dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin/jaminan dan bank diharuskan melakukan investasi sendiri (tidak melalui pihak ketiga). Dalam investasi terikat ini kedudukan bank sebagai agen saja, dan atas

---

<sup>131</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, h. 97.

kegiatannya tersebut bank menerima imbalan uang (*fee*). Dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Bank Syariah, dijelaskan acuan akuntansi tentang pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah, bank sebagai pengelola dana (*mudharib*)<sup>132</sup>.

#### 4. Jumlah Jaringan Kantor Bank Syariah

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 benar-benar menjadi angin segar bagi industri perbankan syariah. Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, jumlah jaringan kantor perbankan syariah berkembang dengan amat pesat. Kantor pusat bank syariah yang semula pada tahun 1991 hanya berjumlah satu kantor utama dan hanya memiliki satu kantor cabang, posisi pada November 2004 jumlah jaringan kantor perbankan syariah sudah mencapai 18 kantor pusat/unit usaha syariah, 146 kantor cabang operasional, 50 kantor cabang pembantu, dan 130 kantor kas<sup>133</sup>. Beroperasinya Bank Syariah pertama Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992 hingga September 1999 telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar<sup>134</sup>. Aset bank syariah menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, dari Rp 7,9 triliun pada akhir Desember 2003 meningkat menjadi Rp 14,2 triliun pada November tahun 2004 atau meningkat sebesar 339%. Aset perbankan nasional hanya mengalami peningkatan sebesar 13,4% dari 1062 triliun menjadi Rp 1204 triliun pada periode yang sama<sup>135</sup>.

---

<sup>132</sup>Sofyan S. Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta : LPFE – Usakti, S2006), h.75.

<sup>133</sup>Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management, & Sharia Sistem*, h. 744-745.

<sup>134</sup>Bank Muamalat, *Annual Report* (Jakarta, 1999).

<sup>135</sup>Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management, & Sharia Sistem*, h. 745.



Kecenderungan dana pihak ketiga (DPK) maupun aset yang terus meningkat sejalan dengan perkembangan bank syariah yang semakin banyak jumlahnya. Tampak pada periode setelah tahun 2003 ketika terjadi lonjakan dana masyarakat yang cukup tinggi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 6%, sedangkan rata-rata pertumbuhan sebelum 2003 masing-masing sebesar 5% di tahun 2001, 3,6% pada tahun 2002<sup>136</sup>. Jika kita analisa jumlah jaringan kantor bank syariah melalui statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2009 s/d tahun 2014 mengalami kenaikan sedangkan posisi pada Pebruari 2015 mengalami penurunan. Lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.9 : Jaringan Kantor Perbankan Syariah Pebruari 2015**

Tahun	2009	2010	2012	2013	2014	Peb,2015
Jlh. Kantor	711	1215	1745	2133	2151	2144

Sumber : Statistik OJK<sup>137</sup>

Namun jumlah jaringan kantor Bank Umum Syariah (BUS) sepanjang 6 bulan pertama periode tahun 2015 terus mengalami penurunan. Hal ini terlihat dalam statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana per-Januari 2015 BUS memiliki 2145 unit kantor, namun pada Juni 2015 tinggal 2121 unit kantor.

<sup>136</sup>Veithzal Rivai, Bank and Financial Institution Management, & Sharia Sistem, h. 745.

<sup>137</sup>[www.ojk.go.id/kanal/syariah/data](http://www.ojk.go.id/kanal/syariah/data) dan statistic perbankan syariah/Documents/Pages/statisticperbankan-syariah-desember 2015.

## 5. Keterkaitan Jumlah Jaringan Kantor Terhadap Funding

Komitmen pemerintah untuk mengembangkan perbankan syariah dilandasi oleh berbagai hal, antara lain (Bank Indonesia, 2002)<sup>138</sup> :

- 1). Memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki pelayanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah.
- 2). Meningkatkan mobilisasi investasi masyarakat yang belum terserap sistem perbankan yang ada dan mengoptimalkan proses investmen-investmen bagi usaha percepatan pembangunan.
- 3). Meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional dengan mengembangkan bank syariah yang mempunyai karakteristik kegiatan usaha yang menekankan *ethical investmen*, melarang bunga bank (lebih banyak berbasis *equity* dengan prinsip bagi hasil) dan transaksi yang bersifat spekulatif yang non produktif, serta pembiayaan yang harus didasarkan pada kegiatan usaha riil; dan
- 4). Menyediakan sarana bagi investor internasional untuk melaksanakan pembiayaan dan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 5). Kecenderungan dana pihak ketiga (DPK) maupun aset yang terus meningkat sejalan dengan perkembangan bank syariah yang semakin banyak jumlahnya<sup>139</sup>.

Meskipun baru satu bank syariah yang dilahirkan sebelum tahun 1998, pertumbuhan kantor cabang yang pesat justru terjadi menjelang krisis pada tahun 1997, dari empat cabang pada tahun 1996 menjadi 10 kantor cabang pada tahun

---

<sup>138</sup>Veithzal Rivai, Bank and Financial Institution Management, & Sharia Sistem, h. 743.

<sup>139</sup>Veithzal Rivai, Bank and Financial Institution Management, & Sharia Sistem, h. 745

1997<sup>140</sup>. Sebaliknya tidak satu rupiahpun dana BLBI yang mengalir ke bank tersebut. Itu karena rasio kecukupan modal atau CAR (capital adequacy ratio) Bank Muamalat 6,7 persen, sementara bank yang mendapat suntikan BLBI adalah bank yang memiliki CAR dibawah empat persen<sup>141</sup>. Meskipun kontribusi pembiayaan bank syariah terhadap bank konvensional hanya mencapai 1,16 %, dalam perkembangannya hal ini menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 60% setiap tahun<sup>142</sup>. Mencermati pernyataan Bank Indonesia , pernyataan tim penulis Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) sebagaimana tersebut di atas, serta data Jumlah Jaringan Kantor produk Statistik OJK periode 2009-2015 yang cenderung naik (meningkat) kecuali pada tahun 2015 mengalami penurunan sejumlah 7 satuan kantor, maka dapat disimpulkan bahwa : Jumlah jaringan Kantor (JK) berbanding lurus dengan Funding.

## **6. Bagi Hasil Di Bank Syariah**

Di dalam istilah-istilah terkait Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia ada definisi yang tercetak sebagai berikut : Bagi hasil : Sistem pembagian hasil usaha (keuntungan maupun kerugian) yang dibagi berdasarkan rasio/nisbah yang berbentuk persentase (A 50% : B 50%) dan disepakati bersama di awal akad<sup>143</sup>. Adanya untung dan rugi menandakan bahwa didalam usaha yang dilakukan

---

<sup>140</sup>Veithzal Rivai, Bank and Financial Institution Management, & Sharia Sistem, h. 744.

<sup>141</sup>Anif Punto Utomo, dan Kawan-kawan, Dua Dekade Ekonomi Syariah Menuju Kiblat Ekonomi Islam, h. 72-73.

<sup>142</sup>Veithzal Rivai, Bank and Financial Institution Management, & Sharia Sistem, h. 745.

<sup>143</sup>DSN – MUI, Kumpulan Fatwa Edisi Ketiga, (Jakarta : Kementrian Keuangan RI, 2012), h. 64.

tersebut ada mengandung resiko yang harus ditanggung bersama, berbeda dengan sistem bunga yang berakibat pada satu pihak senantiasa untung akan tetapi pihak yang lain senantiasa rugi, atau adanya resiko tidak ditanggung bersama. Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah terletak pada penerapan bunga. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip keadilan yang tercermin pada penerapan imbalan atas dasar bagi hasil<sup>144</sup>. Dalam aplikasinya, mekanisme penghitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu : Pendekatan *Profit Sharing* (bagi laba) dan Pendekatan *Revenue Sharing* (bagi pendapatan). Pada penelitian ini hanya menggunakan pendekatan *Profit Sharing* (bagi laba). Perhitungan bagi hasil diproses sebagai berikut<sup>145</sup> :

- a. Jenis dana pihak ketiga (Deposito, Giro, Tabungan), Investment rates (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan), dan bobot (80%, 85%, 90%, 100%).
- b. Sumber-sumber pendapatan yang dialokasikan dalam proses penghitungan bagi hasil.
- c. Pendapatan yang dibagikan merupakan perbandingan antara total volum rata-rata dana pihak ketiga dan total volum rata-rata pembiayaan dikalikan dengan total pendapan.
- d. Pendapatan lain, seperti pendapatan transaksi valuta asing, *fee*, dan komisi, sepenuhnya menjad milik bank.

---

<sup>144</sup>Veithzal Rivai, Bank and Financial Institution Management, & Sharia Sistem, h.759.

<sup>145</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, h. 143.

- e. Pendapatan dialokasikan ke setiap sumber dana secara proporsional sesuai dengan saldo rata-rata hartian bulan yang bersangkutan setelah dikalikan dengan bobot (*weighting*).
- g. Semua biaya ditanggung oleh bank termasuk provisi untuk resiko pembiayaan dan operasi investasi.
- h. Nisbah yang berlaku sekarang antara bank dan pemegang rekening adalah sebagai berikut : Deposito 1bulan (65:35), 3 bulan (66:34), 6 bulan (66:34), 12 bulan (63:37), Rekening Tabungan (45:55), Rekening Koran (bonus).

Dari uraian diatas formulasi matematisnya adalah sebagai berikut :

$$P_i = \frac{I_i}{I_t} \times P_t \times P_r \dots\dots (2.29), \text{ dengan ketentuan } P_i = \text{profit individu, } I_i =$$

Investasi individu,  $I_t$  = investasi total,  $P_t$  = profit total , dan  $P_r$  = porsi nisbah bagi hasil. Adapun penghitungan keuntungan (profit individu) pada bank konvensional diistilahkan dengan bunga tabungan atau bunga efektif ( $Be$ ) yang diformulasikan

$$\text{secara matematis dengan : } Be = \frac{N.i.Jw}{365} - PPh^{146} \dots\dots (2.30), \text{ dengan ketentuan}$$

$N$  = nominal saldo yang mengendap (rata-rata harian dalam satu bulan),  $Jw$  = jangka waktu,  $I$  = suku bunga (%),  $PPh$  = 20% (untuk penduduk Indonesia dalam rupiah dan Valas). Bila tidak menggunakan jangka waktu dan potongan pajak atau

$$PPh, \text{ maka rumusnya diformulasikan sebagai : } Be = \frac{100\%}{100\% - RR} \times n^{147} \dots\dots (2.31),$$

dengan ketentuan  $Be$  = bunga efektif,  $RR$  (%) = *reserve requirement* (cadangan likuiditas wajib minimum),  $n$  = tingkat bunga riil (%), 100% = besar (jumlah) dana yang di investasikan.

<sup>146</sup>Veithzal Rivai, Bank and Financial Institution Management, & Sharia Sistem, h. 417.

<sup>147</sup>Veithzal Rivai, Bank and Financial Institution Management, & Sharia Sistem, h.679.

Misal Bapak A memiliki deposito nominal Rp 10.000.000,00. Jangka waktu 1 bulan (1 Januari 2015 – 1 Februari 2015), dengan nisbah : Deposan 57% : Bank 43% . Jika keuntungan yang diperoleh untuk deposito 1 bulan sebesar Rp 30.000.000,00 dan rata-rata saldo deposito jangka waktu 1 bulan adalah Rp 950.000.000,00. Berapa keuntungan yang diperoleh Bapak A?<sup>148</sup> berdasarkan *Profit Sharing* (bagi laba) dan berdasarkan bunga efektif jika tingkat bunga 20%.  
Penyelesaian soal :

1). *Profit Sharing* (bagi laba)

Dalam hal ini  $I_i = \text{Rp } 10.000.000,00$ ,  $I_t = \text{Rp } 950.000.000,00$ ,  $P_t = \text{Rp } 30.000.000,00$ , dan  $P_r = 57\%$ .

$$P_i = \frac{I_i}{I_t} \times P_t \times P_r = \frac{10.000.000}{950.000.000} \times 30.000.000 \times 57\%$$

$$P_i = 315.789,47 \times 0,57$$

$$P_i = \text{Rp } 179.999,99 = \text{Rp } 180.000,00 \text{ (pembulatan).}$$

2). Bunga Efektif (Be)

Dalam hal ini  $N = \text{Rp } 10.000.000,00$ ,  $i = 20\%$ .  $J_w = 31$  hari,  $PPh = 20\%$ .

$$Be = \frac{N \cdot i \cdot J_w}{365} - PPh = \frac{10.000.000 \times 20\% \times 31}{365} - 20\%^{149}$$

$$Be = \frac{62.000.000}{365} - 20\%$$

$$Be = \text{Rp } 169.863,00 - \text{Rp } 33.972,6 = \text{Rp } 135.890,4$$

$$Be = \text{Rp } 136.000,00 \text{ (pembulatan).}$$

Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai *manager Investasi*, maksudnya adalah bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar-kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana (shahibul maal) yang dihimpun

<sup>148</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, h. 144.

<sup>149</sup>Veithzal Rivai, Bank and Financial Institution Management, & Sharia Sistem, h. 419.

sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Fungsi ini tidak banyak diketahui, dimengerti dan dipahami oleh para bankir yang bekerja di bank syariah (bukan bankir syariah), yang kebanyakan masih mempergunakan paradigma pola kerja bank konvensional<sup>150</sup>.

## 7. Keterkaitan Bagi Hasil Terhadap Funding

Dari penyelesaian soal yang sama (soal di atas) ternyata penghitungan keuntungan dengan pendekatan rumus *Profit Sharing* (bagi laba), Tuan A memperoleh keuntungan Rp 179.999,99 = **Rp 180.000,00** (pembulatan). Sedangkan dengan menggunakan rumus bunga efektif (Be) Tuan A memperoleh keuntungan sebesar Rp 135.890,4 = **Rp 136.000,00** (pembulatan).

Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*)<sup>151</sup>. Bank Syariah memberi keuntungan kepada deposan dengan pendekatan LDR (Loan to Deposit Ratio), yaitu mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dan pembayaran yang diberikan. Dalam perbankan syariah, LDR bukan saja mencerminkan keseimbangan, tetapi juga keadilan karena bank benar-benar membagikan hasil riil dari dunia usaha (loan) kepada penabung (deposit)<sup>152</sup>.

Deposito nominal Rp 10.000.000,00 satu bulan di Bank Syariah dengan nisbah bagi hasil Deposan 57 % ; Bank 43 % dan di Bank Konvensional dengan suku bunga 20 %, jika keuntungan yang diperoleh untuk deposito 1 bulan sebesar Rp 30.000.000,00 dan rata-rata saldo deposito jangka waktu satu bulan adalah Rp 950.000.000,00. Ternyata di Bank Syariah memberikan keuntungan

<sup>150</sup>DSN – MUI, Kumpulan Fatwa Edisi Ketiga, h. 5-6.

<sup>151</sup>Sofyan S. Harahap, Akuntansi Perbankan Syariah Edisi Revisi, h. 75.

<sup>152</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, h. 145.

bagi deposit sebesar Rp 180.000 dan di Bank Konvensional memberikan keuntungan sebesar Rp 169.863<sup>153</sup>.

Dengan pendekatan rumus *Profit Sharing* (bagi laba) dalam penyelesaian soal ini, ternyata lebih menguntungkan dibanding dengan menggunakan rumus bunga efektif. Dari paparan teori di atas menyatakan bahwa bagi hasil bank syariah memberikan keuntungan. Fakta ini dapat dijadikan sebagai alat bukti bahwa : Bagi hasil di bank syariah menguntungkan secara signifikan, sehingga merupakan daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di bank syariah. Atau dengan kata lain : Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap *Funding* Bank Syariah.

#### **D. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

*Muhammad Abduh Isma* (2013) dalam tesisnya yang berjudul : “Pengaruh Pendapatan , Bagi Hasil, Pengetahuan Dan Religi Mahasiswa Terhadap Tabungan Di Bank Syariah” menyimpulkan bahwa : Nilai koefisien pendapatan sebesar 4,332, artinya jika pendapatan meningkat 1% maka jumlah tabungan mahasiswa IAIDU dan UNA di bank syariah akan meningkat sebesar 4,332% dan nilai  $t_{hitung}$  pendapatan = 3,747, maka diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $3,747 > 2.00$ . Signifikansi pada variabel pendapatan adalah 0,001 dan masih  $< 0,005$  artinya dari hasil uji  $t$  tersebut bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan atau diperoleh bahwa  $H_0$  ditolak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian *Amin Al Jawi* bahwa pendapatan berpengaruh terhadap minat menabung mahasiswa, artinya makin tinggi pendapatan mahasiswa baik pendapatan yang didapat dari kiriman orang tua atau dari pendapatan pribadi nasabah maka makin tinggi peluang mahasiswa

---

<sup>153</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h. 159.



menabung. pendapatan berpengaruh positif dan signifikan atau diperoleh bahwa  $H_0$  ditolak.

*Rina Ardiany* (2010) dalam tesisnya yang berjudul : “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Pendapatan, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Peningkatan Simpanan Mudharabah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung” menyimpulkan bahwa : Secara bersama-sama pengaruh dari semua variabel bebas (tingkat bagi hasil, tingkat pendapatan, dan tingkat inflasi) dapat dijelaskan sebesar 83,4% sedangkan sisanya sebesar 16,6% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk didalam model estimasi ini. Selain itu secara parsial masing-masing variabel tersebut juga berpengaruh secara nyata terhadap simpanan mudharabah. Kecuali variabel tingkat inflasi yang berpengaruh sedikit terhadap simpanan mudharabah. Dari hasil analisis diperoleh secara serempak F- hitung sebesar 30,5008 lebih besar bila dibandingkan dengan F – tabel yaitu sebesar 2,95. Secara parsial masing-masing variabel adalah : Tingkat pendapatan t-hitung sebesar 5,709 > t-tabel sebesar 2,000. Tingkat inflasi t-hitung sebesar 0,115 < t-tabel sebesar 2,000. Hanya variabel tingkat bagi hasil dan tingkat pendapatan saja yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap simpanan mudharabah pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung, variabel tingkat inflasi memiliki pengaruh positif walaupun kurang signifikan (tidak sampai 1 %).

*Amina Lainutu*, bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan analisis regresi linear sederhana yang dilakukan diperoleh hasil jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Diperoleh juga sebuah hubungan yang cukup kuat antara jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi dan penerimaan PPh Pasal 21. Penelitian ini memiliki korelasi yang identik dengan “Pengaruh Jumlah Jaringan Kantor terhadap Funding Bank Syariah di Indonesia”. Hal ini berarti bahwa, Jumlah Jaringan Kantor berpengaruh signifikan terhadap Funding Bank Syariah di Indonesia. Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar<sup>154</sup> : yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*) dan produk jasa (*service*).

#### **E. Konstruksi Model Penelitian**

Memperhatikan dan menganalisis variabel – variabel penelitian ini dengan variabel – variabel independen terdiri dari : Pendapatan Nasional (PDB) sebagai variabel X1, Inflasi sebagai variabel X2, Bagi Hasil sebagai variabel X3, Jumlah Jaringan Kantor sebagai variabel X4 serta Funding sebagai dependen variabel (variabel terikat). Sadono Sukirno menyatakan : Dalam perekonomian terbuka keseimbangan akan tercapai apabila :  $Y + M = C + I + G + X$  atau  $Y = C + I + G + (X - M)$ <sup>155</sup>. Aliran perbelanjaan atau pendapatan yang keluar dari sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka meliputi, tabungan, pajak dan impor<sup>156</sup>. Selain itu perhitungan pendapatan nasional juga berguna untuk

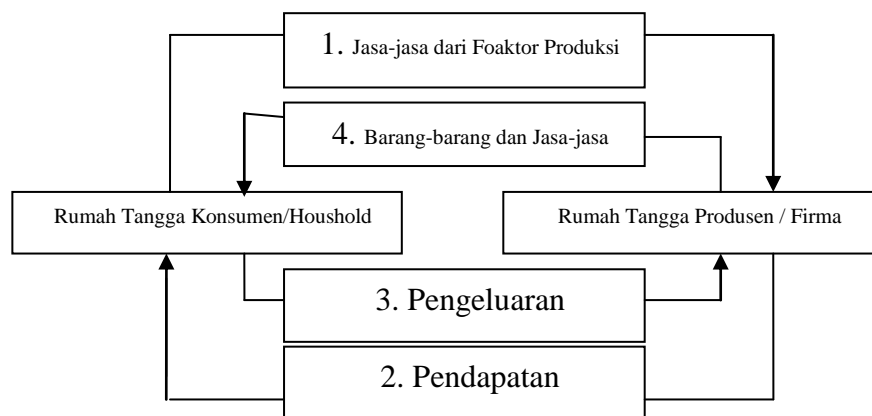
---

<sup>154</sup>M. Nur, Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis, h. 133.

<sup>155</sup>Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga, h. 210.

<sup>156</sup>Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga, h. 223.

menerangkan kerangka kerja hubungan antara variable makroekonomi, yaitu output, pendapatan, dan pengeluaran seperti terlihat pada gambar berikut<sup>157</sup>.



**Bagan 2.3 : Arus Pendapatan dan Pengeluaran**

Multiplier : Suatu angka yang menunjukkan sejauh mana pendapatan nasional akan berubah efek dari perubahan dalam pengeluaran agregat. Apabila  $\Delta AE = Rp\ 1000$  dan menyebabkan  $\Delta Y = Rp\ 4000$ , maka multiplier = 4. Pendapatan disposebel : Pendapatan yang sebenarnya diperoleh rumah tangga dan dapat digunakan untuk membeli barang atau ditabung. Pendapatan yang tidak diperoleh rumah tangga meliputi pajak pendapatan dan kontribusi untuk dana pensiun<sup>158</sup>.

berdasarkan pembuktian  $APC + APS = 1$ ,  $MPC + MPS = 1$ , serta  $APC$  dapat bernilai 1 bila  $APS = 0$ .  $MPC$  juga dapat bernilai 1 bila  $MPS = 0$  demikian juga berlaku sebaliknya. Dapat diprediksi bahwa ketika  $MPS$  meningkat pertambahan keinginan menabung juga bertambah /meningkat, hal ini bermakna pula bahwa DPK yang terhimpun di bank (funding) bertambah pula jumlahnya dan ada kecenderungan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang modal (*investasi*) . Sebagaimana penjabaran rumus ekonomi dua sektor  $Y = C + I$  dan  $Y$

<sup>157</sup>Nurul Huda, dan Kawan-kawan, Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoretis, h. 21.

<sup>158</sup>Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga, h. 146.

+ C + S, maka  $I = S$ , atau investasi = *saving* (tabungan). Pandangan Keynes mengenai, permintaan dan penawaran uang, penentuan suku bunga, dan peranan uang dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Ada tiga tujuan untuk meminta uang, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi (dalam ekonomi Islam, tidak ada spekulasi)<sup>159</sup>. Menurut *Cambridge* yang diwakili oleh Marshall dan Pigou uang adalah merupakan alat penyimpan kekayaan (*store of wealth*) dan bukan sebagai alat pembayaran. Teori permintaan uang menurut *Cambridge* menyatakan bahwa permintaan uang tunai dipengaruhi oleh tingkat bunga, jumlah kekayaan yang dimiliki, harapan tingkat bunga di masa yang akan datang, dan tingkat harga, Namun dalam jangka pendek factor-faktor tersebut bersifat konstan atau berubah secara proporsional terhadap pendapatan<sup>160</sup>.

Dengan measumsi bahwa funding adalah produk perbankan syariah yang fungsinya sebagai muara aliran dana masyarakat, terutama pendapatan nasional (PDB). Dimana dalam PDB terdiri dari komponen , Konsumsi (C), Investasi (I), Tabungan/saving (S), dan pajak,taks (T). Arus Pendapatan dan Pengeluaran pada bagan 3 menerangkan kerangka kerja hubungan antara variabel makro ekonomi, yaitu output pendapatan dan pengeluaran<sup>161</sup>. Adanya alat ukur yang mampu mengantisipasi kenaikan harga yang disebut dengan indeks harga, yang terdiri dari, Indeks harga konsumen atau *consumer price index* (CPI), Indeks harga produsen atau *producer price index* (PPI), dan GDP deflator (*Deflator GDP*). Indeks harga biasanya digunakan untuk melihat perkembangan perekonomian atau laju inflasi yang terjadi dalam suatu negara. Laju inflasi (LI) dapat dihitung dengan rumus :

<sup>159</sup>Nurul Huda, dan Kawan-kawan, *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoretis*, h. 83-84.

<sup>160</sup>Nurul Huda, dan Kawan-kawan, *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoretis*, h. 82.

<sup>161</sup>Nurul Huda, dan Kawan-kawan, *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoretis*, h. 21

$$LI = \frac{IHK_t - IHK_{(t-1)}}{IHK_{(t-1)}} \times 100 \% ; \quad IHK_t = \text{indeks harga konsumen sekarang, } IHK_{(t-1)}$$

= indeks harga konsumen sebelumnya, dan LI = laju inflasi. Misalkan IHK tahun 2015 = 109 dan IHK tahun 2014 = 100, maka laju inflasi pada tahun 2015 adalah :

$$LI = \frac{109-100}{100} \times 100 \% = 9 \%. \quad \text{Suku bunga ditentukan oleh penawaran dan}$$

permintaan uang. Kenaikan harga-harga yang tidak berjalan secara sewajarnya oleh karena pemerintah membuat peraturan dan undang-undang untuk menyekat kenaikan harga dinamakan inflasi tertekan. Kenaikan harga-harga di mana pemerintah tidak campur tangan langsung untuk mengendalikan harga dinamakan inflasi terbuka<sup>162</sup>.

Prediksi bahwa ketika MPS meningkat, pertambahan keinginan menabung juga bertambah /meningkat, hal ini bermakna pula bahwa DPK yang terhimpun di bank (funding) bertambah pula jumlahnya dan ada kecendrungan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang modal (*investasi*) . Dalam hal ini pendapatan nasional tidak hanya mempengaruhi funding secara parsial tetapi berpengaruh juga terhadap, inflasi, bagi hasil, dan jumlah jaringan kantor , tetapi secara bersama-sama (simultan), Pendapatan Nasional (PDB), Inflasi (IFL), Bagi Hasil (BHS), dan Jumlah Jaringan Kantor (JJK) mempengaruhi Funding sebagai variabel dependen. Ketika pendapatan nasional naik (melimpah), maka limpahan dana sebagai refleksi dari kenaikan pendapatan sebagian besar juga mengalir ke Funding, sebaliknya jika pendapatan nasional menurun, maka sedikit pula dana yang mengalir ke Funding. Naik turunnya pendapatan nasional tidak hanya berpengaruh kepada Funding, tetapi juga kepada inflasi, bagi hasil, dan juga

---

<sup>162</sup>Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga, h. 355.

jumlah jaringan kantor, dalam hal ini PDB memiliki pengaruh dominan. Ketika harga barang dan jasa naik (terjadi inflasi), menyebabkan daya beli uang menurun dan aliran dana ke funding juga mengecil, karena sebagian besar uang yang ditabung untuk memenuhi konsumsi, sebaliknya jika harga barang dan jasa turun (tidak terjadi inflasi). menyebabkan daya beli uang naik dan kelebihan dana yang dimiliki cenderung ditabung untuk berjaga-jaga atau di investasikan dalam bentuk deposito maupun giro, sehingga aliran dana ke funding juga membesar. Ketika nisbah bagi hasil yang ditawarkan bank syariah tinggi, cenderung menarik minat investor untuk menginvestasikan uangnya ke bank syariah sehingga aliran dana ke funding juga naik, sebaiknya jika nisbah bagi hasil yang ditawarkan kecil cenderung investor tidak tertarik untuk berinvestasi ke bank syariah karenanya aliran dana ke funding mengecil.

Investasi tetap secara langsung menentukan investasi riil (*real investment*) atau investasi langsung (*direct investment*) yakni investasi yang secara langsung berkaitan dengan produksi, berupa pendirian pabrik, pengadaan teknologi baru, termasuk investasi asing langsung (FDI, *Foreign Direct Investment*) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dari berbagai negara selama ini merupakan kekuatan utama yang menggerakkan perekonomian di Asia Pasifik<sup>163</sup>.

Bertambahnya jumlah jaringan kantor bank menyebabkan komunikasi masyarakat ke bank lebih mudah, lebih dekat, aman dan nyaman karenanya memudahkan akad transaksi terjadi yang pada akhirnya menaikkan aliran dana ke funding, sebaliknya berkurangnya jumlah jaringan kantor bank menyebabkan berkurangnya aliran dana ke funding. Selanjutnya disebabkan oleh karena :

---

<sup>163</sup>Faisal Baasri, Haris Munandar, Lanskap Ekonomi Indonesia, h. 9.

1. Tercapainya keseimbangan perekonomian terbuka apabila  $Y + M = C + I + G + X$  atau  $Y = C + I + G + (X - M)$ , merupakan sirkulasi aliran pendapatan, dan  $Y$  merupakan dominator pendapatan.
2. Terlalu banyak uang yang memburu barang yang terlalu sedikit menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang<sup>164</sup>. Indeks harga berupa, *consumer price index* (CPI), indeks harga produsen atau *producer price index* (PPI), dan GDP deflator (*Deflator GDP*) biasanya digunakan untuk melihat perkembangan perekonomian atau laju inflasi yang terjadi dalam suatu negara, dimana Laju inflasi (LI) =  $\frac{IHK_t - IHK_{(t-1)}}{IHK_{(t-1)}} \times 100 \%$ , berbanding terbalik dengan harga kemaren maupun Funding.
3. Konsep *Profit Sharing* (bagi laba)  $P_i = \frac{I_i}{I_t} \times P_t \times P_r$  ternyata lebih menguntungkan dibanding dengan menggunakan rumus bunga efektif  $Be = \frac{N.i. Jw}{365} - PPh$ . Bank Syariah memberi keuntungan kepada deposan dengan pendekatan LDR (Loan to Deposit Rastio), yaitu mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dan pembayaran yang diberikan. Dalam perbankan syariah, LDR bukan saja mencerminkan keseimbangan, tetapi juga keadilan karena bank benar-benar membagikan hasil riil dari dunia usaha (loan) kepada penabung (deposit). Adanya nisbah bagi hasil yang dapat bersaing dengan bunga merupakan daya tarik bagi nasabah untuk menabung maupun berinvestasi lainnya yang pada gilirannya menaikkan funding di bank syariah.
4. Pernyataan praktisi perbankan tentang kecenderungan dana pihak ketiga (DPK) maupun aset yang terus meningkat sejalan dengan perkembangan bank syariah yang semakin banyak jumlahnya.

---

<sup>164</sup>Nurul Huda, dan Kawan-kawan, *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoretis*, h. 175.

Statistik OJK yang menunjukkan pertambahan jumlah jaringan kantor berbanding lurus dengan pertumbuhan asset bank syariah khususnya funding. Meskipun kontribusi pembiayaan bank syariah terhadap bank konvensional hanya mencapai 1,16 %, dalam perkembangannya hal ini menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 60% setiap tahun<sup>165</sup>. Jumlah Jaringan Kantor produk Statistik OJK periode 2009-2015 yang cenderung naik (meningkat) kecuali pada tahun 2015 mengalami penurunan sejumlah 7 satuan kantor.

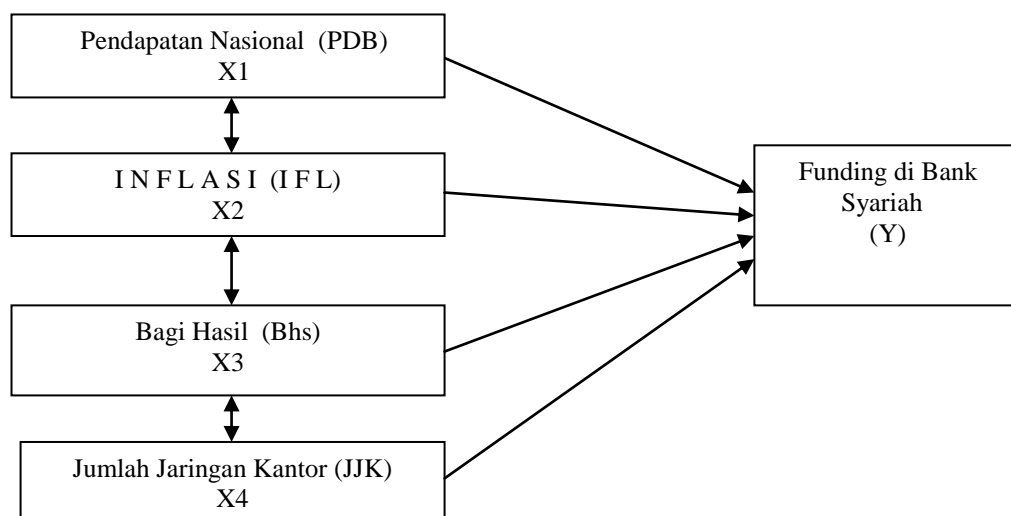
5. Hasil penelitian terdahulu diperoleh bahwa, Secara bersama-sama dari tingkat bagi hasil, tingkat pendapatan, dan tingkat inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap tabungan. Berdasarkan analisis regresi linear sederhana yang dilakukan diperoleh hasil jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Diperoleh juga sebuah hubungan yang cukup kuat antara jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi dan penerimaan PPh Pasal 21. Penelitian ini memiliki korelasi yang identik dengan “Pengaruh Jumlah Jaringan Kantor terhadap Funding Bank Syariah di Indonesia”. Hal ini berarti bahwa, Jumlah Jaringan Kantor berpengaruh signifikan terhadap Funding Bank Syariah di Indonesia.

Fenomena - fenomena serta asumsi sebagaimana telah dikemukakan di atas perlu adanya konstruksi model penelitian (KMP) yang merupakan panduan penelitian ini. Sebagai refleksi dari kerangka pemikiran peneliti, maka dibuat dalam suatu diagram alur (bagan) sebagai berikut :

---

<sup>165</sup>Veithzal Rivai, Bank and Financial Institution Management, & Sharia Sistem, h. 745.





**Bagan 2.4 : Kerangka Pemikiran**

## F.Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dikemukakan di atas, juga sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sehingga terbukti melalui data yang dihimpun secara objektif, maka peneliti mengajukan dua hipotesis sebagai anggapan dasar yang sesuai terhadap judul penelitian. Hipotesis nol (*null hypotheses*) disingkat dengan  $H_0$ , sering juga disebut hipotesis statistis, karena biasanya dipakai dalam penelitian yang bersifat statistis. Hipotesis nol menyatakan tidak adanya perbedaan antara dua variabel, atau tidak adanya pengaruh variabel  $X$  terhadap variabel  $Y$ <sup>166</sup>. Hipotesis dimaksud adalah Hipotesis Penelitian/Kerja (**H<sub>a</sub>**) dan Hipotesis Operasional (**H<sub>o</sub>**)<sup>167</sup>. Kedua hipotesis ini merupakan prasarat yang mesti dipenuhi dalam suatu penelitian.

<sup>166</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h. 65.

<sup>167</sup>Syofian Siregar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), h.66.

Rumusan kedua hipotesis dimaksud peneliti rumuskan, dan dinyatakan sebagai berikut :

1. Ho: Tidak ada pengaruh Pendapatan terhadap Funding di Bank Syariah.  
Ha: Ada pengaruh Pendapatan terhadap Funding di Bank Syariah.
2. Ho: Tidak ada pengaruh Inflasi terhadap Funding di Bank Syariah.  
Ha: Ada pengaruh Inflasi terhadap Funding di Bank Syariah.
3. Ho: Tidak ada pengaruh Bagi Hasil terhadap Funding di Bank Syariah.  
Ha: Ada pengaruh Bagi Hasil terhadap Funding di Bank Syariah.
4. Ho: Tidak ada pengaruh Jumlah Jaringan Kantor terhadap Funding di Bank Syariah.  
Ha: Ada pengaruh Jumlah Jaringan Kantor terhadap Funding di Bank Syariah.

Hipotesis tidak lain dari jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau yang ingin kita pelajari, diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja dan panduan dalam verifikasi<sup>168</sup>. Dalam pembuktian, hipotesis alternatif (Ha) diubah menjadi Ho, agar peneliti tidak mempunyai prasangka. Jadi peneliti diharapkan jujur, tidak terpengaruh pernyataan Ha. Kemudian dikembalikan lagi ke Ha pada rumusan akhir pengujian hipotesis<sup>169</sup>. Peneliti menetapkan probabilitas kekeliruan atau taraf signifikansi ( $\alpha$ ) pada penelitian ini sebesar 5 % atau 0,05.

---

<sup>168</sup>Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), h. 182.

<sup>169</sup>Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 66.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*), menggunakan data kuantitatif yaitu data yang berwujud angka/bilangan<sup>170</sup>. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel bebas Pendapatan, Inflasi, Bagi Hasil, dan Jumlah jaringan kantor terhadap variabel terikat berupa Funding, digunakan data sekunder, melalui regresi berganda dilihat korelasinya dengan uji klasik dan uji statistik menggunakan software Eviews.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah beberapa lembaga pemerintah yang berkaitan dengan lembaga keuangan, terutama Lembaga Keuangan Bank (LKB), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pusat Statistik (BPS), karena lembaga-lembaga tersebut diyakini secara periodik mempublikasikan data tentang pendapatan, data inflasi, pendapatan bagi hasil, dan data jumlah jaringan kantor bank syariah, serta data statistik Funding Bank Syariah di Indonesia secara *on line*. Pembuatan rancangan penelitian dilakukan akhir tahun 2015 dan penelitiannya dilaksanakan pada awal April sampai Juli 2016, prediksi pengolahan, analisis data dan *finishing* pada September 2016.

---

<sup>170</sup>Nana, Danapriatna dan Romy Setiawan, *Pengantar Statistik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 61

### C. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah Bank Syariah di Indonesia. Masa beroperasinya baru kira-kira 25 tahun, atau subjeknya kurang dari 100. Satu hal yang juga perlu diperhatikan adalah : Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10 – 15% atau 20 – 25% atau lebih. Untuk penelitian yang risikonya besar tentu saja jika sampelnya besar hasilnya akan lebih baik (Suharsimi Arikunto)<sup>171</sup>. Berdasarkan pendapat tersebut jumlah populasi ( $N$ ) = 25, jika tingkat kesalahan ( $\sigma$ ) diperkirakan = 5%, maka jumlah sampel yang dapat ditarik dengan menggunakan teknik *Solvin* :  $n = \frac{N}{1+N\sigma^2}$ , dimana,  $n$  = sampel,  $N$  = populasi, dan  $\sigma$  = perkiraan tingkat kesalahan<sup>172</sup>, adalah :

$$n = \frac{N}{1+N\sigma^2}$$

$$n = \frac{25}{1+25(0,05)^2} = \frac{25}{1+0,0625}$$

$$n = \frac{25}{1,06} = 23,58 \text{ tahun, } n = 24 \text{ (dibulatkan).}$$

### D. Defenisi Operasional

Untuk memberikan kemudahan dalam menafsirkan variabel-variabel yang digunakan, diperlukan penjabaran definisi operasional variabel sebagai berikut :

#### Variabel Independen ( $X_1$ ) : Pendapatan

Pendapatan nasional (PDB/GDP) adalah nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun tertentu.

---

<sup>171</sup> Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), ed. 6, h. 134.

<sup>172</sup> Syofian Siregar, *Statistik Parametrik : Untuk Penelitian Kuantitatif*, h. 61.

### **Variabel Independen ( $X_2$ ) : Inflasi**

Inflasi/*inflation* (IFL) adalah tidak setabilnya harga barang/jasa secara terus menerus dalam waktu yang panjang yang berakibat menurunnya nilai uang atau proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus / proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu.

### **Variabel Independen ( $X_3$ ) : Bagi Hasil**

Bagi hasil (Bhs) adalah merupakan sistem pembagian hasil usaha (keuntungan maupun kerugian) yang dibagi berdasarkan rasio/nisbah dalam bentuk persentase atau porsi bagi hasil dan disepakati bersama di awal akad.

### **Variabel Independen ( $X_4$ ) : Jumlah Jaringan Kantor**

Jumlah jaringan kantor (JJk) adalah rasio/perbandingan jumlah kantor dimasa sekarang terhadap jumlah kantor di masa sebelumnya serta efek yang ditimbulkannya terhadap pelayanan nasabah dan jumlah dana masyarakat yang dapat dihimpun karenanya.

### **Variabel Dependen ( $Y$ ) :**

Funding Bank Syariah (FS), adalah penghimpunan dana masyarakat oleh Bank Syariah berupa tabungan, deposito, dan giro yang biasa disebut dana pihak ketiga (DPK), serta perubahan jumlah yang dialaminya selama periode 10 tahun.

## **E. Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memperoleh, mengolah dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari para responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang sama. Instrumen yang baik paling tidak memenuhi lima kriteria, yaitu validitas,

reliabilitas, sensitivitas, objektivitas dan fisibilitas<sup>173</sup>. Dalam hal ini yang berfungsi sebagai instrumen pengumpul data adalah definisi operasional. Data sekunder, yaitu data baku yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya, dapat diaring, dipilah dan dipilih oleh definisi operasional sesuai dengan data yang diperlukan. Metode mengumpulkan data dengan observasi ini memperbolehkan si pengamat mengubah perilaku atau suasana tanpa mengganggu kewajarannya<sup>174</sup>. Mengubah perilaku atau suasana tanpa mengganggu kewajarannya dapat dimaknai sebagai memanipulasi data. Data yang telah dipilah dan dipilih dapat diolah dengan *software* SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) maupun *software* *views*.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan model matematika untuk meestimasi regresi variabel-variabel yang ada dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square*). Model dimaksud diformulasikan dalam persamaan regresi linear ganda sebagai berikut :  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$  atau  $FS = a + b_1PDB + b_2IFL + b_3Bhs + b_4JJk$ , dimana FS = Funding bank syariah, PDB = Pendapatan nasional, IFL = Inflasi, Bhs = Bagi hasil, JJk = Jumlah jaringan kantor, a = Konstanta (*Intecept*), e = error term, b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub>, b<sub>4</sub> = Koefisien regresi dari masing-masing variabel yang mempengaruhi Funding. *Ordinary Least Square* (OLS) bertujuan mengetahui hubungan antara suatu variabel dependen dan variabel independen, apabila terdapat beberapa variabel

---

<sup>173</sup>Syofian Siregar, Statistik Parametrik : Untuk Penelitian Kuantitatif, h. 75.

<sup>174</sup>Syofian Siregar, Statistik Parametrik : Untuk Penelitian Kuantitatif, h. 42.

independen. Untuk analisis data akan dilakukan dengan bantuan pemrograman oleh Eviews . Keunggulan Eviews terletak pada kemampuannya untuk mengolah data yang bersifat *time series*<sup>175</sup>. Atau dengan kata lain *software Eviews* digunakan untuk menganalisis secara akurat ada tidaknya pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara simultan (bersama-sama) maupun secara parsial (masing-masing). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pada umumnya terdiri dari dua alat uji penting. Dua alat uji dimaksud terdiri dari:

1. Uji Asumsi Dasar / Klasik                      dan                      2. Uji Statistik.

### **1. Uji Asumsi Dasar / Klasik**

Uji asumsi dasar digunakan untuk mengetahui pola dan varian serta kelinearitasan dari suatu populasi (data). Apakah populasi atau data berdistribusi normal atau tidak atau populasi memiliki beberapa varian yang sama dan untuk menguji kelinearitasan data. Uji asumsi dasar secara umum terdiri dari :

#### **a. Uji Normalitas**

Tujuan uji normalitas terhadap serangkaian data adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Jika distribusi data normal uji statistiknya berjenis parametrik. Untuk distribusi data yang tidak normal maka uji statistiknya adalah nonparametrik. Normalitas data dapat dilihat dengan beberapa cara diantaranya, dengan uji *Jarque-Bera* atau Histogram Test<sup>176</sup>. Langkah –langkah pengujiannya adalah sebagai berikut : Bila probabilitas *Jarque-Bera*  $> 0,05$  Signifikan. Bila probabilitas *Jarque-Bera*  $< 0,05$  Tidak Signifikan.

---

<sup>109</sup>Wing, Wahyu Winarno, Analisis Ekonometrika dengan Eviews, (Yogyakarta : Unit Penerbitan dan Percetakan, cet I, 2007), h.1.2.

<sup>176</sup>Dermawan Wibisono, Riset Bisnis : Bantuan pada Praktisi dan Akademisi, (Jakarta : PT. Gramidika Pustaka Utama, 2003), h. 537.

### b. Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolineritas untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang sempurna atau tidak sempurna di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan. Multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat korelasi antar variabel independen. Jika diantara peubah-peubah bebas yang digunakan sama sekali tidak berkorelasi satu dengan yang lain maka bisa dikatakan bahwa tidak terjadi multikolineritas<sup>177</sup>. Jika pengujian multikolineritas dilakukan dengan menggunakan *correlation matrix* hasilnya ada yang melebihi dari 0,8 itu menandakan bahwa terjadi multikolineritas yang serius. Dan jika terjadi multikolineritas yang serius maka akan berakibat buruk, karena hal tersebut akan mengakibatkan pada kesalahan standar estimator yang besar<sup>178</sup>.

### c. Uji Heterokedasitas

Uji heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heterokedasitas adalah varian residual yang tidak konstan pada regresi sehingga akurasi hasil prediksi menjadi meragukan<sup>179</sup>. Jika *varians* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika *varians* tidak konstan atau berubah-ubah disebut dengan heterokedastisitas. Pendeteksian dengan Uji white dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : Hipotesis : Bila probabilitas  $\text{Obs}^* R_2 > 0,05$  Signifikan. Bila probabilitas  $\text{Obs}^* R_2 < 0,05$  Tidak signifikan. Apabila probabilitas  $\text{Obs}^* R_2 > 0,05$  maka model disebut

---

<sup>177</sup>Erlina, Metodologi Penelitian, (Medan : Gedung F, Pusat Sistem Informasi /PSI Kampus USU, 2011), h. 93.

<sup>178</sup> Damodar Gujarati, Dasar-Dasar Ekonometrika, (Jakarta : Erlangga, 2006), h. 68.

<sup>179</sup> Damodar Gujarati, Dasar-Dasar Ekonometrika, h. 106.



tidak terdapat heterokedasitas . Apabila probabilitas  $Obs^*R_2 < 0,05$  maka model tersebut dipastikan terdapat heterokedasitas. Dalam hal ini adanya *varians* residual konstan (tetap) maupun *varians* residual tidak tetap (*in konstan*) dapat dikatakan sangat berpengaruh, terutama mempengaruhi terhadap eksistensi homokedastisitas maupun heterokedastisitas.

#### **d. Uji Autokorelasi**

Autokorelasi adalah korelasi antara sesama urutan pengamatan dari waktu ke waktu, atau suatu keadaan dimana telah terjadi korelasi antara residual tahun itu dengan tingkat kesalahan tahun sebelumnya. Untuk melihat ada atau tidaknya penyakit autokorelasi dapat digunakan *Uji Breusch-Godfrey* atau dapat juga dengan *Uji Langrange multiplier (LM-Test)*, yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas *R-squared* dengan  $\alpha = 5\%$ . Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut : Hipotesis ; Bila probabilitas  $Obs^*R_2 > 0,05$  Signifikan. Bila probabilitas  $Obs^*R_2 < 0,05$  tidak signifikan. Apabila Bila probabilitas  $Obs^*R_2 < 0,05$  maka model tersebut terdapat autokorelasi.

#### **1). Uji Linieritas**

Uji linearitas dilakukan adalah untuk mengetahui apakah antara variabel tak bebas (Y) dan variabel bebas (X) mempunyai hubungan linear. Untuk mengetahui suatu model linear atau tidak, dapat dilakukan dengan uji Ramsey (RESET), yaitu dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : Bila probabilitas  $Obs^*R_2 > 0,05$  maka signifikan (model linear). Bila probabilitas  $Obs^*R_2 < 0,05$  maka tidak signifikan (model tidak linear).

## 2. Uji Statistik

Data yang dipergunakan untuk mengetahui hubungan dari variabel-variabel data penelitian dapat menggunakan tiga macam Uji-Statistik, yaitu :

- a. Uji - Parsial (Uji-t)                      b. Uji - Simultan (Uji-F)                      c. Uji – Determinasi.

### a. Uji Parsial (Uji – t)

Uji-t menunjukkan tingkat signifikan pengaruh satu variable penjelas dalam persamaan regresi<sup>180</sup>. Uji-t statistic adalah uji parsial (individu) dimana uji ini digunakan untuk menguji berapa baik variabel bebas dapat menjelaskan variable terikat secara individu pada tingkat signifikan 5% dengan menganggap variabel bebas bernilai konstan. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk uji-t adalah sebagai berikut<sup>181</sup>.

Hipotesis :    Bila probabilitas  $b_I > 0,05$  Tidak signifikan.

Bila probabilitas  $b_I < 0,05$  Signifikan.

### b. Uji – F (Uji Secara Bersama-sama)

Uji-F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variable terikat pada tingkat signifikansi 0,05<sup>182</sup>. Pengujian semua koefisien regresi secara bersama-sama dilakukan dengan uji-f melalui cara sebagai berikut<sup>183</sup> : Bila probabilitas  $b_I > 0,05$

---

<sup>180</sup> Asnawi & Chandra Wijaya, Riset Keuangan , h. 260.

<sup>181</sup> Nachrowi, dkk, Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan, (Jakarta : Fakultas Ekonomi UI, 2006), h. 18-19.

<sup>182</sup> Nachrowi, dkk, Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan, h. 261.

<sup>183</sup> Nachrowi, dkk, Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan, h. 17.

Hipotesis tidak signifikan. Bila probabilitas  $b_1 < 0,05$  Hipotesis signifikan. Nilai probabilitas dalam hal ini sangat menentukan signifikan atau tidaknya hipotesis.

### c. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Nilai koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi dari variabel terikat (Y) dapat dijelaskan oleh variabel bebas (X)<sup>184</sup>. Bila nilai koefisien sama dengan nol (*Adjusted R<sub>2</sub> = 0*), artinya variasi dari variabel Y tidak dapat dijelaskan oleh variabel X sama sekali. Bila  $R_2 = 1$ , artinya variasi dari variabel Y secara keseluruhan dapat dijelaskan oleh variabel X. Atau jika  $R_2$  mendekati 1 maka variabel bebas mampu menjelaskan perubahan variabel terikat, tetapi jika  $R_2$  mendekati 0, maka variabel bebas tidak mampu menjelaskan perubahan variabel terikat. Bila *Adjusted R<sup>2</sup> = 1*, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik buruknya persamaan regresi ditentukan oleh *Adjusted R<sub>2</sub>* yang mempunyai nilai nol atau satu<sup>185</sup>. Koefisien determinasi majemuk ( $R_2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat<sup>186</sup>. Nilai koefisien determinasi berada antara 0 sampai 1. Dalam hal ini peranan *Adjusted R<sup>2</sup>* sangat menentukan terkait dengan variabel-variabel independen penelitian. Artinya semakin besar nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* (*mendekati 1*), variabel-variabel independen semakin dapat menjelaskan eksistensi dari variabel dependen. Sebaliknya kemampuan variabel independen semakin kabur (tak jelas) dalam menjelaskan eksistensi dari variabel dependen (variabel terikat/tak bebas).

---

<sup>184</sup> Atmaja Lukas, *Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2009), h. 173.

<sup>185</sup> Atmaja Lukas, *Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi*, h. 173.

<sup>186</sup> Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi : Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*, (Jakarta : Erlangga, 2003), h. 240.

## BAB. IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Deskripsi Data

Wilayah *independent variable* penelitian ini berupa makro ekonomi yang terdiri dari pendapatan nasional (PDB), inflasi (IFL), bagi hasil (Bhs), dan jumlah jaringan kantor (JJk) serta dependen variabel yaitu dana funding di bank syariah (FS). Pendapatan (*revenue*) dan variabel bebas lainnya merupakan data periodik pertahun (*time series*). Pendapatan Nasional dipandang sebagai sumber (*resource*) income bagi industri lainnya terutama industri keuangan, terkhusus bagi perbankan. Ada pengaruh antara pendapatan dengan, inflasi, bagi hasil, dan jumlah jaringan kantor yang pada akhirnya mempengaruhi aliran dana pihak ketiga (DPK) atau *funding*, dalam penelitian ini Funding Bank Syariah di Indonesia dianggap sebagai muara aliran dana. Dapat juga dikatakan bahwa, Pendapatan Nasional (PDB) adalah hulu aliran dana sedangkan funding bank syariah di Indonesia adalah muara aliran dana. Adapun saluran dananya didistribusikan melalui saluran, inflasi, bagi hasil dan jumlah jaringan kantor perbankan syariah.

Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. PDB menurut penggunaan dirinci menurut komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (termasuk lembaga nirlaba), pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor dan impor<sup>187</sup>.

---

<sup>187</sup>Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia, (Jakarta : BPS – Statistik Indonesia, 2011), h ; 533.

## A.1. Data Regional dan Nasional

### A.1.1 Data PDB Regional dan Nasional

Data PDB regional dan nasional disajikan dengan tujuan dapat menunjukkan keterpautan data secara erat dan jelas antara data penelitian PDB secara nasional dengan data PDB regional.

Tabel 4.9 : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (miliar rupiah) untuk 12 provinsi Periode 2013 – 2014

P r o v I n s i	PDRB Tahun 2013 Dalam Miliar Rupiah	PDRB Tahun 2014 Dalam Miliar Rupiah
A c e h	121 973,0	130 448,2
Sumatera Utara	470 222,0	523 771,6
R i a u	607 498,6	679 692,2
DKI Jakarta	1 547 037,8	1 761 407,1
Jawa Timur	1 382 434,9	1 540 696,5
B a l i	134 399,0	156 448,3
Kalimantan Barat	118 623,3	131 933,4
Kalimantan Timur	571 309,7	579 010,4
Sulawesi Utara	71 079,0	80 622,8
Sulawesi Selatan	258 683,0	300 124,2
Maluku Utara	21 439,6	24 053,5
P a p u a	119 772,0	123 179,7

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)<sup>188</sup>

Produk Domestik Bruto menurut jenis pengeluaran atas dasar harga berlaku, jenis pengeluaran (*type of expenditure*) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2013 bernilai 5 352 696,5 milia rupiah, adapun pada tahun 2014 bernilai 5 911 165,4 miliar rupiah/ *billion rupiahs*<sup>189</sup>. Perkembangan beberapa agregat pendapatan dan pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku, Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*), pada tahun 2013 bernilai 9 524 736,5 miliar rupiah, adapun pada tahun 2014 bernilai 10 542 693,5 miliar rupiah. Pada

<sup>188</sup>Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia, (Jakarta: BPS–Statistik Indonesia, 2015) h; 592.

<sup>189</sup>Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia, h ; 585.

tahun 2013 merupakan angka sementara (*Preliminary figures*), pada tahun 2014 merupakan angka sangat sementara (*Very Preliminary figures*)<sup>190</sup>. Indikator Ekonomi Indonesia berdasarkan Produk Domestik Bruto pertriwulan dari tahun 2013 s/d tahun 2015 dapat di lihat pada tabel 4.10 berikut ini.

**Tabel 4.10 : Produk Domestik Bruto**

Tahun	Constant Price (Rp.) Base Year 2010		Current Price (Rp.)	
	PDB (Billion)	Change (%)	PDB (Billion)	Change (%)
TW4	2.270.356,60	-1,83	2.945.028,50	-1,79
TW3	2.312.692,50	3,36	2.998.622,40	4,52
TW2	2.237.413,30	3,75	2.868.866,90	5,15
TW1	2.156.469,10	-0,23	2.728.272,00	1,18
<b>2015</b>	8.976.931,50	4,79	11.540.789,80	9,23
TW4	2.161.407,90	-2,11	2.696.433,40	-1,82
TW3	2.208.106,70	3,29	2.746.532,30	4,92
TW2	2.137.771,90	3,83	2.617.655,30	4,49
TW1	2.058.984,70	0,06	2.505.196,30	1,13
<b>2014</b>	8.566.271,20	5,02	10.565.817,30	10,68
TW4	2.057.687,60	-2,18	2.477.097,50	-0,56
TW3	2.103.598,10	3,28	2.491.158,50	6,34
TW2	2.036.816,60	4,00	2.342.589,50	4,80
TW1	1.958.395,50	0,49	2.235.288,50	3,07
<b>2013</b>	8.156.497,80	5,56	9.546.134,00	10,80

**Sumber:** BPS, *Processed by Trade Data and Information Center, Ministry of Trade*<sup>191</sup>

### A.1.2 Data Inflasi Regional dan Nasional

Sebagai refleksi inflasi regional (Provinsi), dalam hal ini digunakan Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru periode 2010-2014 seperti pada tabel 4.11.

<sup>190</sup> Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia, h ; 589.

<sup>191</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, (Jakarta : Copyright @ 2012.

Indeks Pembangunan Manusia (HDI, *Human Development Index*), pada dasarnya digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Negara maju memiliki daya beli tinggi dibanding negara berkembang, terlebih lagi terhadap negara terbelakang, dengan demikian HDI dapat merefleksikan tentang inflasi. Di sisi lain secara konseptual HDI, tolok ukur sumberdaya manusia adalah perhitungan dalam formula tertentu yang memadukan tiga komponen utama, yakni<sup>192</sup> :

1. Kualitas hidup materiil yang diwakili indikator tingkat pertumbuhan ekonomi (GDP) perkapita tahunan.
2. Kondisi kesehatan penduduk yang diwakili oleh indikator usia harapan hidup (*life expectancy*).
3. Kondisi pendidikan. Indikator wakilnya pada awalnya hanya tingkat melek huruf, namun kemudia di perluas kesejumlah indikator pendidikan lainnya.

**Tabel 4. 11 : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru 2010-2014**

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
Aceh	67,09	67,45	67,81	68,30	68,81
Sumatera Utara	67,09	67,34	67,74	68,36	68,87
Riau	68,65	68,90	69,15	69,91	70,33
Dki Jakarta	76,31	76,98	77,53	78,08	78,39
Jawa Timur	65,36	66,06	66,74	67,55	68,14
Bali	70,10	70,87	71,62	72,09	72,48
Kalimantan Barat	61,97	62,35	63,41	64,30	64,89
Kalimantan Timur	71,31	72,02	72,62	73,21	73,82
Sulawesi Utara	67,83	68,31	69,04	69,49	69,96
Sulawesi Selatan	66,00	66,65	67,26	67,92	68,49
Maluku Utara	62,79	63,19	63,93	64,78	65,18
Papua	54,45	55,01	55,55	56,25	56,75
<b>Indonesia</b>	<b>66,53</b>	<b>67,09</b>	<b>67,70</b>	<b>68,31</b>	<b>68,90</b>

Sumber : Statistik Perbankan Syariah<sup>193</sup>

<sup>192</sup> Faisal Basri , Haris Munandar, Lanskap Ekonomi Indonesi,h; 88.

<sup>193</sup> <http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPS%20Des%202013.pdf>

Dalam ilmu ekonomi, **inflasi** adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi. Sejak Juni 2014, IHK berdasarkan pola konsumsi didapat dari 2012 Survei Biaya Hidup di 82 kota (2012 = 100)<sup>194</sup>.

Data inflasi Indonesia periode tahun 2011 s/d 2015 (dalam persen/%) tertera pada tabel 4.12 berikut ini.

**Tabel 4.12 : Inflasi di Indonesia 2011-2015:**

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Inflasi</b> perubahan % tahunan)	5.4	4.3	8.4	8.4	3.4
<b>Target Bank Indonesia</b> perubahan % tahunan)	5.0	4.5	4.5	4.5	4.0

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)<sup>195</sup>

Pada tabel 4.12 dapat kita ketahui bahwa, target perubahan inflasi Bank Indonesia antara 4,0 % - 5,0 %, terpaut 1 %. Akan tetapi perubahan inflasi secara realita terjadi antara 3,4 % - 8,4 %, terpaut 5 %. Karakteristik tingkat inflasi yang tidak stabil di Indonesia menyebabkan deviasi yang lebih besar dibandingkan biasanya dari proyeksi inflasi tahunan oleh Bank Indonesia. Akibat dari ketidakjelasan inflasi semacam ini adalah terciptanya biaya-biaya ekonomi, seperti biaya peminjaman yang lebih tinggi di negara ini (domestik dan internasional) dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Saat rekam jejak yang baik mengenai target inflasi tahunan terbentuk, kredibilitas kebijakan moneter yang lebih besar akan mengikutinya. Namun, karena inflasi yang tidak stabil terutama disebabkan karena penyesuaian harga bahan bakar bersubsidi, Bank Indonesia

<sup>194</sup> BPS - Statistics Indonesia 2015, Mailbox : [bpsdq@bps.go.id](mailto:bpsdq@bps.go.id)

<sup>195</sup> BPS - Statistics Indonesia 2015, Mailbox : [bpsdq@bps.go.id](mailto:bpsdq@bps.go.id)



memprediksi akan terjadi lebih sedikit deviasi antara target awal dan realisasi inflasi ke depan.

### A.1.3 Data Bagi Hasil Regional dan Nasional

Bagi hasil pada Perbankan Syariah ditetapkan secara sentral, dengan demikian tidak akan terjadi perbedaan penetapan porsi bagi hasil (*nisbah*), baik pada tingkat regional (provinsi) maupun nasional pada Perbankan Syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, data porsi bagi hasil disajikan berkaitan dengan dana pihak ketiga (DPK) yang terdiri dari Giro, Tabungan, dan deposito, menggunakan periode (*time series*), perbulan, pertriwulan, semesteran, tahunan dan diatas satu tahun, sebagaimana tertera pada tabel 4.13 berikut ini.

**Tabel 4.13 : Ekuivalen Tingkat Imbalan / Bagi Hasil (Fee / Bonus)**

J e n i s	Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah		Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	
	Desember 2014	April 2015	Desember 2014	April 2015
<b>Dana Pihak Ketiga (Depositor Funds)</b>				
1. Giro iB	0,64 %	0,74 %	-	-
2. Tabungan iB	3,57 %	3,06 %	4,32 %	4,08 %
3. Deposito iB				
a. 1 Bulan	7,80 %	7,01 %	13,87 %	13,88 %
b. 3 Bulan	8,10 %	7,52 %	10,15 %	9,52 %
c. 6 Bulan	7,34 %	6,76 %	10,94 %	9,71 %
d. 12 Bulan	7,18 %	6,46 %	11,71 %	10,89 %
e. > 12 Bulan	14,02 %	8,70 %	9,96 %	9,65 %

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)<sup>196</sup>.

<sup>196</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perbankan Syariah, (Jakarta : OJK, 2015), h ;  
16.

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam<sup>197</sup>.

Hal yang tidak kalah penting adalah bahwa, kehadiran bank syariah di sebuah negara menjadi lokomotif bagi bergeraknya ekonomi syariah. Pada tataran ideal, sebagaimana pendapat Ketua OJK Muliaman Hadad, industri keuangan bermain pada tiga level pengembangan ekonomi. Pertama, keuangan syariah membuka akses lebih lebar kepada masyarakat yang tidak tersentuh oleh sektor keuangan. Kedua, melayani masyarakat kelas menengah khususnya di kota-kota besar. Ketiga, industri keuangan masuk pada sektor pembangunan nasional, khususnya infrastruktur<sup>198</sup>.

#### A.1.4 Data Jaringan Kantor Regional dan Nasional

Berdasarkan data statistik Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang bersumber dari Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS), dan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Lapbul BPRS). Sampai dengan bulan April 2015 data jaringan kantor Bank Syariah dalam publikasinya disediakan melalui website OJK (<http://www.ojk.go.id>) dan website BI (<http://www.bi.go.id>). Jaringan jumlah kantor perbankan syariah (Islamic Banking Network) pada penelitian ini disajikan secara global (nasional) dan secara regional dalam bentuk tabel sebagai berikut :

---

<sup>197</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah : Teori dan Praktik, h. 90.

<sup>198</sup> Anif, Punto Utomo, Dua Dekade Ekonomi Syariah Menuju Kiblat Ekonomi Islam, h. 75-76.

**Tabel 4.14. Jaringan Kantor Perbankan Syariah**

Indikator	Des 2014	April 2015
Bank Umum Syariah (BUS)		
- Jumlah Bank	12	12
- Jumlah Kantor	2.151	2.135
Unit Usaha Syariah (UUS)		
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	22	22
- Jumlah Kantor	320	323
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)		
- Jumlah Bank	163	162
- Jumlah Kantor	439	433
Total Kantor	2.910	2.891

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)<sup>199</sup>.

Jumlah Jaringan Kantor Perbankan Syariah secara nasional dengan indikator Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terdiri dari, jumlah bank dan jumlah kantor. Pada tabel 4.14 Jumlah Jaringan Kantor Perbankan Syariah pada Desember 2014 berjumlah 2.910, adapuan pada April 2015 berjumlah 2.891 mengalami penurunan sejumlah 19 buah kantor.

Jumlah Jaringan Kantor Perbankan Syariah secara regional diwakili oleh Jaringan Kantor Individual terdiri dari, 12 Bank Umum Syariah (BUS) dengan 450 Kantor Pusat Operasional (KPO)/Kantor Cabang (KC) atau Head Operational Office (HOO)/Branch Office (BO), 1.496 Kantor Cabang Pembantu (KCP)/Unit Pembantu Syariah (UPS) atau Sub Branch Office (SBO)/ Syari'a Services Unit

<sup>199</sup>Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perbankan Syariah, h. 4.

(SSU), 201 Kantor Kas (KK) atau Cash Office (CO), 8 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 139 Kantor Pusat Operasional (KPO)/Kantor Cabang (KC), 140 Kantor Cabang Pembantu (KCP)/Unit Pembantu Syariah (UPS), dan 44 Kantor Kas (KK) atau Cash Office (CO). Sebuah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan 90 Kantor Pusat Operasional (KPO)/Kantor Cabang (KC, dan 181 Kantor Kas (KK) atau Cash Office (CO), lihat tabel 4.15 periode Desember 2014-April 2015.

**Tabel 4.15 : Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah – April 2015**

Kelompok Bank	KPO/KC	KCP/UPS	KK
	HOO/BO	SBO/SSU	CO
<b>Bank Umum Syariah</b>	<b>450</b>	<b>1.496</b>	<b>201</b>
1. PT. Bank Muamalat Indonesia	85	260	103
2. PT. Bank Victoria Syariah	9	6	-
3. Bank BRI Syariah	52	204	10
4. BPD Jawa Barat Banten Syariah	9	56	1
5. Bank BNI Syariah	67	165	17
6. Bank Syariah Mandiri	137	510	65
7. Bank Syariah Mega Indonesia	35	273	1
8. Bank Panin Syariah	8	5	-
9. PT. Bank Syariah Bukopin	12	7	4
10. PT. BCA Syariah	9	6	-
11. PT. Maybank Syariah Indonesia	1	-	-
12. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	26	4	-
<b>Unit Usaha Syariah</b>	<b>139</b>	<b>140</b>	<b>44</b>
13. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk	25	21	-
14. PT. Bank Permata Tbk	11	2	-
15. PT. Bank International Indonesia Tbk	7	1	-
16. PT. Bank Cimb Niaga. Tbk	6	-	-
17. PT. Bank OCBC Nisp. Tbk	8	-	-
18. PT, BPD DKI	2	11	6
19. BPD Yogyakarta	1	2	5
20. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	3	5	4

Unit Usaha Syariah			
21. PT. BPD Jawa Timur	3	7	-
22. PT. BPD Jambi	1	-	-
23. PT. Bank Bpd Aceh	2	15	-
24. PT. Bpd Sumatera Utara	5	17	-
25. BPD Sumatera Barat	3	6	-
26. PT. Bank Pembangunan Daerah Riau	2	3	-
27. PT. BPD Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung	3	1	5
	2	8	1
28. PT. BPD Kalimantan Selatan	-	2	4
29. PT. BPD Kalimantan Barat	2	13	-
30. BPD Kalimantan Timur	3	-	1
31. PT. BPD Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat	2	6	1
32. PT. BPD Nusa Tenggara Barat	27	-	10
33. PT. Bank Sinarmas	21	20	7
34. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			
<b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>181</b>
<b>T o t a l</b>	<b>679</b>	<b>1.636</b>	<b>426</b>

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)<sup>200</sup>

Tidak termasuk Layanan Syariah (*Office Channeling*) di dalam Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah (*Individual Islamic Banking Network*) - Desember 2014. Kelompok Bank (*Group of Banks*) terdiri dari BUS (*Islamic Commercial Bank*), UUS/ *Islamic Business Unit*. dan BPRS (*Islamic Rural Bank*). Edisi Mei 2015 akan diterbitkan pada minggu ke III bulan Juli 2015<sup>201</sup>

#### Keterangan :

KP	= Kantor Pusat	HO	= Head Office
KPO	= Kantor Pusat Operasional	HOO	= Head Operational Office
KC	= Kantor Cabang	BO	= Branch Office
KCP/UPS	= Kantor Cabang Pembantu/ Unit Pelayanan Syariah	SBO/SSU	= SubBranchOffice/Syari'a Sevices Unit
KK	= Kantor Kas	CO	= Cash Office

<sup>200</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perbankan Syariah, h. 3.

<sup>201</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perbankan Syariah, h. ii.

### A.1.5 Data Funding Regional dan Nasional

Saat ini, GCG (*good corporate governance*) merupakan isu yang tidak bisa dipisahkan dari fenomena bisnis di seluruh dunia, karena GCG merupakan salah satu strategi untuk mendapatkan kepercayaan dari para *stakeholder*, termasuk di Indonesia<sup>202</sup>. Data funding seperti tertera pada tabel 4.16 memuat Neraca Gabungan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Neraca Gabungan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai indikator. Strategi ini peneliti yakini dapat menggambarkan secara singkat, padat, dan transparan baik kuantitas maupun kualitas dana di muara aliran, sebagai funding perbankan syariah di Indonesia.

**Tabel 4.16 : Dana Pihak Ketiga (Funding) Di Bank Syariah**

No	Indikator	Des 2014	Apr 2015	Keterangan
1	Neraca Gabungan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	217.858	213.973	Miliar Rupiah (in Billion IDR)
2	Neraca Gabungan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	4.028.415	4.204.807	Juta Rupiah (in Million IDR)

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)<sup>203</sup>.

Dari tabel 4.16, terlihat bahwa pada Desember 2014 dana funding yang parkir di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Indonesia bernilai 217.858 miliar rupiah, sedangkan pada April 2015 bernilai 213.973 miliar rupiah, atau mengalami pengurangan senilai 3.885 miliar rupiah. Adapun dana funding yang parkir di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada Desember 2014 bernilai 4.028.415 miliar rupiah, sedangkan pada April 2015 bernilai 4.204.807 miliar rupiah, atau mengalami peningkatan senilai 174.392 miliar rupiah.

<sup>202</sup> Anif, Punto Utomo, Dua Dekade Ekonomi Syariah Menuju Kiblat Ekonomi Islam, h.105.

<sup>203</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perbankan Syariah, h. 15-16.

Isu GCG semakin menarik perhatian setelah berbagai lembaga keuangan multilateral, seperti *World Bank* dan *ADB (Asian Development Bank)* mengungkapkan bahwa penyebab krisis keuangan yang melanda di berbagai negara, terutama di Asia pada 1997-1998, adalah karena buruknya pelaksanaan praktik-praktik *corporate governance*. Indonesia termasuk salah satu yang menjadi perhatian khusus, karena diantara negara-negara yang terkena krisis moneter, Indonesia yang terparah. Ketika Indonesia menanda tangani Lol (letter of intent) dengan IMF (Dana Moneter Internasional) salah satu syaratnya adalah perusahaan harus menjalankan GCG, untuk itulah kemudian pemerintah mendirikan KNKCG (Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*). Lembaga ini memiliki tugas pokok dalam merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional mengenai GCG, serta memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang *corporate governance* di Indonesia<sup>204</sup>.

Isu tersebut patut menjadi monitor terhadap data-data keuangan khususnya bidang industri keuangan di Indonesia, karena ada kemungkinan penyimpangan data-data penelitian dimaksud baru dapat diperbaiki dalam waktu yang cukup lama. Walaupun Bank Syariah di Indonesia selama ini memiliki pedoman tata kelola tersendiri dan dipandang lebih baik, karena dilandasi pula dengan etika dan moral dalam Islam.

## **A.2. Data Penelitian**

Berdasarkan ketersediaan data, jumlah populasi, dan jumlah sampel, maka pada penelitian ini ditetapkan mempergunakan data periodik perbulan (*time series*)., populasi sebesar 25, dan 24 jumlah sampel. Selanjutnya variabel independen dan dependen variabel disusun dan di sajikan dalam bentuk tabel.

Berdasarkan riset perpustakaan (*Library research*) ditemukan bahwa data sekunder berupa dependen variabel maupun independen variabel selama ini dibukukan secara periodik pertahun baik oleh Bank Indonesia (BI), maupun Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi akhir tahun 2012 buku-buku dimaksud sulit

---

<sup>204</sup>Anif, Punto Utomo, Dua Dekade Ekonomi Syariah Menuju Kiblat Ekonomi Islam, h.106-107..

ditemukan, sebagai gantinya disajikan oleh otoritas tersebut secara *full on line*. Awal tahun 2015 laporan statistik perbankan syariah ditangani sendiri oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data penelitian dimaksud masing-masing dibuat dalam bentuk tabel yang terdiri dari tabel X1, X2, X3, X4, dan tabel Y serta tabel gabungan dari kelima variabel yang ada sebagai berikut :

### A 2.1 Data Pendapatan Nasional (PDB)

Berdasarkan data pendapatan nasional (PDB) yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS), kemudian data yang telah diperoleh peneliti adakan tindakan memfilter dan memodifikasi data sesuai dengan kebutuhan data penelitian ini. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, data penelitian ini adalah data periodik (time series) untuk 24 bulan, periode tahun 2014-2015 sebagai berikut :

Tabel 4.17 (X1) : Pendapatan Nasional (PDB) Periode Tahun 2014 – 2015S

B U L A N	PENDAPATAN NASIONAL (PDB)	
	Tahun 2014 ( Milliar)	Tahun 2015 (Milliar)
Januari	682797.1198	715454.663
Pebruari	685881.6272	718200.1852
Maret	691802.7531	724102.4519
April	704898.0284	737771.7889
M e i	713239.2432	746529.8
J u n i	721163.9284	754986.8111
J u l i	733696.4494	768457.0444
Agustus	737019.8012	772326.3889
September	736158.3494	771909.0667
Oktober	723472.3407	767205.0778
Nopember	719971.0963	758214.4222
Desember	718014.863	744937.1

Sumber :Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Telah dimodifikasi<sup>205</sup>.

<sup>205</sup> [www.BPS.go.Id /Statistik-BPS/Download/Agustus - 2016](http://www.BPS.go.Id /Statistik-BPS/Download/Agustus - 2016)



### A 2.2 Data Inflasi (IFL)

Sama halnya dengan data pendapatan nasional (PDB), data inflasi pun dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), hanya saja untuk data inflasi peneliti lebih memilih data yang diterbitkan Statistik Bank Indonesia. Data inflasi pada umumnya dinyatakan dalam persen, untuk memudahkan pengolahan data menggunakan software Eviews, data yang dinyatakan dalam persen peneliti rubah kedalam bentuk decimal (dinyatakan bersama-sama). Data yang telah diperoleh peneliti adakan tindakan memfilter dan memodifikasi data sesuai dengan kebutuhan data penelitian ini. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, data penelitian ini adalah data periodik (time series) untuk 24 bulan, periode tahun 2014-2015 sebagai berikut :

Tabel 4.18 (X2) : Inflasi (IFL) Periode Tahun 2014 – 2015

B U L A N	I I F L A S I ( I F L )			
	Tahun 2014		Tahun 2015	
Januari	1.07	107%	-0.24	-24%
Pebruari	0.26	26%	-0.36	-36%
Maret	0.08	8%	0.17	17%
April	-0.02	-2%	0.36	36%
M e i	0.16	16%	0.5	50%
J u n i	0.43	43%	0.54	54%
J u l i	0.93	93%	0.93	93%
Agustus	0.47	47%	0.39	39%
September	0.27	27%	-0.05	-5%
Oktober	0.47	47%	-0.08	-8%
Nopember	1.5	150%	0.21	21%
Desember	2.46	246%	0.96	96%

Sumber : Statistik Bank Indonesia Telah dimodifikasi<sup>206</sup>

<sup>206</sup>[www.ojk.go.id/id/Kanal/Syariah/datadan\\_statistik-perbankan\\_syariah/Dokumentasi/Page2015](http://www.ojk.go.id/id/Kanal/Syariah/datadan_statistik-perbankan_syariah/Dokumentasi/Page2015)

### A. 2.3 Data Pendapatan Bagi Hasil (BHS)

Otoritas keuangan yang menerbitkan data statistik bagi hasil terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan juga Statistik Bank Indonesia. Adapun data bagi hasil yang peneliti gunakan ini adalah diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mengacu kepada nisbah Bank Muamalat Indonesia yang berlaku, antara bank dan pemegang rekening adalah sebagai berikut : Deposito, 1bulan (65 : 35), 3bulan (66 : 34), 6 bulan (66 : 34), 12 bulan (63 : 37), Rekening Tabungan (45 : 55). Dari uraian di atas, sebenarnya dalam kasus BMI istilah yang tepat untuk bagi hasil adalah revenue sharing, karena yang dibagikan adalah pendapatan, bukan keuntungan<sup>207</sup>. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa : Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha (keuntungan maupun kerugian) yang dibagi berdasarkan rasio/nisbah yang berbentuk persentase (A 51 % : B 49 %) dan disepakati bersama berdasarkan akad. Rasio/nisbah yang disepakati untuk tiap periode pada masing-masing bank syariah tidak selalu sama. Demikian juga formulasi matematis dalam menentukan keuntungan profit individu pada bank syariah maupun bunga efektif pada bank konvensional juga tidak sama. Adanya perbedaan nisbah pada masing-masing bank syariah merupakan hal yang wajar dalam dunia bisnis. Pada intinya bagi hasil yang diaplikasikan pada penelitian ini merupakan hasil usaha berdasarkan nisbah/rasio yang disepakati bersama pada awal akad. Adapun rasio/nisbah atau sering juga disebut dengan istilah tingkat imbalan/bagi hasil/fee/bonus Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk deposito 3 bulan yang diterbitkan OJK, adalah seperti pada tabel 4.19 berikut ini.

---

<sup>207</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah : Teori dan Praktik, h.144.

**Tabel 4.19 (X3) : Pendapatan Bagi Hasil Periode Tahun 2014 -2015**

B U L A N	Pendapatan Bagi Hasil (BHS) Deposito/3 Bulan Ekuivalen	
	Tahun 2014 (Persen)	Tahun 2015 (Persen)
Januari	6,09 %	7,45 %
Pebruari	7,00 %	7,74 %
Maret	7,3 %	7,85 %
April	7,35 %	7,52 %
M e i	7,40 %	7,55 %
J u n i	7,56 %	7,82 %
J u l i	6,98 %	7,95 %
Agustus	8,36 %	8,55 %
September	8,45 %	8,58 %
Oktober	8,60 %	8,65 %
Nopember	7,73 %	8,15 %
Desember	8,10 %	8,45 %

Sumber : Statistik OJK Telah dimodifikasi<sup>208</sup>.

#### A. 2.4 Data Jumlah Jaringan Kantor (JJK)

Sebagaimana halnya bagi hasil, Jumlah Jaringan Kantor (JJK) juga diterbitkan oleh Otoritas Jasa keuangan maupun Statistik Bank Indonesia, data JJK ini peneliti menggunakan data Otoritas Jasa keuangan (OJK), walaupun satu dua diantaranya dipenuhi oleh data Statistik Bank Indonesia. Pertumbuhan jumlah kantor sangat erat kaitannya dengan sumber daya insani (SDI), hal ini dikarenakan SDI merupakan ujung tombak bagi perkembangan ekonomi syariah. Perlu diingat bahwa secara kualifikasi, karyawan di perbankan syariah tidak hanya memenuhi aspek kualitas di bidang operasional perbankan berikut inovasi produknya, tetapi juga harus memiliki landasan syariah yang kuat<sup>209</sup>.

<sup>208</sup>Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perbankan Syariah, h. 37.

<sup>209</sup>Anif, Punto Utomo, Dua Dekade Ekonomi Syariah Menuju Kiblat Ekonomi Islam, h.198.

Jumlah Jaringan Kantor Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tertera pada tabel 4.20 berikut ini.

**Tabel 4.20 (X4) : Jumlah Jaringan Kantor Periode Tahun 2014 -2015**

B U L A N	Jumlah Jaringan Kantor (JK) BUS Dan UUS	
	Tahun 2014 (Satuan)	Tahun 2015 (Satuan)
Januari	2554	2479
Pebruari	2558	2480
Maret	2561	2475
April	2564	2470
M e i	2571	2460
J u n i	2575	2454
J u l i	2592	2446
Agustus	2577	2413
September	2571	2367
Oktober	2519	2330
Nopember	2501	2316
Desember	2471	2301

Sumber : Statistik OJK Telah dimodifikasi<sup>210</sup>.

### **A. 2.5 Data Funding Bank Syariah**

Sebagai refleksi dana pihak ketiga (DPK), data funding juga diterbitkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan juga Statistik Bank Indonesia. Penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh bank syariah tidak membedakan nama produk tetapi melihat pada prinsip, yaitu prinsip wadiah (titipan) dan prinsip mudharabah. Apapun nama produk yang diperhatikan adalah prinsip yang digunakan atas produk tersebut, hal ini sangat terkait dengan porsi pembagian hasil usaha yang akan dilakukan antara pemilik dana/deposan (shahibul

---

<sup>210</sup>Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perbankan Syariah, h. 3.

maal) dengan bank syariah sebagai mudharib. Istilah “mudharabah” merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank syariah.

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (shahib al-maal) menyediakan dana, dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang telah disepakati bersama secara awal<sup>211</sup>. Komposisi DPK Bank Umum syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tertera pada tabel 4. 21 berikut ini.

Selanjutnya untuk efisiensi waktu serta memudahkan dalam pengolahan data, tabel yang memuat data penelitian periode 2014-2015 disusun dalam sebuah tabel, terdiri dari : PDB (X1), Inflasi (X2), Bagi hasil (X3), JJK (X4), dan Funding (Y), sebagaimana tertera pada tabel 4.22 (halaman 112).

**Tabel 4.21 (Y) : Funding Bank Syariah Periode Tahun 2014 – 2015**

B U L A N	Funding / DPK Bank Syariah	
	Tahun 2014 (Milliar)	Tahun 2015 (Milliar)
Januari	177930	210761.169
Pebruari	178154	210297.427
Maret	180945	212988.247
April	185508	213972.938
M e i	190783	215338.942
J u n i	191470	213477.337
J u l i	194299	216082.5
Agustus	195959	216356.271
September	197141	219313.269
Oktober	207121	219477.865
Nopember	209644	220635.018
Desember	217858	231175.385

Sumber : Statistik OJK Telah dimodifikasi<sup>212</sup>.

<sup>211</sup>Sofyan S. Harahap, Akuntansi Perbankan Syariah Edisi Revisi, h70.

<sup>212</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perbankan Syariah, h. 15.

Tahun	PDB (X1)		INFLASI (X2)		BHS (X3)		JK (X4)		FBS (Y)	
Bulan	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Jan	682797.12	715454.663	1.07	-0.24	6%	626%	2554	2479	177930	210761.169
Feb	685881.627	718200.185	0.26	-0.36	6%	657%	2558	2480	178154	210297.427
Mar	691802.753	724102.452	0.08	0.17	6%	637%	2561	2475	180945	212988.247
Apr	704898.028	737771.789	-0.02	0.36	6%	607%	2564	2470	185508	213972.938
Mei	713239.243	746529.8	0.16	0.5	6%	630%	2571	2460	190783	215338.942
Jun	721163.928	754986.811	0.43	0.54	655%	609%	2575	2454	191470	213477.337
Jul	733696.449	768457.044	0.93	0.93	631%	611%	2592	2446	194299	216082.5
Agus	737019.801	772326.389	0.47	0.39	630%	603%	2577	2413	195959	216356.271
Sep	736158.349	771909.067	0.27	-0.05	664%	607%	2571	2367	197141	219313.269
Okt	723472.341	767205.078	0.47	-0.08	662%	572%	2519	2330	207121	219477.865
Nov	719971.096	758214.422	1.5	0.21	644%	574%	2501	2316	209644	220635.018
Des	718014.863	744937.1	2.46	0.96	672%	588%	2471	2301	217858	231175.385

**Tabel 4.22 : Dana Penelitian Global Periode Tahun 2014 - 2015**

## B. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Data penelitian ini (tabel. 4.22) di analisis dengan Uji-Asumsi Dasar/Klasik, selanjutnya diestimasi dengan estimasi metode regresi linier berganda menggunakan software Eviews 8, juga dianalisis dan diuji dengan Uji-Statistik atau Uji – Hipotesis sebagai berikut :

### 1. Uji Asumsi Klasik

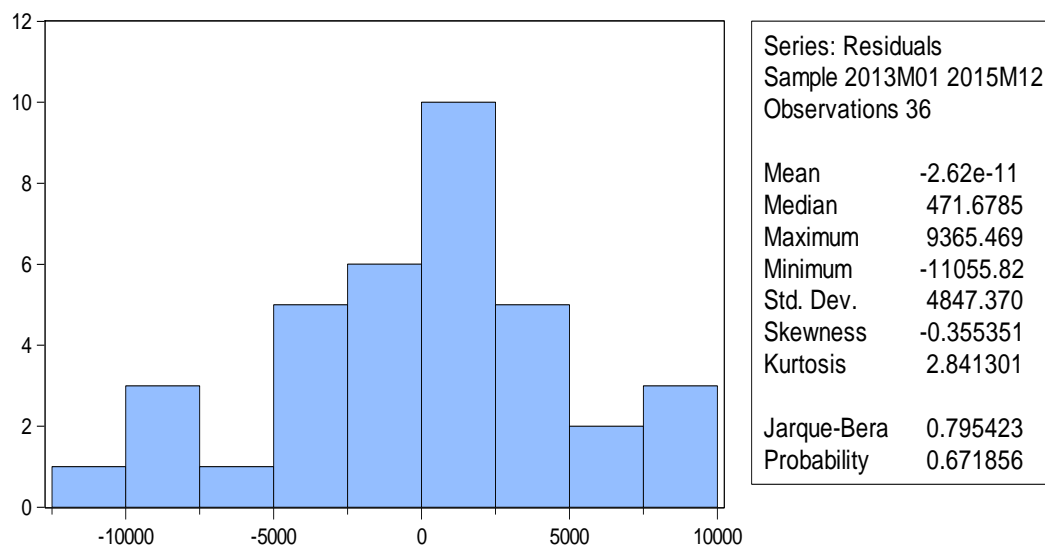
Uji Asumsi Klasik dilakukan sebagai syarat penggunaan metode regresi. Dengan terpenuhinya asumsi tersebut, maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataan. Asumsi tersebut adalah asumsi normalitas, multikolinearitas dan autokorelasi.

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, error yang dihasilkan mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan uji *Jarque- Bera* dengan kriteria penilaian sebagai berikut.

- $H_a$  diterima jika probabilitas  $> level\ of\ significant\ (\alpha)\ 5\%$  berarti berdistribusi normal.
- $H_o$  diterima jika probabilitas  $< level\ of\ significant\ (\alpha)\ 5\%$  berarti tidak berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan software Eviews 8 diperoleh hasil berupa diagram batang (histogram) seperti tertera pada gambar. 1 berikut ini.

**Gambar 4.1 : Uji Normalitas**

Sumber : Hasil Olahan Peneliti dengan Eviews 8, 2016

Berdasarkan tabel di atas dengan melihat nilai probabilitas yang nilainya lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  atau  $0,67856 > 0,5$  maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data pada variabel penelitian adalah normal. Dengan melihat koefisien *Jarque- Bera* (J-B) = 0,79 atau lebih kecil dari 2 (J-B < 2), maka dapat disimpulkan data pada variabel penelitian berdistribusi normal<sup>213</sup>.

### **b. Uji Multikolineritas**

Multikolineritas adalah hubungan yang terjadi diantara variabel-variabel independen atau variabel independen yang satu fungsi dari variabel independen yang lain. Model regresi dikatakan baik jika tidak ada korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independennya. Dari hasil estimasi data independen bahwa data tidak mengalami multikolineritas yaitu :

<sup>213</sup>Wing, Wahyu Winarno, Analisis Ekonometrika dengan Eviews, h. 5.43.



**Tabel 4.23**  
**Uji Multikolinieritas**

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.76E+09	2316.769	NA
INFLASI	1480793.	1.599353	1.026449
BAGI HASIL	1580899.	92.12355	3.788479
KANTOR	111.3993	892.1955	1.136617
PDB	0.001843	1237.065	2.731486

Sumber: Hasil Olahan Peneliti dengan EViews 8, 2016

Uji multikolinearitas ini menggunakan kriteria penilaian terhadap VIF sebagai berikut:

- $H_a$  : Jika nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.
- $H_0$  : Jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinearitas.

Tampilan di atas menunjukkan :

- Pada variabel inflasi, nilai VIF yang dihasilkan lebih kecil dari 10 di mana  $1.026449 < 10$  dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada bagi hasil.
- Pada variabel bagi hasil, nilai VIF yang dihasilkan lebih kecil dari 10 di mana  $3.788479 < 10$  dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada bagi hasil.
- Pada variabel bagi hasil, nilai VIF yang dihasilkan lebih kecil dari 10 di mana  $1.136617 < 10$  dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada bagi hasil.

- Pada variabel bagi hasil, nilai VIF yang dihasilkan lebih kecil dari 10 di mana  $2.731486 < 10$  dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada bagi hasil.
- Pada variabel jumlah kantor, nilai VIF yang dihasilkan lebih kecil dari 10 di mana  $1.699171 < 10$  dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada jumlah kantor cabang.

### c. Uji Autokorelasi

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk menguji autokorelasi ini dideteksi dengan melihat nilai Durbin-Watson (DW) pada hasil regresi. Adapun kriteria penilaiannya, yaitu:

- 1) Jika nilai DW terletak antara nilai batas atas ( $du$ ) dan  $4-du$ , maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi.
- 2) Jika nilai DW lebih rendah dari nilai batas bawah ( $dl$ ) maka dapat disimpulkan ada autokorelasi positif.
- 3) Jika nilai DW lebih besar dari nilai  $4-dl$  maka dapat disimpulkan ada autokorelasi negatif.

- 4) Jika nilai DW terletak antara nilai batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau nilai DW terletak di antara nilai 4-du dan 4-dl maka tidak dapat disimpulkan (*inconclusive*).

**.Tabel 4.24 : Hasil Uji Autokorelasi**

Durbin-Watson stat	1.475819
--------------------	----------

Sumber : Hasil Olahan Peneliti dengan Eviews 8, 2016

Pada hasil estimasi diperoleh nilai Sumber : Durbin-Watson sebesar 1.475819. Sedangkan untuk nilai dl dan du untuk tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  dengan jumlah pengamatan 36 dan jumlah variabel bebas sebanyak 5 variabel, pada tabel D-W diperoleh nilai dl = 1.1755 dan nilai du = 1.7987. Nilai D-W = 1.475819 pada kriteria penilaian uji autokorelasi terletak pada kriteria antara nilai batas atas (du) dan batas bawah (dl) maka hasilnya tidak dapat disimpulkan (*inconclusive*). Karena hasil tidak dapat disimpulkan data tersebut terkena autokorelasi atau tidak, dilakukan pengujian ulang dengan menggunakan uji Breusch-Godfrey atau yang disebut dengan uji Lagrange Multiplier (*LM Test*) pada Eviews 8 sehingga didapat hasil sebagai berikut.

**Tabel 4.25 : LM Tes**

Breusch-Godfrey <i>SerialCorrelation LM Test</i>			
F-statistic	0.677361	Prob. F(2,28)	0.5161
Obs*R-squared	1.661402	Prob. Chi-Square(2)	0.4357

Sumber : Hasil Olahan Peneliti dengan Eviews 8, 2016

Untuk pengujian hipotesis pada uji LM ini dapat dilihat sebagai berikut:

- $H_a$  : probabilitas Chi-squared  $> \alpha = 5\%$ , berarti tidak ada autokorelasi
- $H_1$  : probabilitas Chi-squared  $< \alpha = 5\%$ , berarti ada autokorelasi.

Dapat dilihat dari nilai probabilitas Chi-Square lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  atau  $0.5161 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terkena autokorelasi.

#### **d.Heterokedastisitas**

Uji heteroskedastisitas adalah menguji varians pada variabel residu atau pengganggu adalah sama untuk semua observasi atas variabel bebas. Jika nilai varian dari variabel terikat meningkat akibat meningkatnya varian variabel bebas sehingga menyebabkan varian variabel terikat tidak sama, maka terkena heteroskedastisitas. Hal ini akan membuat peneliti salah menginterpretasi hasil dan salah member kesimpulan. Untuk itu, perlu diadakan uji heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan Uji White.

**Tabel 4.26 : Uji White**

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	1.092708	Prob. F(20,15)	0.4375
Obs*R-squared	21.34765	Prob. Chi-Square(20)	0.3769
Scaled explained SS	13.64842	Prob. Chi-Square(20)	0.8479

Sumber:HasilOlahanPenelitidenganEviews8,2016

Untuk pengujian hipotesis pada uji White ini dapat dilihat sebagai berikut:

- $H_a$  : probabilitas Chi-squared pada Obs\*R-squared  $> \alpha = 5\%$ , berarti tidak terkena heterokedastisitas.
- $H_1$  : probabilitas Chi-squared pada Obs\*R-squared  $< \alpha = 5\%$ , berarti terkena heterokedastisitas.

Dapat dilihat dari nilai probabilitas Chi-Square lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  atau  $0.3769 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terkena heteroskedastisitas.

#### e. Uji Linieritas

Uji ini digunakan untuk melihat spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Salah satu uji yang digunakan untuk linieritas pada penelitian ini adalah Uji Ramsey – Reset, dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.27 : Uji Ramsey-Reset**

Ramsey RESET Test			
Equation: EQLOGARITMA			
Specification: LFUNDING C LBAGIHASIL LKANTOR			
Omitted Variables: Squares of fitted values			
	Value	Df	Probability
t-statistic	0.071216	29	0.9437
F-statistic	0.005072	(1, 29)	0.9437
Likelihood ratio	0.006295	1	0.9368

Sumber: Hasil Olahan Peneliti dengan Eviews 8, 2016

Untuk pengujian hipotesis pada uji Ramsey – Reset ini dapat dilihat sebagai berikut:

- $H_a$  : probabilitas pada F-statistics  $> \alpha = 5\%$ , berarti model persamaan linier.
- $H_1$  : probabilitas pada F-statistics  $< \alpha = 5\%$ , berarti mode persamaan tidak linier.

Dapat dilihat dari nilai probabilitas F-statistics lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  atau  $0.9437 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan linier dan dapat digunakan.

## 2. Estimasi dan Analisis Regresi

Data-data penelitian seperti pada tabel 4.22 dapat diestimasi hubungan antara Funding sebagai variabel terikat dengan beberapa variabel bebas sebagaimana terlampir dengan mengklik **quick** pada panel *header EVIEWS* dan pilih *Estimate Equation*. Pada equation menu kita dapat mengisikan hubungan yang akan diestimasi seperti : Funding C PDB, IFL, BHS, JJK. Setelah menjalankan perintah tersebut diperoleh output seperti pada tabel 4.28 berikut ini.

**Tabel 4.28 : Estimasi Regresi berganda**

### OUTPUT REGRESI

Dependent Variable: FUNDING

Method: Least Squares

Date: 10/11/16 Time: 14:08

Sample: 2013M01 2015M12

Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-244096.5	42001.97	-5.811549	0.0000
INFLASI	-1166.055	1216.878	-0.958235	0.3456
BAGIHASIL	1433.486	1257.338	1.140096	0.2633
KANTOR	6.615476	10.55459	0.626787	0.5355
PDB	0.520355	0.042934	12.11975	0.0000
FASBIS	2.971785	0.402135	7.390015	0.0000
R-squared	0.957019	Mean dependent var	191992.8	
Adjusted R-squared	0.949856	S.D. dependent var	23381.28	
S.E. of regression	5235.758	Akaike info criterion	20.11542	
Sum squared resid	8.22E+08	Schwarz criterion	20.37934	
Log likelihood	-356.0776	Hannan-Quinn criter.	20.20754	
F-statistic	133.5968	Durbin-Watson stat	1.475819	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Olahan Peneliti dengan Eviews 8, 2016

Estimasi model regresi di atas memberikan/menghasilkan persamaan regresi

$$\text{FUNDING} = -244096.48 - 1166.06 \text{ INFLASI} + 1433.5 \text{ BAGI HASIL} + 6.6 \text{ KANTOR} + 0.52 \text{ PDB.}$$

Persamaan regresi tersebut menggambarkan adanya hubungan positif maupun negatif. Hubungan rincinya dapat diperhatikan pada analisis berikut :

### 2.1. Analisis Regresi

Dari tampilan model matematis regresi dapat dipahami bahwa :

- a. Nilai konstanta -244096.48 menyatakan jika seluruh variabel independen tetap, maka nilai Funding turun sebesar adalah Rp. -244096.48 miliar.
- b. Nilai koefisien inflasi -1166.06 menyatakan jika inflasi naik sebesar 1 persen maka akan menurunkan nilai Funding sebesar Rp. 1.166,06 miliar. Sebaliknya, jika inflasi turun sebesar 1 persen maka akan meningkatkan nilai Funding sebesar Rp. 1.166,06 miliar. Di sini inflasi memiliki pengaruh negatif. Hal ini sesuai dengan hipotesis.
- c. Nilai koefisien bagi hasil 1433.5 menyatakan jika bagi hasil naik 1 persen, maka akan meningkatkan nilai Funding sebesar Rp. 1,433,5 miliar. Sebaliknya, jika bagi hasil turun 1 persen, maka akan menurunkan nilai Funding sebesar Rp. 1,433,5 miliar. Di sini pendapatan memiliki pengaruh positif. Hal ini sesuai dengan hipotesis.
- d. Nilai koefisien Jumlah Jaringan Kantor 6.6 menyatakan jika kantor bank syariah bertambah 1 cabang, maka akan meningkatkan nilai Funding sebesar Rp. 6,6 miliar. jika kantor bank syariah berkurang 1 cabang, maka akan menurunkan nilai Funding sebesar Rp. 6,6 miliar. Di sini jumlah kantor cabang memiliki pengaruh positif terhadap Funding. Hal ini sesuai dengan hipotesis.

- e. Nilai koefisien PDB 0.52 menyatakan jika pendapatan PDB meningkat Rp. 1 miliar, maka akan meningkatkan nilai Funding sebesar Rp. 520 juta. Di sini PDB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Funding. Hal ini sesuai dengan hipotesis.

### 3. Uji Hipotesis

Untuk menentukan diterima atau ditolak hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji hipotesis yang terdiri dari uji Determinasi, Uji F dan Uji t sebagai berikut :

#### a. Uji Determinasi

Uji determinasi ini dilakukan untuk mengukur seberapa jauh variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen dalam model yang digunakan. Dari hasil estimasi pada Eviews 8 didapat hasil koefisien determinasi (R-square) sebagai berikut.

**Tabel 4.29 : Koefisien Determinasi**

Adjusted R-squared	0.949856
--------------------	----------

Sumber : Hasil Olahan Peneliti dengan Eviews 8, 2016

Karena analisis ini menggunakan variabel lebih dari dua, maka peneliti menggunakan nilai *adjusted R-square* dalam uji determinasi ini. Data *adjusted R square* adalah 0,95 atau 95%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bagi hasil dan kantor dapat menjelaskan funding 95% sedangkan 5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.



### 1). Uji F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama (simultan) pada variabel inflasi, bagi hasil, jumlah kantor, PDB mempengaruhi funding perbankan syariah.

Dari hasil estimasi pada Eviews 8 diperoleh hasil sebagai berikut.

**Tabel 4.30 : Hasil Pengujian Uji-F**

F-statistic	133.5968
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Hasil Olahan Peneliti dengan Eviews 8, 2016

Berdasarkan hasil pengujian di atas dapat dilihat nilai F-hitung adalah 133.5968 dengan nilai probabilitas adalah 0.000000. Nilai F-tabel untuk jumlah obsevasi sebanyak 36 dengan tingkat signifikansi 5% dan k atau jumlah seluruh variabel baik variabel independen dan dependen adalah 5, maka nilai  $N_1 = k - 1 = 6 - 1 = 5$ ,  $N_2 = n - k = 36 - 5 = 31$  adalah 2,52. Sehingga diperoleh bahwa F-hitung lebih besar dari F-tabel atau  $133.5968 > 2,18$ , dan juga dapat dilihat pada nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5% atau  $0.000000 < 0,05$  maka dapat diambil kesimpulan bahwa, variabel bebas (*variabel independen*) secara bersama-sama mempengaruhi Funding.

### 2). Uji t

Uji *t-test* digunakan untuk melihat hubungan atau pengaruh antara variabel inflasi, bagi hasil, jumlah kantor, PDB secara individual (parsial) terhadap variabel funding. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.31 : Hasil Uji t**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-244096.5	42001.97	-5.811549	0.0000
INFLASI	-1166.055	1216.878	-0.958235	0.3456
BAGI HASIL	1433.486	1257.338	1.140096	0.2633
KANTOR	6.615476	10.55459	0.626787	0.5355
PDB	0.520355	0.042934	12.11975	0.0000

Sumber : Hasil Olahan Peneliti dengan Eviews 8- 2016

Dasar pengambilan keputusan adalah dengan membandingkan t-tabel dengan t hitung. Data di atas diketahui dk (derajat kebebasan) =  $36 - 5 = 31$  dengan taraf kepercayaan  $\alpha = 0,05$  maka t-tabel sebesar 2.03951. Berdasarkan hasil estimasi pada tabel sebelumnya maka berikut ini hasil uji t statistik dari masing-masing variabel independen sebagai berikut.

### **2).a Inflasi**

Hasil pengujian dengan menggunakan program Eviews 8 diperoleh nilai t statistik untuk inflasi adalah -0.958235 dan probabilitas 0.3456. Sedangkan nilai t tabel untuk jumlah observasi sebanyak 10 dengan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan (dk) =  $36 - 5 = 31$  diperoleh 2.03951. Sehingga diperoleh bahwa t-statistik lebih kecil dari t-tabel atau  $-0.958235 < 2,30600$ , dan juga dapat dilihat pada nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5% atau  $0.3456 > 0,05$  maka dapat diambil kesimpulan bahwa inflasi belum secara signifikan mempengaruhi Funding. Atau dengan kata lain menyatakan bahwa, inflasi belum memberikan pengaruh nyata terhadap Funding perbankan syariah dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5%.

## 2). b Bagi Hasil

Hasil pengujian dengan menggunakan program Eviews 8 diperoleh nilai t statistik untuk inflasi adalah 1.140096 dan probabilitas 0.2633. Sedangkan nilai t tabel untuk jumlah observasi sebanyak 10 dengan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan ( $dk$ ) =  $36 - 5 = 31$  diperoleh 2.03951. Sehingga diperoleh bahwa t-statistik lebih kecil dari t-tabel atau  $1.140096 < 2,30600$ , dan juga dapat dilihat pada nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5% atau  $0.2633 < 0,05$  maka dapat diambil kesimpulan bahwa bagi hasil belum secara signifikan mempengaruhi Funding. Atau dengan kata lain menyatakan bahwa, bagi hasil belum memberikan pengaruh nyata terhadap Funding perbankan syariah dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5%.

## 2). c Jumlah Kantor

Hasil pengujian dengan menggunakan program Eviews 8 diperoleh nilai t statistik untuk inflasi adalah 0.626787 dan probabilitas 0.5355. Sedangkan nilai t tabel untuk jumlah observasi sebanyak 10 dengan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan ( $dk$ ) =  $36 - 5 = 31$  diperoleh 2.03951. Sehingga diperoleh bahwa t-statistik lebih kecil dari t-tabel atau  $0.626787 < 2,30600$ , dan juga dapat dilihat pada nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5% atau  $0.5355 < 0,05$  maka dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah kantor belum secara

signifikan mempengaruhi Funding. Hal ini menyatakan bahwa jumlah kantor belum memberikan pengaruh nyata terhadap Funding perbankan syariah dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5%.

## **2). d PDB**

Hasil pengujian dengan menggunakan program Eviews 8 diperoleh nilai t statistik untuk inflasi adalah 12.11975 dan probabilitas 0.0000. Sedangkan nilai t tabel untuk jumlah observasi sebanyak 10 dengan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan ( $dk$ ) =  $36 - 5 = 31$  diperoleh 2.03951. Sehingga diperoleh bahwa t-statistik lebih kecil dari t-tabel atau  $0.626787 < 2.03951$ , dan juga dapat dilihat pada nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5% atau  $0.5355 > 0,05$  maka dapat diambil kesimpulan bahwa PDB belum secara signifikan mempengaruhi Funding. Atau dengan kata lain menyatakan bahwa, PDB belum memberikan pengaruh nyata terhadap Funding perbankan syariah dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5%.

## **3). Uji Koefisien Determinasi**

R-squared biasa digunakan pada regresi sederhana, sedangkan Adjusted R-squared digunakan pada regresi linier berganda. Koefisien determinasi atau Adjusted R-squared ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantara 0 dan 1. Jika nilai  $R^2 < 0,5$  hal ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas. Tetapi jika nilai  $R^2$  mendekati 1 ( $0,5 < R^2 < 1$ ) bermakna bahwa variabel

independen memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Tampilan hasil estimasi model regresi di atas terlihat bahwa nilai Adjusted R-squared ( $R^2$ ) = 0.9499 (mendekati 1) . Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mampu menerangkan variasi Funding sebesar 95 %, selebihnya sebesar 5 % dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

### **C. Temuan Penelitian**

Perihal temuan penelitian ini dapat dirinci kepada dua hal penting yang terdiri dari : data penelitian, dan analisis data.

#### **1. Data Penelitian**

Data sekunder penelitian ini terkonsentrasi pada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), awalnya statistiknya diterbitkan secara periodik setahun dalam bentuk buku sampai tahun 2012. Awal tahun 2015 data sekunder dimaksud disajikan dalam tabel secara online oleh OJK. Adapun data sekunder berupa pendapatan nasional dan inflasi, selain diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia juga diterbitkan oleh badan-badan lain secara nasional maupun internasional. Persoalan mendasarnya adalah data statistik yang diterbitkan lewat buku disertai dengan keterangan yang lengkap dan jelas, sedangkan data online keterangan tentang data hanya diberikan seperlunya. Di sisi lain antara badan yang berwenang mengeluarkan informasi data sekunder dimaksud, acapkali berbeda output datanya. Masing-masing survei memiliki tujuan dan cakupan yang berbeda. Karena itu kita harus berhati-hati dalam

menganalisis data yang bersifat *time series*. Walaupun demikian, ini tidak berarti kita tidak punya gambaran sama sekali. Kita tetap bisa menganalisis berdasarkan data yang tersedia berikut dengan informasi penunjangnya<sup>214</sup>. Berarti ada cara yang dapat diupayakan oleh peneliti dalam mengatasi data bias guna membuktikan kebenaran hasil penelitiannya.

## 2. Analisa Data

Data sekunder yang telah kita himpun ternyata setelah diolah dengan software baku (standar) tidak serta-merta memberikan hasil olahan yang signifikan. Namun bukan berarti yang menggunakan data primer diolah langsung jadi dan signifikan, ada lebih kurangnya yaitu, data sekunder relatif mudah mendapatkannya, tetapi tidak secara baik memahami seluk beluk datanya. Sementara menggunakan data primer lebih menyita waktu, tenaga serta biaya, akan tetapi peneliti lebih mengetahui seluk beluk data, menyangkut reliabilitas, validitas dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting diperhatikan bagi peneliti, karena sangat berpengaruh dalam membuktikan hipotesis, analisis uji asumsi dasar/klasik, dan uji statistik. Data yang kita himpun dan olah disatu sisi boleh jadi terbukti secara signifikan dalam satu analisis, tetapi tertolak di analisis / hipotesis yang lain.

Hasil penelitian ini yang perlu dianalisa dan dipertimbangkan pada garis besarnya terdiri dari, **pertama** : Uji Asumsi Klasik (Uji Asumsi Dasar), yaitu uji yang menentukan apakah data memiliki penyakit atau tidak. Jika data memiliki penyakit, maka hasil olah data memberikan hasil/gambaran tidak signifikan

---

<sup>214</sup>Faisal Basri, Haris Munandar, Lanskap Ekonomi Indonesia, h. 61.

adapun data yang tidak berpenyakit memberikan hasil/gambaran signifikan. Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari ; Uji Normalitas, Uji\_Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Linearitas. **Kedua** : Estimasi Model Regresi, yaitu membaca hasil persamaan regresi yang dihasilkan pengolah data, apakah persamaan regresi mencerminkan hipotesa yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak. Jika persamaan regresi mencerminkan hipotesa yang telah ditetapkan sebelumnya, berarti ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. **Ketiga** : Uji Statistik, yaitu uji pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat , baik secara bersama-sama (*simultan*) maupun secara sendiri-sendiri (*parsial*). Uji Statistik terdiri dari, Uji – t (*parcial test*), dan Uji – F (*simultan test*).

#### **D. Diskusi Hasil Penelitian**

Dari Uji Asumsi Klasik ditemukan bahwa, nilai probabilitas (*probability*) 0,68756 lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha = 5 \%$ ) atau  $0,68756 > 0,05$ , koefisien Jarque-Bera (J-B = 0,79) lebih kecil dari 2, dengan terpenuhinya kriteria/ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa data penelitian dari setiap variabel *berdistribusi normal*. Nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dari masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10, dengan terpenuhinya kriteria/ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada keeratan hubungan antar variabel bebas atau tidak terjadi *multikolinearitas* pada data variabel bebas. Nilai Durbin-Watson (DW) pada hasil regresi 1,475819, berada diantara nilai batas bawah (dl) = 1,1755 dan nilai batas atas (du) = 1,7987, hasilnya data tidak dapat disimpulkan

(*inconclusive*), data dikatakan dapat disimpulkan (*conclusive*) tidak ada autokorelasi jika DW terletak antara nilai batas atas ( $du$ ) dan ( $4 - du$ ).

Di sisi lain *Chi-Square* lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ) atau *Chi-Square* ( $0,5161$ )  $> 0,05$ , dengan terpenuhinya salah satu kriteria/ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa data tidak terkena *autokorelasi*. Nilai *Obs\*R-Squared* ( $0,3769$ ) lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ) atau  $0,3769 > 0,05$  pada Uji – White, dengan terpenuhinya kriteria/ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa data tidak terkena heteroskedastisitas. Nilai F-Statistik ( $0,9437$ ) lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ) atau  $0,9437 > 0,05$  pada Uji Ramsey – Reset, dengan terpenuhinya kriteria/ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa model persamaan linear dan dapat digunakan.

Berdasarkan Uji Asumsi Klasik (Uji Asumsi Dasar) yang terdiri dari ; *Uji Normalitas*, *Uji Multikolinearitas*, *Uji Autokorelasi*, *Uji Heteroskedastisitas*, dan *Uji Linearitas*, dimana terpenuhinya kriteria/ketentuan yang diperlukan maka dapat disimpulkan bahwa, data penelitian ini tidak berpenyakit dan dapat memberikan hasil/gambaran secara signifikan. Oleh karenanya data penelitian ini layak dipakai untuk penelitian selanjutnya.

Dari output regresi yang memberikan persamaan regresi :  $Funding = -0244096,48 - 1166,06 \text{ Inflasi} + 1433,5 \text{ Bagi Hasil} + 6,6 \text{ Kantor} + 0,52 \text{ PDB}$  dapat disimpulkan bahwa : Jika seluruh variabel independen tetap (*ceteris paribus*), nilai funding turun sebesar Rp 244996 miliar. Jika inflasi naik sebesar 1 persen, dimana variabel independen lainnya tetap (*ceteris paribus*), nilai funding turun sebesar Rp 1166,05 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa **Inflasi (IFL)**



berpengaruh negatif bagi **Funding**. Jika bagi hasil naik sebesar 1 persen, dimana variabel independen lainnya tetap (*ceteris paribus*), nilai funding naik sebesar Rp 1433,5 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa **Bagi Hasil (BHS)** berpengaruh positif bagi **Funding**. Jika kantor bank syariah bertambah 1 cabang, dimana variabel independen lainnya tetap (*ceteris paribus*), nilai funding naik sebesar Rp 6,6 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa **Jumlah Jaringan Kantor (JJK)** berpengaruh positif bagi **Funding**. Jika pendapatan nasional (PDB) meningkat Rp 1 miliar, dimana variabel independen lainnya tetap (*ceteris paribus*), maka akan meningkatkan nilai funding sebesar Rp 520 juta. Hal ini menunjukkan bahwa **Pendapatan Nasional (PDB)** berpengaruh positif bagi **Funding**. Fakta ini menunjukkan bahwa hipotesa yang telah ditetapkan sebelumnya diterima secara signifikan.

Dari Uji Statistik atau Uji Hipotesis, baik secara bersama-sama (*simultan*) atau Uji – F maupun secara sendiri-sendiri (*parsial*) atau Uji – t diperoleh hasil, koefisien determinasi (*R-Square*) berupa nilai *adjusted R-Square* 0,95 (95 %). Hal ini berarti bahwa, variabel bebas berupa bagi hasil dan kantor secara parsial dapat menjelaskan variabel terikat (*funding*) 95 % sedangkan 5% lainnya dijelaskan oleh faktor lain. Berdasarkan Uji – F diperoleh nilai F-hitung 133,5968 dengan nilai prob (F-statistik) 0,000000. Dengan ketentuan F- tabel 2,52, berarti pula bahwa F- tabel (133,5968) > F- tabel (2,52). Di sisi lain prob (F-statistik) lebih kecil dari nilai signifikansi atau  $0,000000 < 0,05$ . Seluruh variabel bebas secara bersama-sama (*simultan*) berpengaruh terhadap variabel terikat (*funding*). Karenanya kita tidak akan pernah yakin bahwa model dari data akan

mencerminkan secara penuh hubungan secara teori, maka dari estimasi yang diperoleh akan selalu ada residual (*disturbance term*)<sup>215</sup>. Model empiris yang baik merupakan simpifikasi kenyataan khususnya terkait dengan perilaku suatu kelompok agen. Model yang telah melewati seluruh prosedur secara baik dan benar dapat digunakan untuk pemanfaatan. Pemanfaatan yang umum digunakan melalui pemodelan ekonometrika adalah proyeksi (*forecasting*) dan simulasi untuk pengambilan kebijakan<sup>216</sup>. Secara global hasil diskusi penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1). Berdasarkan Uji - Asumsi Dasar (Uji – Klasik) dapat disimpulkan bahwa, data penelitian ini tidak berpenyakit dan oleh karenanya mengaplikasikan data penelitian ini dapat memberikan hasil / gambaran secara signifikan, serta data penelitian ini layak dipakai untuk penelitian selanjutnya.
- 2). Berdasarkan persamaan regresi dapat disimpulkan bahwa, PDB, Bagi Hasil, dan Jumlah jaringan kantor berpengaruh positif terhadap Funding, sedangkan Inflasi memberikan pengaruh negatif.
- 3). Berdasarkan Uji Statistik atau Uji Hipotesis dapat disimpulkan bahwa, secara bersama-sama (*simultan*) variable independen berpengaruh signifikan terhadap Funding sebagai variable terikat, akan tetapi secara sendirim – sendiri (parsial) variable independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Funding.

---

h. 3. <sup>215</sup>M. Doddy Ariefianto, Ekonometrika, esensi dan aplikasi dengan menggunakan Eviews,

h.7. <sup>216</sup>M.DoddyAriefianto, Ekonometrika, esensi dan aplikasi dengan menggunakan Eviews,

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data yang peneliti lakukan dengan menggunakan software Eviews Versi 8, serta analisis data variabel penelitian melalui Uji Asumsi Dasar/Klasik, Estimasi Model Regresi Linear Berganda dan Uji Statistik, maka hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut :

- 1      Pendapatan nasional (PDB) sebagai salah satu variabel independen penelitian, berbanding lurus atau berpengaruh *positif* terhadap Funding sebagai variabel dependen. Koefisien persamaan regresi PDB sebesar 0,52 dapat dipahami bahwa, meningkatnya pendapatan sebesar RP 1 miliar mempengaruhi peningkatan Funding sebesar Rp 520 juta. Sebaliknya penurunan pendapatan sebesar RP 1 miliar mempengaruhi penurunan Funding sebesar Rp 520 juta.
  
2.      Inflasi (IFl) sebagai salah satu variabel independen penelitian, berbanding terbalik atau berpengaruh *negatif* terhadap Funding sebagai variabel dependen. Koefisien inflasi sebesar -1166,06 dapat dipahami bahwa, menurunnya inflasi sebesar satu persen (1 %) mempengaruhi peningkatan Funding sebesar Rp 1. 166,06 miliar. Sebaliknya kenaikan inflasi sebesar satu persen (1 %) mempengaruhi penurunan Funding sebesar Rp 1. 166,06 miliar.

3. Bagi hasil (BHS) sebagai salah satu variabel independen penelitian, berbanding lurus atau berpengaruh *positif* terhadap Funding sebagai variabel dependen. Koefisien persamaan regresi bagi hasil sebesar 1433,5 dapat dipahami bahwa, meningkatnya bagi hasil sebesar RP 1 miliar mempengaruhi peningkatan Funding sebesar Rp 1. 433,5 miliar. Sebaliknya penurunan pendapatan sebesar RP 1 miliar mempengaruhi penurunan Funding sebesar Rp 1. 433,5 miliar.
4. Jumlah Jaringan Kantor (JJK) sebagai salah satu variabel independen penelitian, berbanding lurus atau berpengaruh *positif* terhadap Funding sebagai variabel dependen. Koefisien persamaan regresi JJK sebesar 6,6 dapat dipahami bahwa, meningkatnya jumlah jaringan kantor 1 (satu) cabang mempengaruhi peningkatan Funding sebesar Rp 6,6 miliar. Sebaliknya menurunnya jumlah jaringan kantor 1 (satu) cabang mempengaruhi penurunan Funding sebesar Rp 6,6 miliar.
5. Nilai konstanta persamaan regresi sebesar – 244096,48 dapat dipahami bahwa, jika seluruh variabel independen dianggap tetap (*Ceteris Paribus*), maka nilai Funding turun sebesar RP 244. 096,48 miliar.

Terbukti bahwa, Pendapatan Nasional (PDB), Bagi hasil (BHS), dan Jumlah jaringan kantor (JJK) berbanding lurus atau berpengaruh positif, adapun Inflasi (IFl) berbanding terbalik atau berpengaruh negatif terhadap Funding. Dengan terpenuhinya seluruh kriteria pengujian yang dipergunakan, maka hipotesa yang telah ditetapkan sebelumnya pada penelitian ini, layak untuk diakui dan diterima secara signifikan dalam bidang karya tulis ilmiah.

## B. Saran-saran

Mencermati temuan–temuan penelitian, diskusi hasil penelitian, hal-hal yang berkembang dan perlu diperhatikan, maka peneliti dalam hal ini menyarankan sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan data penelitian ekonometrika disarankan untuk diadakan study data terlebih dahulu sebelum diolah, agar tidak terjadi penyimpangan data (data bias). Hal ini berkaitan erat dengan Uji Klasik dan Uji Statistik, yaitu kecocokan data, kesalahan standar estimator, dan diterima atau ditolaknya hipotesis. Atau kemungkinan lain data yang diperoleh diolah terlebih dahulu, selanjutnya diadakan pengurangan atau penambahan serta manipulasi data.
2. Dalam mencapai / meraih kesejahteraan hakiki (*real welfare*) manusia mestinya menggunakan indikator falah yang mencerminkan kesejahteraan lahir iah maupun batiniah. Bukan hanya kepentingan dunia semata yang cenderung egosentris atau mau menang dan mau kenyang bagi keperluan diri sendiri tanpa memikirkan dan memiliki kepekaan merasakan orang sekitar (lingkungan) nya.
3. Produk-produk perbankan syariah hendaknya diaplikasikan secara murni dan konsekwen, dipublikasikan kepada masyarakat luas atas keunggulan yang dimilikinya dan dikelola oleh tenaga profesional perbankan syariah. Menjadikan uang sebagai *public goods* dan pemerataan pendistribusiannya. Sehingga uang bagaikan cermin, tidak memiliki warna tetapi dapat memantulkan (merefleksikan) semua warna.

4. Kenaikan pendapatan nasional (PDB) sebaiknya tidak hanya publikasi semata, tetapi merupakan pendapatan riil nasional yang terdistribusi secara baik dan merata. Sehingga kenaikan pendapatan nasional berbanding lurus dengan pencapaian kesejahteraan penduduknya. Pendapatan nasional naik mestinya kesejahteraan penduduknya juga naik secara merata, tidak terkonsentrasi hanya pada sekelompok orang. Sehingga muncul istilah yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Paradigma ini harus dapat dirobah menjadi, yang kaya makin kaya dan yang miskin terangkat kesejahteraan hidupnya.
5. Meneliti eksistensi perbankan syariah di Indonesia sebagaimana yang peneliti lakukan menggunakan data sekunder, sebaiknya objektivitas dan validitas data dapat mencerminkan fakta yang sebenarnya dari masing-masing variable estimator, sehingga tidak terjadi data bias. Dalam perhitungan statistik kemungkinan semua orang setuju bahwa data dapat dimanipulasi sehingga estimator dapat memberikan hasil yang diharapkan. Tetapi dalam kehidupan nyata sulit untuk diterima jika pendapatan nasional naik, penduduk miskin malah bertambah, Inflasi kecil, tetapi harga barang dan jasa naik secara cepat dan terus menerus. *Funding* bank syariah menurut statistik naik secara fantastis, tetapi fakta membuktikan nasabah loyalnya tidak berbanding lurus dengan kenaikan fandingnya. Di sisi lain *markert share* perbankan syariah masih jauh tertinggal oleh markert share perbankan konvensional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i Muhammad Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Azizy, Qodri A, Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Arif Rianto Al. Nur M., Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis, Jakarta : CV Pustaka Setia, 2011.
- Bilas, A/B. Wahid Djoerban, Teori Ekonomi Mikro, Jakarta : Erlangga, 1984.
- Basri Faisal dan Munandar Haris, Lanskap Ekonomi Indonesia, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia, Jakarta : BPS – Statistik Indonesia, 2011
- Danapriatna, Nana, *Pengantar Statistik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Dornbusch Rudiger, at all*, Ekonomi Makro (terj) Edisi Kelima, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997.
- Deliarinov*, Perkembangan Pemikiran Ekonomi Jakarta : Rajawali Press, 1997.
- Doddy Ariefianto, Ekonometrika, Jakarta : Erlangga, 2012.
- Fauzi Yuslan, Info Bank No. 427 Vol. XXXVI, Pembiayaan Tumbuh Under, Jakarta : Bank Muamalat, 2014.
- Gregory Mankiw*, Pengantar Ekonomi Mikro, Jakarta : Salemba Empat, 2013.
- Hadad D. Muliaman, Info Bank 427 Vol. XXXVI, Pembiayaan Tumbuh Under Track, Jakarta : Bank Muamalat, 2014.
- Harahap S. Sofyan, at.al. Akuntansi Perbankan Syariah Edisi Revisi, Jakarta : LPFE – Usakti, 2006.
- Huda Nurul, at.al. Ekonomi Makro Islam, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- H, Annton Gunawan, Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991.

- Ismail, Akuntansi Bank, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Islahi A.A. Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah (Terj) Anshari T, Surabaya : Bina Ilmu, 1997.
- Karim A. Adiwarman, Ekonomi Makro Islami, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam, Jakarta : Salemba Empat, 2002.
- Murni Asfia, Ekonomika Makro, Bandung : Aditama, 2006.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Jakarta : Balai Pustaka, 1991.
- Rivai Veithzal, at.al. Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sudarsono, Pengantar Ekonomi Mikro, Jakarta : LP3ES, 1984.
- Sukirno Sadono, Makro Ekonomi Modern, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sumanjaya Rahmat, dkk, Teori Ekonomi Mikro, Medan : USU Press, 2008.
- Suharsimi, Arikunto *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Soule George, Pemikiran Para Pakar Ekonomi Islam (terj), T Gilarso Yogyakarta : Kanisius, 1994.
- Siregar Syofian, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif, Jakarta : Bumi Aksara, 2012.
- Suparmoko M, Pokok-pokok Ekonomika, Yogyakarta : BPFE, 2000.
- Utomo Punto Anif, at.al. Dua Dekade Ekonomi Syariah Menuju Kiblat Ekonomi Islam, Jakarta : Gres Publishing Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2014.
- Winarno, Wahyu Wing, Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 201



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. N a m a : **SYAMSURI**
2. N i m : 92214043404
3. Tpt/Tgl. Lahir : Damuli / 11 Oktober 1958
4. Pekerjaan : PNS
5. Gol/Pangkat : Pembina / (IV/a)
6. Alamat : Jl. Selamat Pulau No. 6 Medan

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Tamatan SDN Perk. Damuli Berijazah tahun 1972
2. Tamatan SMPN Aek Kanopan Berijazah tahun 1975
3. Tamatan SMA Kualuh Aek Kanopan Berijazah tahun 1979
4. Tamatan Sarmud IPA Tadris IAINSU Medan Berijazah tahun 1985
5. Tamatan S1 Matematika Tadris IAINSU Medan Berijazah tahun 1994

### **III. RIWAYAT PEKERJAAN**

1. Guru MAN 1 Tanjung Pura TMT 1 Maret 1986
2. Guru MAN 1 Medan TMT 1 Juni 1995
3. Kepala MTsN Damuli Pekan TMT 17 Maret 1996
4. Kepala MTsN Sabungan TMT 22 Januari 2001
5. Guru MAN 3 Medan TMT 23 April 2001
6. Guru MAS PPMDH TPI Jl. Pelajar No.44 Medan TMT 18-7-2005

